

Populasi

Volume 27 Nomor 2

Desember 2019

Artikel

- Pola Asuh Orang Tua pada Anak Usia 10-14 Tahun
di Daerah Istimewa Yogyakarta 1
*Umi Listyaningsih, Muhammad Arif Fahrudin Alfana, Resti Pujihastuti,
dan Hilma Amrullah*
- Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran
di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang 13
Ilham Alhaq Hazani, Ridho Taqwa, dan Rosmiyati Abdullah
- Maternal Healthcare Services and the Health Workers among the Migrant Slum
Dwellers of Bangalore City, Karnataka, India 30
Suchismita Mishra and T. Rajendra Prasad
- Kajian Delinkuensi Anak di Indonesia Tahun 2011-2015 40
Nisa'ul Khusna dan Winih Budiarti
- Determinan Perempuan Keluar dari Praktik Kawin Anum Suku Banjar 56
Norma Yuni Kartika, Muhajir Darwin, dan Sukamdi
- Foreign Workers' Roles for Businesses Breakout Process in an Ethnically
Themed Market: The Case of Halal Food Markets in Kyoto, Japan 71
Aris Chandra Pradikta
- Resensi Buku 85
Tak Ada Tempat untuk Mengelak
Muhadjir Darwin

KATA PENGANTAR

Jurnal Populasi Edisi Desember 2019 ini mengusung tema 'Ibu dan Anak'. Artikel pertama yang ditulis Umi Listyaningsih dkk. menjelaskan tentang pola asuh orang tua pada anak usia 10-14 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut penulis, pola asuh orang tua di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas pola asuh demokratis, otoriter, permisif, dan acuh, dan sebagian besar keluarga menyatakan telah menerapkan pola asuh demokratis untuk mendidik anak-anaknya.

Artikel berikutnya yang ditulis Ilham Alhaq Hazani dkk. membahas tentang peran pekerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga migran di Kota Palembang. Selain sebagai ibu rumah tangga, biasanya perempuan memiliki peran sebagai pekerja. Tekanan ekonomi dan pendapatan yang tidak mencukupi menjadi alasan bagi perempuan untuk memutuskan bekerja. Menurut penulis, pekerja perempuan telah berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga migran, seperti membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menambah penghasilan, menambahkan modal usaha dan investasi, tabungan serta biaya kesehatan dan biaya pendidikan.

Sementara itu, artikel dari India yang ditulis Suchismita Mishra dan Rajendra Prasad membahas tentang layanan kesehatan ibu yang diberikan petugas kesehatan di kalangan migran antarnegara yang tinggal di daerah kumuh kota Bangalore, India. Menurut penulis, layanan kesehatan ibu yang diberikan petugas kesehatan tidak dapat menjangkau populasi migran karena lokasi tinggal para migran dan banyak perempuan migran kembali ke tempat asal mereka untuk melahirkan. Para migran yang pindah untuk melahirkan di tempat asal mereka mengakses layanan tenaga kesehatan lebih baik daripada mereka yang tinggal di Kota Bangalore. Mekanisme yang lebih baik harus dikembangkan untuk meningkatkan layanan petugas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan primer, seperti perawatan kesehatan ibu.

Di sisi lain, Nisa'ul Khusna dan Winih Budiarti mengkaji tentang delinkuensi anak di Indonesia pada 2011 – 2015. Delinkuensi anak di Indonesia saat ini merupakan masalah yang serius karena jumlah anak yang berhadapan dengan hukum meningkat tajam pada kurun waktu enam tahun terakhir. Menurut penulis, variabel pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat delinkuensi, sedangkan yang berpengaruh positif terhadap tingkat delinkuensi anak di Indonesia adalah variabel rata-rata lama sekolah dan persentase pengguna internet.

Selanjutnya, Norma Yuni Kartika dkk. menyoroiti faktor-faktor yang menyebabkan perempuan Suku Banjar di Kalimantan Selatan tidak berminat melakukan praktik kawin anum (perkawinan di bawah umur 16 tahun). Menurut penulis, terdapat empat faktor yang menyebabkan perempuan keluar dari praktik *kawin anum*, yaitu faktor individu (berpendidikan tinggi dan bekerja), interpersonal (tingkat ekonomi keluarga asal perempuan tinggi), institusional (syarat menikah sudah memiliki kartu tanda penduduk) dan *societal* (memenuhi syarat usia minimal resmi yang diijinkan untuk menikah menurut undang-undang perkawinan).

Artikel terakhir, yang ditulis Aris Chandra Pradikta, membahas tentang peran pekerja asing dalam proses pengalihan bisnis (business breakout) di pasar makanan halal di Kyoto, Jepang. Menurut penulis, meskipun para pekerja asing tersebut telah berkontribusi pada proses pengalihan bisnis, keberadaan mereka tidak dapat diandalkan dalam jangka waktu yang panjang. Praktik impor tenaga kerja bergantung pada dinamika perusahaan yang stabilitas pekerja migrannya dipengaruhi oleh kemampuan migran untuk mengubah pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai pangsa pasar global saat ini.

Ketua Penyunting,
Muhadjir Darwin

**Pola Asuh Orang Tua pada Anak Usia 10-14 Tahun
di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Umi Listyaningsih¹, Muhammad Arif Fahrudin Alfana¹, Resti Pujihastuti² dan Hilma Amrullah²

¹Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,

²Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Jakarta

Korespondensi: Umi Listyaningsih (*e-mail*: umilis@ugm.ac.id)

Abstrak

Usia 10-14 tahun merupakan masa remaja awal dimana usia tersebut merupakan usia persiapan anak saat tumbuh menjadi pribadi yang matang. Oleh sebab itu, pola asuh orang tua yang tepat pada usia ini akan menjadi hal yang penting bagi tahap perkembangan selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pola asuh orang tua pada anak usia 10-14 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel sebanyak 150 rumah tangga yang dipilih secara acak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas pola asuh demokratis, otoriter, permisif dan acuh. Berdasarkan keempat pola asuh tersebut, sebagian besar keluarga menyatakan telah menerapkan pola asuh demokratis untuk mendidik anak-anaknya.

Kata kunci: pola asuh; remaja; anak 10-14 tahun

Children Aged 10-14 Years Parenting in the Special Region of Yogyakarta

Abstract

Children aged 10-14 years are the stages of early adolescence. It is the age of preparation when they grow into mature ones. Parenting at this age will be very important for the next stage of children development. The purpose of the present study is to describe parenting in children aged 10-14 years in Special Region of Yogyakarta. The present study used a survey method with a sample of 150 households chosen randomly. The results indicated that parenting implemented by the families in the Special Region of Yogyakarta consisted of democratic parenting, authoritarian/otoriter parenting, permissive parenting and neglectful parenting. Based on the four types of parenting, most families implemented democratic parenting to raise and care their children.

Keywords: parenting; adolescents; children 10-14 years

Pendahuluan

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi dengan pertambahan penduduk yang cepat (Giyarsih dan Alfana, 2013). Berdasarkan data BPS (2018), pertumbuhan penduduk di DIY sebesar 1 persen per tahun selama kurun waktu 2010-2018. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk di DIY terus berubah sepanjang waktu dengan penambahan penduduk mencapai lebih dari 80 ribu jiwa. Selain itu, DIY juga mengalami pencapaian pembangunan manusia yang sangat baik. Indeks Pembangunan DIY selama 2010-2018 terus mengalami peningkatan dan pada 2018 menunjukkan nilai sebesar 79,53 (BPS, 2018). Meski demikian, beberapa permasalahan kependudukan masih terjadi seiring tingginya capaian-capaian indikator pembangunan tersebut. Salah satu permasalahan tersebut adalah masalah kenakalan remaja yang berujung pada kriminalitas.

Darwin, Ekawati dan Khabib (2017) menjelaskan bahwa permasalahan kenakalan remaja berada pada tahap yang mengawatirkan. Salah satu kasus kenakalan remaja yang terkenal di DIY adalah *klitih*. Kapolda DIY mengatakan bahwa persoalan kenakalan yang disebut *klitih* menjadi perhatian serius. Pada 2016, *klitih* di DIY tercatat sebesar 43 kasus dan hal yang memprihatinkan adalah kenakalan tersebut berujung kematian¹. Pada 2017, Kapolda menyatakan bahwa Yogyakarta Darurat "*klitih*". Menguatkan pendapat dari Kapolda DIY tersebut, data di Polda DIY menunjukkan bahwa kriminalitas jalanan dan kenakalan remaja (*klitih*) menyumbang 70 persen bentuk kenakalan remaja. Sedangkan sisanya adalah kenakalan berupa pembacokan/

pembunuhan, *geng* sekolah, kekerasan seksual dan bentrokan antarsuporter.

Hasil penelitian Darwin, Ekawati dan Khabib (2017) menjelaskan bahwa sebanyak 65 persen responden setuju bahwa peran orang tua yang lemah menjadi faktor dominan terkait munculnya kekerasan pada remaja di DIY. Artinya, salah satunya alasan kemunculan permasalahan kekerasan tersebut disebabkan oleh kegagalan pola asuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya.

Kegagalan pola asuh yang dijalankan orang tua dapat terjadi sejak masa remaja awal. Masa ini, menurut Steinberg (2017), disebut sebagai masa remaja awal (*early adolescent*) yang terjadi pada anak usia 10-14 tahun. Padahal masa ini merupakan masa anak mulai mencari jati diri atau identitas diri. Jika diarahkan dengan baik, tentu saja perilaku-perilaku negatif anak dapat diminimalisasi.

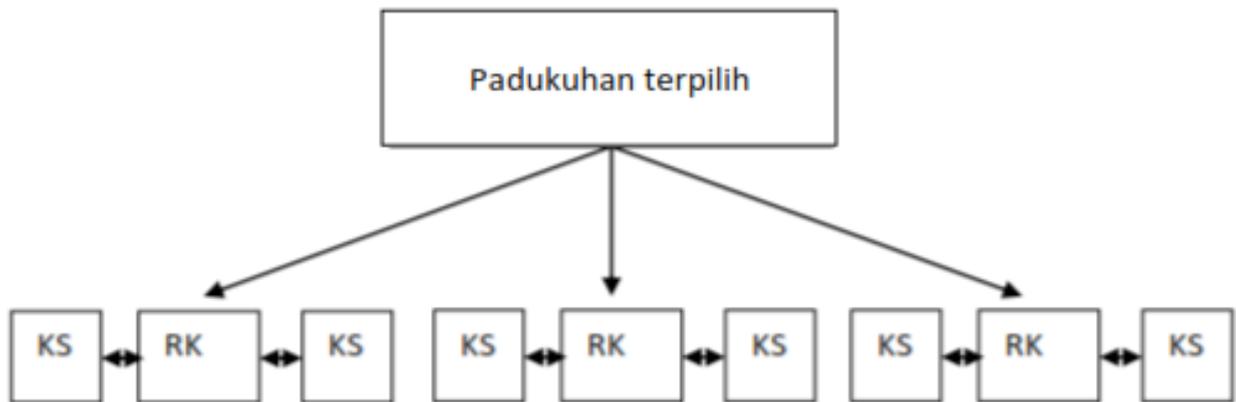
Penelitian ini berusaha menjelaskan pola asuh anak pada remaja awal yakni usia 10-14 tahun di Daerah Yogyakarta. Deskripsi sederhana ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar awal dalam melihat pola asuh yang lebih mendalam di DIY. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar perumusan pola asuh anak yang ideal dalam mencegah kenakalan anak, khususnya di DIY.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah keluarga di DIY yang memiliki anak berusia antara 10-14 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Studi kuantitatif berbasis keluarga ini akan menghasilkan data statistik untuk mengidentifikasi jenis dan pola asuh keluarga.

1 <https://www.merdeka.com/peristiwa/anarkisme-remaja-di-yogyakarta-selama-2016-terjadi-43-kasus.html>

*Pola Asuh Orang Tua pada Anak Usia 10-14 Tahun
di Daerah Istimewa Yogyakarta*



Keterangan:

RK: Keluarga (Responden Kunci) yang memiliki anak 10-14 tahun. Jumlah responden di setiap dukuh adalah 30 responden (total 150 responden di DIY)

KS: Keluarga sekitar responden kunci yang berada di kanan-kiri. Informasi dari KS akan menjadi pengontrol jawaban tentang bagaimana pola asuh RK sehari-hari.

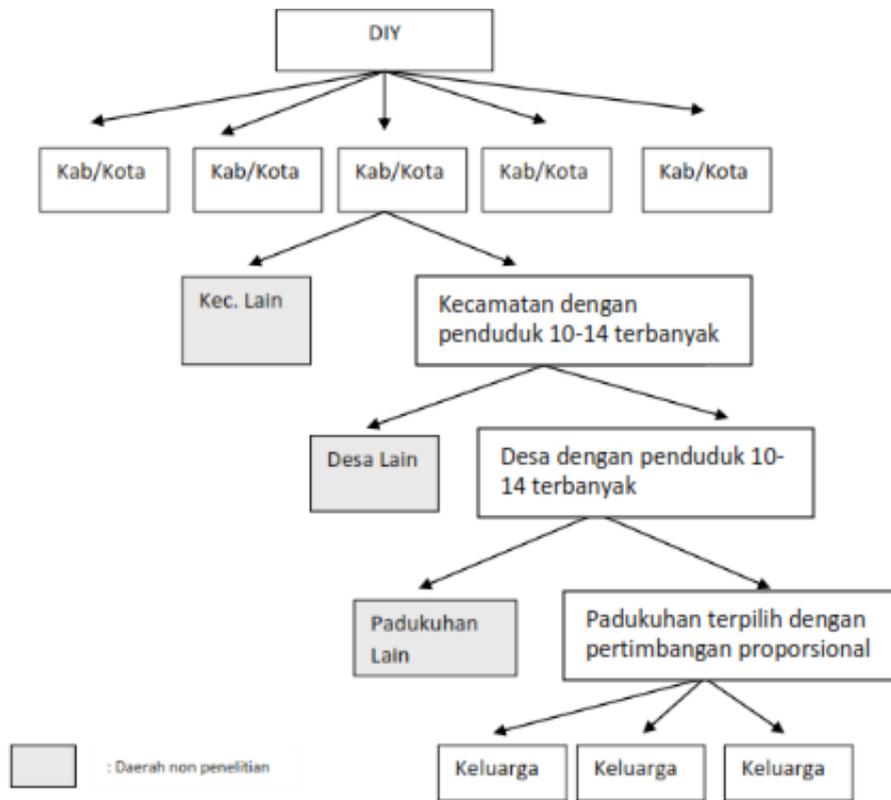
Gambar 1. Gambaran Pengambilan Sampel pada Tingkat Pedukuhan

Responden penelitian ini mencakup keluarga yang memiliki anak berusia 10-14 tahun. Responden anak 10-14 tahun dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampling acak bertingkat (*multistage random sampling*) dengan menggunakan kecamatan sebagai *cluster* yang dipilih pada tahap pertama dan unit keluarga pada tahap terakhir. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 150 responden yang tersebar di lima dukuh. Untuk mengontrol kebenaran jawaban responden, peneliti menggunakan metode triangulasi dengan mewawancarai tetangga di sekitar (kanan-kiri) responden utama. Ilustrasi pengambilan sampel pada tingkat pedukuhan dapat dilihat pada Gambar 1.

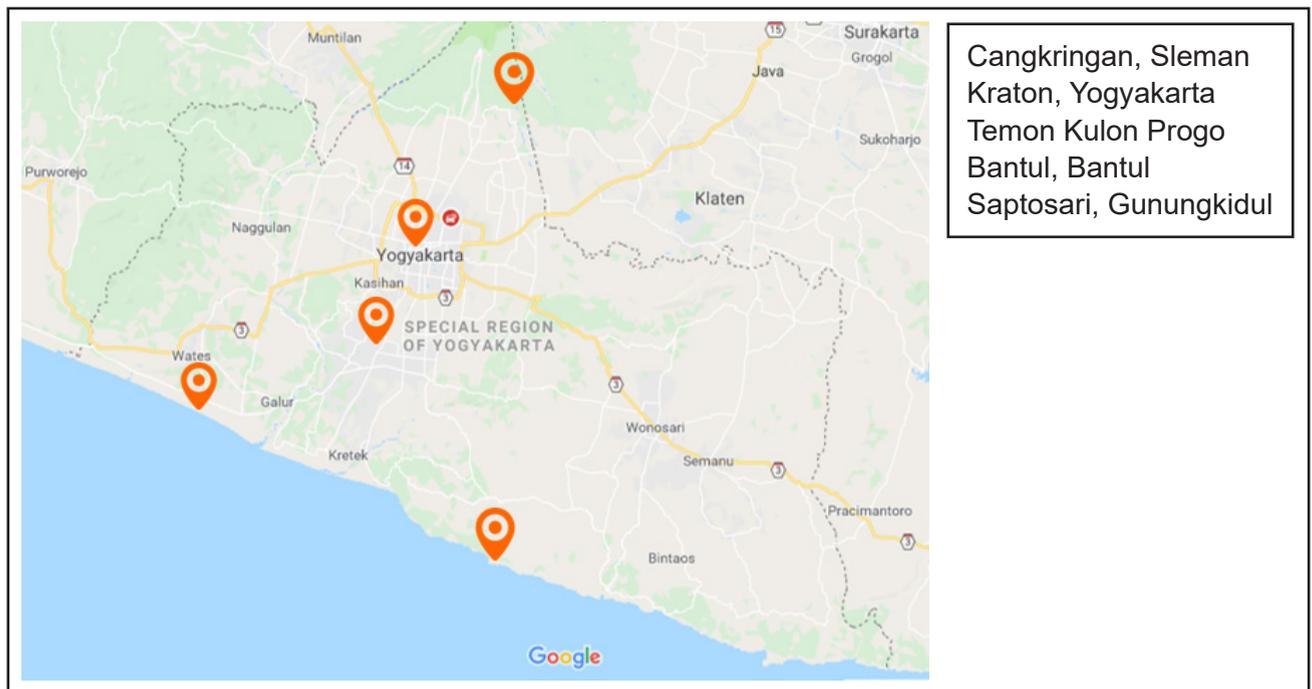
Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposif*) di lima dukuh di seluruh Kabupaten/Kota DIY dengan beberapa tahapan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pada tingkat kecamatan, kecamatan terpilih adalah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk usia 10-14 tahun terbanyak di kabupaten/kota di DIY. Berdasarkan tahapan tersebut, kecamatan yang terpilih terdiri atas Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Bantul dan Kecamatan Temon (Gambar 3).
2. Pada tingkat desa, desa terpilih adalah desa yang memiliki jumlah penduduk usia 10-14 tahun terbanyak di masing-masing kabupaten/kota.
3. Pada tingkat pedukuhan, sebaran responden dipilih berdasarkan pertimbangan proporsional.

Tahapan pemilihan lokasi penelitian tersebut secara rinci diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Ilustrasi Pengambilan Sampel Populasi



Gambar 3. Lokus Penelitian pada Tingkat Kecamatan di DIY

Pembahasan

Penduduk Remaja Awal (Usia 10-14 Tahun) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Masa remaja merupakan masa transisi awal menuju pribadi yang lebih matang. Masa remaja dibedakan menjadi tiga tahapan, yaitu 1) remaja awal (*early adolescent*), 2) tahap remaja pertengahan (*middle adolescent*) dan 3) remaja akhir (*late adolescent*). Pembagian tersebut didasarkan pada perubahan psikososial yang terjadi secara umum pada remaja (Steinberg, 2017). Setiap tahapan tersebut memiliki perbedaan terkait hubungan antara kondisi sosial dan kesehatan mental/emosional remaja.

Masa remaja awal terjadi pada remaja usia 10-14 tahun. Masa remaja awal menjadi sangat penting karena perubahan awal kondisi psikososial terjadi dari tahapan sebelumnya, yaitu masa anak-anak (*child*). Batubara (2010) menjelaskan bahwa setidaknya ada perubahan psikologis yang terjadi pada remaja awal, antara lain; a.) krisis identitas; b.) jiwa labil; c.) meningkatnya kemampuan verbal untuk mengekspresikan diri; d.) pentingnya sahabat; e.) berkurangnya rasa hormat terhadap orangtua; f.) menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh orangtua; g.) mencari kasih sayang orang lain; h.) kekanak-kanakan (*childish*); i.) pengaruh teman sebaya (*peer group*) pada cara hidupnya. Lebih lanjut, peran *peer group* pada masa ini sangat dominan. Mereka akan membentuk kelompok yang memiliki beberapa persamaan, seperti ciri-ciri, hobi, penampilan, dan sebagainya.

Jumlah remaja awal di DIY terhitung sangat besar, yaitu 7 persen dari total penduduk di DIY. Berdasarkan jumlah mutlak, remaja awal di DIY secara konstan mengalami kenaikan setiap tahun. Menurut data BPS,

jumlah penduduk DIY usia 10-14 tahun pada 2017 sebesar 261,6 ribu jiwa. Setelah diproyeksikan, jumlahnya menjadi 344 ribu jiwa pada 2045. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan jumlah remaja usia 10-14 tahun sebesar 4,28 persen per tahun atau lebih tinggi dari pertumbuhan total penduduk DIY yang hanya sebesar 1,8 persen per tahun.

Berdasarkan uraian tentang jremaja awal tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa tantangan pengelolaan generasi muda di DIY di masa mendatang perlu mendapatkan perhatian lebih. Pengaruh negatif yang muncul dan merusak generasi muda harus diminimalisasi. Pola asuh orang tua yang tepat menjadi kunci keberhasilan bagi generasi di DIY secara khusus dan Indonesia secara umum di masa depan.

Pola Asuh Keluarga pada Anak Usia 10-14 Tahun

Pola asuh merupakan suatu metode yang diterapkan orang tua untuk mengontrol, membimbing dan mendampingi putra-putrinya menuju proses pendewasaan. Menurut Hurlock (1999), pola asuh dapat dikategorikan menjadi tiga macam, antara lain:

1. Pola asuh otoriter
Metode pengasuhan anak dimana orang tua memposisikan anak harus taat dan tunduk kepada semua keinginan orang tua. Anak bahkan memiliki porsi yang sedikit untuk sekedar berdiskusi dengan orang tua terhadap segala tugas, hak dan kewajiban yang dibebankan kepada dirinya.
2. Pola asuh demokratis
Metode pengasuhan dimana orang tua membuka diri terhadap pendapat anaknya. Musyawarah antara orang tua dan anak diutamakan demi kebaikan bersama.

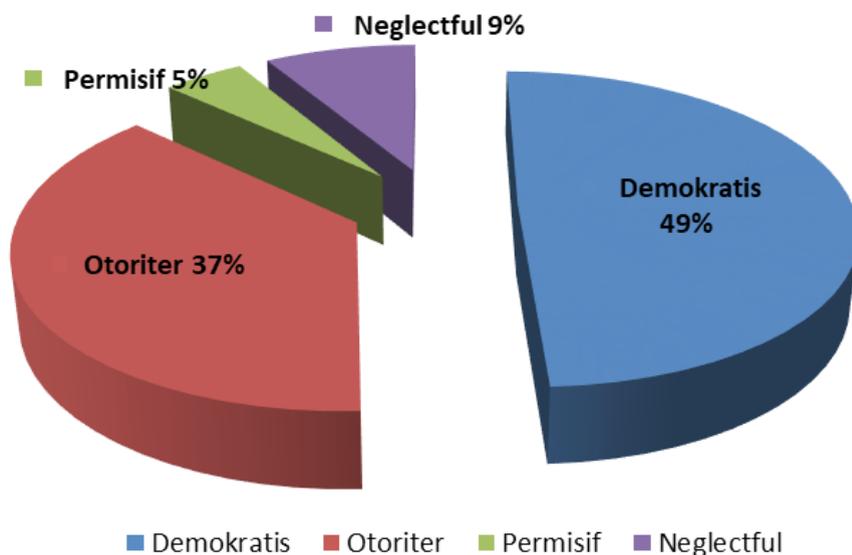
3. Pola asuh permisif

Metode pengasuhan orang tua dimana anak diberikan kebebasan dalam melakukan kehendaknya. Anak diberikan keleluasaan untuk mengatur kehidupannya dan cenderung kurang mendapatkan pengarahan dari orang tua. Akibatnya, jika hal ini dibiarkan, potensi anak untuk melakukan penyimpangan norma sangat besar karena anak tidak dapat menyesuaikan diri dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Anak yang diasuh dengan metode ini cenderung akan tumbuh dengan sikap yang tidak disiplin. Pola asuh seperti ini lazim di masyarakat sebagai pola asuh dengan tipe memanjakan anak.

Selain ketiga pola asuh tersebut, menurut Baumrind (1971), terdapat satu pola asuh yang disebut acuh (*neglectful*). Biasanya orang tua yang menerapkan pola asuh ini tidak memberikan waktu dan biaya yang

cukup untuk anaknya. Orang tua lebih dominan menggunakan waktunya untuk bekerja daripada mengurus anaknya. Orang tua cenderung menelantarkan anaknya dan kurang memberikan perhatian kepada anaknya, baik secara fisik maupun psikologis.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, hampir tidak ada keluarga yang hanya menerapkan satu pola asuh untuk mendidik anaknya. Hal ini berarti bahwa ada kombinasi metode pola asuh orang tua/keluarga dalam mendidik anak-anak mereka. Meskipun demikian, dominasi pada salah satu pola asuh anak akan tetap terlihat, yaitu orang tua/keluarga tersebut cenderung ke pola asuh demokratis, otoriter, permisif atau acuh. Gambar 4. menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua di daerah kajian mendidik anaknya dengan pola asuh demokratis (Gambar 4.). Sebesar 49 persen dari seluruh responden mengaku mendidik anaknya dengan pola asuh demokratis. Pola asuh ini



Sumber: Survei Lapangan, 2018

Gambar 4. Gambar Pola Asuh Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta

*Pola Asuh Orang Tua pada Anak Usia 10-14 Tahun
di Daerah Istimewa Yogyakarta*

dicirikan dengan orang tua yang mendorong anak untuk hidup mandiri, namun tetap membuat batasan. Selain itu, beberapa ciri lain yang diterapkan adalah memberikan kontrol tetapi bersikap fleksibel, mendengarkan pembicaraan dan pendapat anaknya, serta menunjukkan dukungan atas perilaku anak yang dinilai positif untuk dilakukan.

Pola Asuh Demokratis di Daerah Istimewa Yogyakarta

Para orang tua menggunakan pola asuh demokratis karena mereka ingin mengajarkan anak untuk hidup secara mandiri, namun tetap melibatkan anak sebagai bagian dari proses pembelajaran hidup. Husada (2013) menyatakan bahwa orang tua/keluarga yang mendidik anak dengan pola asuh demokratis cenderung memperlakukan anak agar mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Selain itu, para orang tua cenderung mendorong anak untuk bebas meskipun tetap memberikan batasan-batasan kepada anak tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak.

Pola asuh demokratis sangat wajar menjadi pola asuh yang paling dominan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya karena pola asuh ini memiliki peran yang baik dalam kehidupan anak. Peran tersebut berkaitan dengan kebaikan dalam hal prestasi belajar, kedisiplinan, kecerdasan emosi, perilaku prososial sampai perilaku seksual. Sari (2008), melalui survei yang dilakukan di SMU Pangudi Luhur Sedayu, menjelaskan bahwa terdapat korelasi positif antara pola asuh demokratis dan prestasi belajar siswa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh David, Matulesy dan Pratikto (2014) bahwa pola asuh demokratis yang diterapkan oleh orang tua/keluarga memiliki korelasi positif yang sangat signifikan terhadap motivasi

prestasi sampai tingkat mahasiswa. Temuan lain juga menjelaskan bahwa pola asuh demokratis memiliki signifikansi yang besar dan berkorelasi positif dengan variabel kemandirian anak.

Pola asuh demokratis juga memiliki hubungan yang positif terhadap variabel kedisiplinan, kecerdasan emosi, perilaku prososial, dan perilaku seksual. Berkaitan dengan kedisiplinan, pola asuh demokratis membentuk karakter kedisiplinan anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Filisyamala, Hariono dan Ramli (2016) dengan subjek penelitian berupa anak-anak Sekolah Dasar, pola asuh demokratis mempengaruhi kedisiplinan anak dengan wujud ketaatan anak terhadap peraturan yang dibuat, baik di rumah maupun di sekolah.

Berkaitan dengan kecerdasan emosi dan perilaku pro-sosial, Husada (2013) menyatakan bahwa variabel pola asuh demokratis memiliki hubungan signifikan dengan variabel kecerdasan emosi dan perilaku pro-sosial. Husada (2013) juga menjelaskan bahwa remaja yang tumbuh dalam pola asuh keluarga yang demokratis cenderung memiliki kecerdasan emosi dan jiwa prososial dibandingkan remaja dengan pola asuh lainnya. Berkaitan dengan perilaku seksual, pola asuh demokratis memiliki hubungan yang kuat dengan variabel ini. Wulandari (2010) menjelaskan dalam studi yang dilaksanakan di Gamping Yogyakarta, bahwa jika pola asuh ini dilaksanakan dengan baik oleh orang tua, maka perilaku seksual remaja akan turun. Hal ini sejalan dengan penelitian Mayasari (2015) di Semarang, bahwa ada korelasi yang kuat antara pola asuh demokratis dan moralitas remaja. Semakin tinggi penerapan pola asuh demokratis, maka semakin baik moralitas remaja di keluarga tersebut.

Pola asuh demokratis paling banyak diterapkan oleh keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan tingkat kabupaten/kota, para orang tua di Kabupaten Sleman tercatat paling banyak menerapkan pola asuh ini. Dari seluruh responden yang diwawancarai di Sleman, 70 persen keluarga mengaku menerapkan pola asuh tipe demokratis. Cara yang paling dominan dilakukan orang tua adalah bersikap akrab dengan anak, membimbingnya agar terus mandiri, menerima pendapat anak meskipun berbeda, dan mengingatkan anak ketika mereka lupa dengan kewajibannya.

Keluarga yang menerapkan pola asuh demokratis tergolong mampu/tidak miskin secara ekonomi. Ukuran kemiskinan tersebut berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) 2018 dengan garis kemiskinan di DIY sebesar Rp 409.744/kapita/bulan. Semua responden yang menerapkan pola asuh demokratis memiliki kendaraan bermotor dan hampir sepertiga dari responden memiliki mobil pribadi. Berdasarkan kepemilikan lahan tempat tinggal, 75 persen responden memiliki lahan sendiri dan hanya sekitar 5 persen memiliki rumah kontrak atau tinggal bersama saudara.

Pola Asuh Otoriter di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pola asuh tipe ini juga sering diterapkan oleh beberapa keluarga di DIY. Meskipun pola asuh otoriter dinilai dapat membuat anak tidak mandiri, tetapi beberapa penelitian justru menunjukkan fakta sebaliknya (El Hafiz dan Almaududi, 2015). Penelitian Chao (2001), misalnya, menjelaskan bahwa pola asuh otoriter berdampak positif pada keluarga generasi kedua Cina dan keluarga Eropa-Amerika. Dampak tersebut terlihat dari adanya kedekatan hubungan antara anak dan orang tua.

Dampak positif lain dari pola asuh otoriter bagi anak adalah anak lebih matang secara emosi, lebih agresif dan semakin mandiri. Penelitian Zazimah (2015) menjelaskan bahwa pola ini memiliki korelasi positif dengan agresivitas anak usia 4-5 tahun. Hidayati (2014) juga menjelaskan bahwa pola asuh ini memiliki korelasi positif dengan kemandirian dan kecerdasan pada anak SD. Penelitian lainnya, seperti penelitian El Hafiz dan Almaududi, menunjukkan bahwa pola asuh otoriter ini memiliki pengaruh positif terhadap kematangan emosi dengan dimoderatori kesabaran (2015). Sedangkan As'ari (2015) menemukan adanya korelasi negatif antara pola asuh otoriter dengan kemandirian anak SMK. Berdasarkan inkonsistensi hubungan tersebut, Baumrind (1968) menjelaskan bahwa pola asuh otoriter masih relevan dan berdampak baik jika diterapkan pada anak usia awal. Sedangkan penerapan pola asuh otoriter pada anak yang sudah memasuki usia remaja dianggap tidak cocok lagi untuk diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pola asuh otoriter di DIY berada dalam kategori tinggi. Sebanyak 37 persen keluarga mengaku telah menerapkan pola asuh ini untuk mendidik anak-anaknya. Hal ini dinilai wajar karena populasi dari penelitian ini adalah anak usia 10-14 tahun (SD) sampai kelas 2 SMP. Dengan demikian, hal ini sangat mungkin bagi orang tua/keluarga untuk menerapkan pola asuh otoriter pada anaknya, terutama pada mereka yang masih berada pada jenjang sekolah dasar.

Berdasarkan kabupaten/kota, para keluarga/orang tua di Kabupaten Gunung Kidul tercatat paling banyak menerapkan pola asuh ini. Sedangkan dari seluruh responden yang diwawancarai di Sleman, 60 persen keluarga mengaku telah menerapkan pola

Pola Asuh Orang Tua pada Anak Usia 10-14 Tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta

asuh ini. Cara yang paling banyak dilakukan adalah mengawasi kehidupan anaknya dengan ketat, mewajibkan anak berperilaku sesuai keinginan orang tua dan para orang tua terkadang memaksakan kehendak anak-anaknya. Secara ekonomi, keluarga yang menerapkan pola asuh ini tidak lebih baik dibanding keluarga yang menerapkan pola asuh demokratis. Meskipun 98 persen orang tua tersebut memiliki motor, tetapi hanya 16 persen yang memiliki mobil.

Pola Asuh Permisif dan Acuh di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kedua pola asuh ini sangat sedikit diterapkan di DIY, yaitu gabungan keduanya hanya sebesar 14 persen. Tipe permisif dan tipe acuh merupakan hal yang bertolak belakang. Di satu sisi, orang tua memanjakan anaknya, tetapi di sisi lain mereka tidak peduli atau acuh dalam mengurus anaknya.

Pola asuh tipe permisif dicirikan dengan orang tua yang memberikan kebebasan anaknya untuk berkehendak, dominasi pada anak serta sifat yang cenderung memanjakan anak. Meskipun pola asuh ini dinilai memiliki banyak hal negatif, tetapi menurut Rahman, Mardhiah dan Azmidar (2015), pola asuh ini tetap memiliki aspek positif. Aspek tersebut dapat dilihat pada kecerdasan emosional remaja. Kecerdasan emosional didefinisikan sebagai kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, berempati terhadap orang lain dan kemampuan untuk mengatur emosi. Hasil penelitian Rahman, Mardhiah dan Azmidar (2015) menjelaskan bahwa meskipun perannya kecil (10 persen), tetapi pola asuh ini masih memberikan pengaruh positif bagi remaja tahap akhir.

Sedangkan pola asuh tipe acuh dianggap paling berisiko dan paling banyak menimbulkan efek negatif bagi anak. Hasil penelitian dari Veronika (2012) menyebutkan bahwa pola asuh tipe acuh akan meningkatkan efek negatif bagi remaja terkait perilaku *cybersex*. Widya (2017) juga menjelaskan bahwa pola asuh tipe acuh akan menyebabkan adanya keretakan hubungan antarsaudara kandung pada usia remaja dalam satu keluarga. Begitu pula dengan penelitian Sandi (2016) yang mengatakan bahwa pola asuh tipe acuh menjadi salah satu penyebab tingginya anak usia 13-21 tahun yang terjerumus pada perilaku *alcoholic* (minum minuman keras). Berdasarkan kabupaten/kota, para orang tua di Kabupaten Bantul tercatat paling banyak menerapkan pola asuh tipe ini. Dari seluruh responden yang diwawancarai di Bantul, 13 persen keluarga mengaku menerapkan pola asuh tipe ini.

Kenakalan Anak dan Pola Asuh Orang Tua

Hubungan pola asuh dan kenakalan anak terjawab dengan uji korelasi yang sesuai karena data berdistribusi normal dan skala data dalam bentuk rasio. Berdasarkan uji tersebut terlihat bahwa tidak ada hubungan antara pola asuh dan kenakalan anak (Tabel 1) di sebagian besar kabupaten/kota di DIY. Meskipun jenis pola asuh yang diterapkan berbeda, kondisi kenakalan anak tetap sama. Hal ini disebabkan oleh kombinasi pola asuh yang diterapkan orang tua, yaitu demokratis, otoriter, dan permisif. Pada usia tertentu, yaitu kurang dari 12 tahun, orang tua akan menerapkan pola asuh otoriter. Namun seiring dengan penambahan umur, pola asuh yang diterapkan pun berbeda dan cenderung bersifat bebas. Artinya, ketika anak sudah mampu membedakan mana

Tabel 1. Hubungan antara Pola Asuh dan Kenakalan Anak

Hubungan antarvariable	Kota Yogyakarta	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung kidul	Total
Pola asuh - kenalan anak	Tidak signifikan	Tidak signifikan	Tidak signifikan	-0,45	Tidak signifikan	Tidak signifikan

Sumber: Data Primer, 2018

yang baik dan benar, orang tua cenderung memberi kebebasan kepada anak, dengan tetap melakukan pengawasan.

Pola asuh dan kenakalan anak memiliki hubungan yang signifikan atau nyata di Kabupaten Kulon Progo. Terdapat arah hubungan negatif, yaitu pola asuh permisif dan acuh akan melahirkan kenakalan anak dibandingkan dengan pola asuh demokratis. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmat (2015) dan Utami dan Raharjo (2019). Rahmat (2015) menyebutkan bahwa pola asuh demokratis akan menekan potensi kenakalan anak. Sedangkan Utami dan Raharjo (2019), melalui penelitiannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), menyatakan bahwa salah satu penyebab kenakalan anak adalah pola asuh orang tua yang permisif dan acuh. Hal ini berarti bahwa untuk menekan kenakalan anak, orang tua harus memenuhi keinginan anak dengan tetap melakukan pengawasan dan perhatian. Kombinasi pola pengasuhan harus dilakukan dengan tipe pengasuhan demokratis yang lebih dominan dibandingkan tipe pola asuh lainnya.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua di daerah kajian mendidik anaknya dengan pola asuh demokratis. Daerah yang banyak menerapkan

pola asuh ini adalah Kabupaten Sleman. Selain pola asuh demokratis, pola asuh otoriter juga diterapkan oleh para orang tua di DIY. Pola asuh otoriter ini masih bisa diterapkan untuk anak usia awal, namun tidak lagi cocok jika diterapkan pada anak yang sudah memasuki usia remaja pertengahan sampai akhir. Berdasarkan persentase, 37 persen responden mengaku mendidik anaknya dengan pola asuh otoriter. Responden yang banyak menerapkan pola asuh ini adalah responden yang berasal dari Kecamatan Saptosari Gunung Kidul. Sedangkan pola asuh permisif dan acuh merupakan pola asuh yang paling sedikit digunakan oleh responden di seluruh daerah kajian karena kedua pola asuh ini memiliki efek negatif yang lebih banyak dari dua pola asuh lainnya. Pola asuh permisif akan menyebabkan anak menjadi manja, sedangkan pola asuh acuh akan menyebabkan anak susah diatur dan bertindak sesuai keinginan mereka. Untuk mencegah kenakalan anak, orang tua harus menerapkan tipe pola asuh kombinasi sesuai tahapan usia anak. Meski demikian, ketika menerapkan pola asuh kombinasi, pola asuh demokratis harus lebih dominan dari pola asuh lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini adalah bagian dari hasil penelitian Hibah Kerjasama BKKBN dengan

Fakultas Geografi UGM yang berjudul “Pola Pengasuhan sebagai Pembentuk Karakter dalam Pencegahan Kenakalan Anak” yang didanai pada tahun 2018. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, seperti Prof. Rizal Damanik, Dr. Sukamdi, M.Sc., dan Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A atas bantuan, bimbingan serta masukan yang diberikan selama penulisan.

Daftar Pustaka

- As'ari, M. H. 2015. Hubungan antara Pola Asuh Otoriter dengan Kemandirian. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Batubara, J.R.L. 2010. Adolescent Development (Perkembangan Remaja). *Sari Pediatri*. Volume 12, No.1, Juni 2010. Hal. 21-29. e-ISSN 2338-5030.
- Baumrind, D. 1971. Current Patterns Of Parental Authority. *Developmental Psychology Monographs*, 4 (1, Pt.2). Hal. 1-103. <http://dx.doi.org/10.1037/h0030372>.
- BPS. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. ISSN: 2086-2369.
- BPS. 2018. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/ Bappenas dan UNFPA. ISBN: 978-602-438-189-9.
- Chao, R. K. 2001. Extending Research on the Consequences of Parenting Style for Chinese Americans and European Americans. *Child Development*. Volume 72(6), 1832-1843.
- Darwin, M. Ekawati, H. dan Khabib, F. 2017. Membangun Relasi Digital antara Orang Tua Siswa dengan Sekolah dalam Penanganan Tawuran Pelajar di Yogyakarta. *Populasi*. Volume 25 Nomor 2 2017. Hal. 1-23. e-ISSN: 2476-941X.
- David, L.E.V., Matulesy, A dan Pratikto, H. 2014. Pola Asuh Demokratis, Kemandirian dan Motivasi Berprestasi pada Mahasiswa. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*. Januari 2014. Vol. 3. No. 01. Hal. 65 – 70.
- El Hafiz, S. dan Almaududi, A.A. 2015. Peran Pola Asuh Otoriter terhadap Kematangan Emosi yang Dimoderatori oleh Kesabaran. *Humanitas*. Vol. 12 No. 2 . Hal. 130-141. ISSN 1693-7236.
- Filisyamala, J., Hariono dan Ramli, M. 2016. Bentuk Pola Asuh Demokratis Dalam Kedisiplinan Siswa SD. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*. Volume: 1 Nomor: 4 Bulan April Tahun 2016 Hal. 668—672. e-ISSN: 2502-471X.
- Giyarsih, S.R. and Alfana, M.A.F. 2013. The Role Of Urban Area As The Determinant Factor Of Population Growth. *Indonesian Journal of Geography*. Vol 45, No.1, June 2013 : 38 - 47. ISSN 0024-9521.
- Hidayati, N.I. 2014. Pola Asuh Otoriter Orang Tua, Kecerdasan Emosi, dan Kemandirian Anak SD. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*. Vol 3, No 01 (2014). Hal. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.30996/persona.v3i01.364>.
- Hurlock, E. 1999. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Husada, A. K. 2013. Hubungan Pola Asuh Demokratis dan Kecerdasan Emosi dengan Perilaku Prososial pada Remaja. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*. Sept. 2013, Vol. 2, No. 3. Hal 266 – 277.
- Mayasari, F. 2015. *Hubungan antara Pola Asuh Demokratis Orang Tua Terhadap Moralitas pada Remaja*. Fakultas Psikologi Universitas Semarang.

- Rahman, U., Mardhiah dan Azmidar. 2015. Hubungan antara Pola Asuh Permisif Orangtua dan Kecerdasan Emosional Siswa dengan Hasil Belajar Matematika Siswa. *Auladuna*, Vol. 2 No. 1 Juni 2015: 116-130.
- Rahmat, H. 2015. Hubungan antara Pola Asuh dengan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) pada Siswa di SMA Negeri 2 Babelan. *Skripsi*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Sandi, M. K. 2016. Dampak Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap Perilaku Minuman Keras Pada Remaja Usia 13-21 Tahun di RT 26 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Patah Palembang.
- Steinberg, L. 2017. *Adolescence 11th Edition In The Fundamental Changes Of Adolescent: Biological Transition*. New York: Mc Graw Hill.
- Sari, R.P. 2008. Hubungan antara Pola Asuh Demokratis dengan Prestasi Belajar Pada Remaja. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Utami, A.C.N. dan Raharjo, S.T. 2019. Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 2. No: 1. Hal. 150 – 167. Juli 2019. ISSN: 2620-3367.
- Veronika. 2012. Hubungan antara Pola Asuh Permisif Orangtua dengan Perilaku Cybersex Remaja Akhir. *Skripsi*. Malang: Jurusan Psikologi, Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang.
- Widya, N. 2017. Hubungan antara Persepsi terhadap Pola Asuh Permisif dengan Sibling Rivalry pada Remaja Akhir. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Wulandari, I. 2010. Hubungan Pola Asuh Demokratis dengan Sikap terhadap Perilaku Seksual Remaja. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Zazimah. 2015. Pengaruh Pola Asuh Otoriter Terhadap Tingkat Agresivitas Anak Usia 4-5 Tahun Di RA Insan Harapan, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Ilham Alhaq Hazani, Ridho Taqwa, dan Rosmiyati Abdullah

Program Studi Magister Kependudukan, Universitas Sriwijaya, Palembang

Korespondensi: Ilham Alhaq Hazani (e-mail: ilham_507@yahoo.co.id)

Abstrak

Selain sebagai ibu rumah tangga, biasanya perempuan memiliki peran sebagai pekerja. Tekanan ekonomi dan pendapatan yang tidak mencukupi merupakan alasan yang membuat perempuan memutuskan bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pekerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga migran di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Sumber data yang digunakan adalah informan yang berjumlah dua belas orang yang dipilih dengan *purposive sampling*. Peneliti menggunakan tahap *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* untuk menguji keabsahan data, sedangkan analisis data menggunakan tahap *reduction*, *display*, dan *conclusion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja perempuan berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga migran, seperti membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menambah penghasilan, menambahkan modal usaha dan investasi, tabungan serta biaya kesehatan dan biaya pendidikan.

Kata kunci: pekerja perempuan; migran; sektor informal; pendapatan

Women Migrant Workers' Roles to the Increase of Families' Income in West Ilir I Subdistrict, Palembang City

Abstract

Aside from being housewives, women usually have a role as workers. Economic pressure and an inadequate income are the reasons why women decide to work. The present study aims to analyze the role of female workers in increasing the income of migrant families in Palembang City. The research method used in the present study was a qualitative method by collecting data through in-depth interviews. The sources of data were twelve informants selected by using a purposive sampling. To test the validity of data, the researchers used credibility, transferability, dependability, and confirmability, while data analysis used stages of reduction, display, and conclusion. The present study reveals that female workers played an important role in increasing the income of migrant families, such as helping to meet the daily living needs, increasing the income, the business capital and investment, savings, as well as medical expenses and education costs.

Keywords: female workers; migrants; informal sector; income

Pendahuluan

Perkembangan yang pesat di Kota Palembang menarik minat para migran untuk melakukan migrasi ke daerah tersebut. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Palembang pada 2014 adalah 1.558.494 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 780.698 jiwa dan perempuan 777.796 jiwa. Pada 2015 jumlah penduduknya menjadi 1.580.517 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 791.943 jiwa dan perempuan 788.574 jiwa. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan penduduk Kota Palembang tahun 2014-2015 adalah 1,41 persen.

BPS Kota Palembang mencatat angkatan kerja tahun 2015 berjumlah 733.121 jiwa, yang terdiri atas laki-laki 448.428 jiwa dan perempuan 284.693 jiwa. Berdasarkan data BPS 2015, dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang ada di Kota Palembang, penyerapan terbesar terletak pada pekerja perempuan, sedangkan tenaga kerja laki-laki memiliki persentase yang lebih kecil. Penyerapan tenaga kerja perempuan yang bekerja adalah 93,70 persen dan angka ini lebih tinggi dibanding jumlah penduduk laki-laki, yaitu sebesar 88,76 persen pada 2014. Sementara itu, pada 2015 penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 91,36 persen dan laki-laki 89,92 persen. Meskipun terjadi penurunan sebanyak 2,34 persen pada penduduk perempuan yang bekerja dari 2014 hingga 2015, penyerapan tenaga kerja perempuan di lapangan lebih besar dibanding penduduk laki-laki.

Secara umum, karakteristik perekonomian di Kota Palembang pada 2015 lebih mengarah kepada sektor jasa. Hal ini dapat dilihat dari lapangan kerja utama penduduk di Kota Palembang tahun 2015 dengan jumlah pekerja terbanyak bekerja di sektor

perdagangan besar, eceran, rumah tangga, dan hotel, yakni 243.771 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, rincian pekerja laki-laki adalah 115.004 jiwa dan pekerja perempuan 128.767 jiwa. Kemudian total lapangan kerja utama yang ada di Kota Palembang adalah 663.315 jiwa. Selanjutnya penduduk yang bekerja di bidang jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan berjumlah 153.834 jiwa dengan rincian pekerja laki-laki sebanyak 78.228 jiwa dan pekerja perempuan 75.606 jiwa. Selanjutnya sektor pekerjaan yang paling sedikit diambil penduduk Kota Palembang tahun 2015 adalah sektor kelistrikan, gas, dan air yang berjumlah 1.630 jiwa dengan rincian 1.045 pekerja laki-laki dan 585 jiwa pekerja perempuan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa Kota Palembang memiliki banyak penduduk perempuan yang berstatus sebagai pekerja. Pada 2015 total pekerja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bekerja di lapangan kerja utama sebanyak 663.315 jiwa dengan pekerja perempuan berjumlah 260.098 jiwa. Lapangan kerja utama penduduk perempuan di Kota Palembang tahun 2015 terbanyak adalah mereka yang bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah tangga, dan hotel, yakni 128.767 jiwa. Selanjutnya adalah mereka yang bekerja di sektor sosial, dan kemasyarakatan yang berjumlah 75.606 jiwa. Sementara itu, pekerja yang paling sedikit adalah perempuan yang bekerja di sektor kelistrikan, gas, dan air, yang hanya berjumlah 585 jiwa.

Bagi perempuan, khususnya perempuan migran, bekerja di sektor perdagangan tidak memerlukan syarat yang sulit, seperti status pendidikan. Selama memiliki keahlian dan keterampilan, mereka dapat memulai usaha di sektor perdagangan. Penduduk perempuan yang bekerja di lapangan kerja utama di

*Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran
di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang*

Kota Palembang ini memberi kontribusi bagi perekonomian keluarga, khususnya bagi perempuan yang berperan sebagai istri. Namun, menurut Prema (2005), perempuan pekerja tidaklah berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga, tetapi pekerja kedua atau pekerja tambahan (*secondary worker*) yang memiliki motivasi berbeda berdasarkan jenjang sosial ekonomi keluarga maupun tingkat pendidikannya. Misalnya perempuan pekerja yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan rendah biasanya memutuskan untuk bekerja karena terpaksa membantu menambah pendapatan suami yang kurang mencukupi atau pendapatan suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, perempuan pekerja yang berasal dari golongan ekonomi atas dan berpendidikan tinggi biasanya bekerja dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap pendidikan yang telah mereka raih, selain juga untuk aktualisasi diri dan membangun karya.

Menurut Goofman (dalam Syah, Arrazi, dan Achmad Hidir, 2012), peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Setiap orang mempunyai sejumlah status dan mereka diharapkan dapat mengisi peran yang sesuai dengan status mereka. Peran yang berkaitan dengan pekerjaan akan menimbulkan perubahan kepribadian, sehingga terdapat pengaruh timbal balik dari manusia terhadap pekerjaan dan sebaliknya. Sementara itu, menurut Soekanto (dalam Syah, Arrazi, dan Achmad Hidir, 2012), peranan diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, maka ia melakukan suatu peran. Soekanto juga menjelaskan pengertian peran atau *role*

yang mencakup beberapa hal, yaitu aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, serta bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

Menurut Syah, Arrazi, dan Achmad Hidir (2012), peran dalam sosiologi sering dianggap sama karena tidak ada pembatasan secara jelas antara peran dan peranan. Pembatasan hanya pada telah dijalankannya atau tidak peran tersebut. Peranan adalah peran yang telah dilaksanakan individu yang bersangkutan sesuai dengan kedudukannya, sehingga untuk mempermudah dalam memahami definisinya dalam penelitian ini, kata "peranan" dianggap sama dengan kata "peran".

Selanjutnya menurut Boeree (2008), peran adalah harapan bersama yang menyangkut fungsi-fungsi di tengah masyarakat. Agar memiliki makna, suatu peran harus memiliki serangkaian fungsi tertentu, yakni manfaat atau tugas di tengah masyarakat. Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Keduanya merupakan hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kemudian menurut Soekanto (dalam Syah, Arrazi, dan Achmad Hidir, 2012), tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran. Bila seseorang melaksanakan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Kedudukan perempuan sebagai makhluk hidup dan sosial memiliki arti bahwa perempuan mempunyai hak dan dapat menentukan kehendaknya. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, maka dalam beberapa hal perempuan dibiarkan bergerak di dalam masyarakat. Perempuan lebih mengerti dirinya dan menyadari perannya. Perempuan menyadari bahwa dirinya mampu dan dapat membantu kehidupan rumah tangganya. Menurut Aswiyati (2016), peran perempuan

dalam keluarga merupakan peranan yang dilaksanakan perempuan karena menduduki suatu posisi di dalam masyarakat. Peran perempuan dalam keluarga dengan melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami, merupakan suatu kegiatan produktif yang secara tidak langsung menambah pendapatan keluarga.

Menurut Sayogyo (dalam Aswiyati, 2016), keikutsertaan perempuan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memajukan daerah adalah perwujudan perannya secara dinamis dilihat dari kedudukan dan status perempuan dalam suatu sistem sosial tempat perempuan tersebut berada. Sementara itu, Ihromi (dalam Aswiyati, 2016) membedakan peran dan kedudukan perempuan menjadi dua bagian. *Pertama*, peran dan kedudukannya dalam keluarga sebagai tenaga kerja domestik yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam mengurus rumah tangga. *Kedua*, peran dan kedudukannya di luar keluarga yang meliputi usaha untuk mencari nafkah demi memperoleh penghasilan keluarga dan jangkauan sosial terhadap berbagai kegiatan di luar rumah tangga. Perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai indikator terkait tugas dan kewajiban para perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Menurut Sawitri (dalam Nur Dewi, 2007), kecenderungan seorang perempuan memutuskan untuk bekerja biasanya didorong oleh pendapatan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Harapan seorang perempuan untuk hidup yang lebih baik ketika telah bersuami juga menjadi alasan yang menguatkan perempuan untuk bekerja. Selain faktor pendapatan suami yang rendah, beberapa faktor lainnya juga menjadi penyebab seorang perempuan

bekerja, seperti umur yang masih produktif, pendidikan yang memadai, status perkawinan, dan daerah tempat tinggal turut menentukan keputusan perempuan yang telah menikah untuk menawarkan jasanya di pasar kerja.

Keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan tidak jarang mengharuskan mereka melakukan migrasi. Pada 2015 penduduk perempuan yang melakukan migrasi ke Kota Palembang berjumlah 5.992 jiwa. Tercatat Kecamatan Ilir Barat I memiliki jumlah migran perempuan yang paling banyak dibandingkan 15 kecamatan lain yang ada di Kota Palembang, yaitu 1.115 jiwa. Perempuan biasanya melakukan migrasi bersama suami, ikut keluarga, atau ajakan teman (Soebyakto dan Armansyah, 2016) dan mereka berharap dapat memperoleh pekerjaan di tempat yang baru. Oleh sebab itu, untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang peran pekerja perempuan, peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran di Kota Palembang".

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah (bukan eksperimen) dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Metode ini digunakan untuk membahas permasalahan tentang peranan pekerja perempuan terhadap pendapatan keluarga migran di Kota Palembang secara mendalam. Perempuan pekerja yang diteliti adalah mereka yang berstatus sebagai istri dalam keluarga migran

yang tinggal di Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, terutama di Kelurahan Bukit Lama. Daerah ini dipilih karena kelurahan yang memiliki jumlah perempuan migran tertinggi di Kota Palembang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah dua belas informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Adapun kriteria informan adalah sebagai berikut. 1) Berstatus sebagai istri dari keluarga migran (migran risen), 2) bekerja sebagai pekerja perempuan dalam keluarga migran, 3) bekerja di sektor informal, 4) berusia 20 – 60 tahun, karena berdasarkan data lapangan, perempuan migran di Kota Palembang rata-rata berada di usia produktif (usia muda) dan mereka telah menetap kurang lebih lima tahun, serta 5) bertempat tinggal di lokasi penelitian sekurang-kurangnya lima tahun.

Secara sosial ekonomi, keluarga migran ini memiliki karakteristik berbeda-beda. Dari dua belas informan, khususnya migran perempuan, semuanya berstatus 'telah menikah' dengan rata-rata latar belakang pendidikan terakhir adalah SMA dan bekerja di bidang perdagangan dan jasa. Keabsahan data penelitian dilakukan menggunakan tahap *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*. Tahap *credibility* meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian atau ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, serta mengadakan *membercheck* dan diskusi. Sementara itu, analisis data menggunakan Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016), yaitu dengan *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

Pembahasan

Peranan Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran di Kota Palembang

Riyadi (2012) menyatakan bahwa perempuan adalah tiang negara. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sangatlah strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Aswiyati (2016), selain memiliki peran dan kontribusi dalam pembangunan, perempuan juga berperan menunjang perekonomian keluarga. Perempuan Indonesia menyadari sepenuhnya cara meningkatkan taraf hidup dan kemajuan sehingga kebutuhan spritual dan material dapat terpenuhi. Perubahan budaya, pandangan yang terbuka, dan dukungan dari kaum laki-laki terhadap perempuan yang bekerja membuat dunia ketenagakerjaan semakin tinggi karena partisipasi dan peran mereka (Armansyah dan Mirna, 2018).

Secara kodrati, perempuan dan laki-laki dilahirkan dengan sejumlah perbedaan. Perempuan memiliki karakteristik, hak, dan kewajiban yang unik sesuai dengan kodratnya yang menjadi kelemahan sekaligus kekuatan. Hal ini karena adanya peran ganda perempuan yang menimbulkan banyaknya masalah ketenagakerjaan dalam membagi waktu. Umur pernikahan, jumlah kelahiran, jumlah balita dalam keluarga, pengalaman kerja sebelum menikah, dan upah yang ditawarkan berkaitan dengan tingkah laku perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam keputusan penawaran kerja yang berlangsung.

Menurut Sajogyo (1994), hal yang tidak disadari masyarakat adalah sebenarnya perempuan telah memberikan kontribusi yang besar dalam urusan rumah tangga,

terutama dalam hal berusaha meningkatkan pendapatan keluarga. Penghasilan suami yang kecil dan tidak menentu menjadi alasan ibu rumah tangga bekerja karena mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka bekerja bukan karena mereka ingin bekerja atau berkarier, tetapi karena dipengaruhi oleh faktor keterpaksaan. Selanjutnya menurut Ari, dkk. (2000), peran perempuan di Indonesia banyak mendapat sorotan dalam sektor publik, terutama sektor industri dan perdagangan. Di satu sisi perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga, namun sisi lain pekerjaan mencari nafkah sering dilakukan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah sebagai tenaga kerja di bidang industri.

Berdasarkan penelitian di lapangan, tepatnya di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, peran perempuan khususnya perempuan migran yang berstatus istri dan suami saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Misalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, biaya listrik, uang jajan anak, dan kesehatan. Hasil penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Holleman (dalam Aswayati, 2016), yang menganggap bahwa kedudukan perempuan (ibu) dalam rumah tangga sebagai belahan yang satu dapat melengkapi tugas suami (sebagai komplemen), bersama-sama mewujudkan suatu keharmonisan, yaitu keluarga. Adapun perbedaan yang ada dalam keluarga hanyalah terkait kodrat khusus. Selanjutnya Holleman (1971, dalam Aswayati, 2016), mengatakan bahwa rata-rata pendapatan perempuan pekerja adalah dua juta rupiah per bulan, yang pada umumnya menunjukkan pendapatan yang dinilai masih rendah dalam keluarga.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, semua anggota rumah

tangga harus bekerja, termasuk istri. Setelah bekerja, perempuan migran yang berperan sebagai istri akan mendapatkan upah dari hasil kerja mereka. Upah yang didapatkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika pendapatan keluarganya masih rendah sebelum para istri bekerja, mereka berharap ada penambahan pendapatan setelah ikut bekerja dan mendapatkan penghasilan. Dengan kata lain, perempuan migran berperan meningkatkan pendapatan keluarga. Berdasarkan temuan di lapangan, peranan pekerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga adalah sebagai berikut.

Memenuhi Kebutuhan Hidup Sehari-hari

Tekanan ekonomi yang semakin tinggi membuat peran perempuan dalam keluarga menjadi sangat penting. Kenaikan harga bahan pokok dan biaya pendidikan membuat setiap pasangan baru harus memiliki strategi yang kokoh supaya dapat melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Saat ini saja harga beras per kilo telah mencapai sepuluh ribu rupiah, belum termasuk kebutuhan yang lain. Selain itu, sebagian biaya pendidikan masih belum gratis meskipun ada sejumlah biaya pendidikan yang telah gratis sepenuhnya, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah. Besarnya biaya yang dikeluarkan dapat mencapai 500 ribu rupiah per bulan. Belum lagi jika ada bayaran SPP di sekolah, khususnya bagi mereka yang bersekolah di sekolah swasta. Saat ini, SPP diketahui berada pada angka minimal, yaitu 200 ribu rupiah per bulan. Selain itu, biaya-biaya yang lainnya juga terus melonjak.

Contoh lainnya adalah harga BBM yang terus naik, misalnya harga pertalite adalah 7.600 rupiah sebelum kenaikan, namun

*Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran
di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang*

saat ini telah mencapai delapan ribu rupiah per liter. Hal ini jelas memengaruhi lonjakan harga pada kebutuhan pokok lainnya, seperti harga beras yang juga naik yang saat ini telah mencapai sepuluh ribu rupiah per kilogram. Belum lagi harga-harga bahan pokok yang lainnya. Keadaan seperti ini membuat masyarakat harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat akan bekerja untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi mereka yang telah memiliki pekerjaan, mereka akan bekerja dengan serius menekuni pekerjaannya agar mendapatkan hasil yang maksimal dan upah yang sesuai. Akan tetapi, bagi yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, mereka akan terus berusaha mendapatkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mereka akan bekerja apa saja asalkan mendapatkan upah dan penghasilan yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi keluarga migran yang hidup dengan pendapatan minim, mereka akan berusaha untuk menjalani kehidupan yang layak dengan kondisi perekonomiannya saat ini ketika kebutuhan hidup sehari-hari semakin mahal.

Berdasarkan hasil penelitian dari dua belas informan, ada sepuluh orang yang bekerja di bidang perdagangan dan dua informan bekerja dibidang jasa sebagai asisten rumah tangga. Dua informan yang bekerja sebagai asisten ibu rumah tangga ini akan bekerja serabutan selain sebagai asisten rumah tangga, misalnya menjual minyak eceran dan makanan. Hal ini dilakukan karena kekurangan modal apabila melakukan usaha lain. Kekurangan modal tersebut terjadi karena pendapatan dari suami mereka masih tergolong rendah.

Menurut Liana (2003), seorang perempuan akan mengalokasikan waktunya untuk bekerja apabila tanggungan dalam keluarga berjumlah besar karena pemenuhan kebutuhan hidupnya yang juga semakin besar. Selain itu, untuk angkatan kerja perempuan yang dalam keluarganya mempunyai pengeluaran melebihi kebutuhan standar (melebihi tingkat upah yang berlaku), mereka sangat berpeluang untuk berpartisipasi di pasar kerja. Oleh sebab itu, peran suami dalam keluarga adalah pencari nafkah utama. Apabila pendapatan yang diperoleh suami sangat kecil, maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan perempuan untuk bekerja mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Berdasarkan hasil penelitian ini, perempuan pekerja menggunakan pendapatannya untuk keperluan pribadinya, misalnya membeli peralatan rias, perhiasan, dan tas. Hal ini jelas akan menyebabkan pengeluaran yang lebih besar.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa salah satu peran pekerja perempuan migran dalam membantu pendapatan keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan informan yang bernama Bu Nu. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan satu juta rupiah per bulan. Selain itu, ia juga menjual bensin di rumahnya dengan pendapatan yang dapat mencapai 100 ribu rupiah sampai 200 ribu rupiah per hari. Sementara itu, suaminya bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan yang tidak menentu. Penghasilan mereka berdua digunakan untuk kebutuhan hidup, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anaknya SMK sebesar 150 ribu rupiah per bulan, dan biaya kesehatan berupa iuran BPJS sebesar 35 ribu rupiah per bulan. Ia menyatakan bahwa perannya dalam

bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut kutipan hasil wawancara dengan informan.

“Pendapatan yang saya peroleh berjumlah satu juta per bulan. Uang itu dapat saya gunakan untuk membeli parabolot rumah tangga, seperti panci, piring dan kebutuhan lainnya, istilahnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari” (wawancara, 06 Oktober 2017).

Informasi yang sama juga diperoleh dari Bu Ha yang menyatakan sebagai berikut:

“Pendapatan kotor yang saya peroleh berjumlah 600 ribu rupiah per hari, kalau bersihnya sekitar 300 ribu rupiah per hari. Uang ini saya gunakan untuk keperluan sehari-hari, jika ada lebihnya dapat ditabung. Harapannya, siapa tahu nanti dapat beli tanah atau membangun rumah sendiri” (wawancara, 02 November 2017).

Hasil wawancara dengan Bu Ha menjelaskan bahwa pendapatannya sebesar 300 ribuan rupiah per hari tersebut ia gunakan untuk modal dagang, menabung, biaya kehidupan sehari-hari, biaya sekolah anak, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, ia menyisihkan uang pendapatan dari usahanya ini sebesar 50 ribu rupiah per hari, sedangkan sisanya digunakan untuk modal dagang dan keperluan lainnya.

Selanjutnya informasi yang sama juga disampaikan oleh Bu Id. Ia menyatakan sebagai berikut:

“Penghasilan bersih saya 400 ribu rupiah per hari, biasanya digunakan untuk tambahan uang belanja sebanyak seratus ribu rupiah, sisanya 300 ribu rupiah untuk

kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak serta tambah-tambahan untuk biaya bayar kontrakan” (wawancara, 08 November 2017).

Sebagaimana diketahui, ia adalah seorang asisten rumah tangga dengan pendapatan sebesar satu juta ribu rupiah per bulan dan telah berstatus menikah. Ia berasal dari Ogan Komering Ilir, berusia 38 tahun, dan merupakan lulusan SMP. Sementara itu, Bu Ha dan Bu Id adalah seorang pedagang. Pendapatan bersih Bu Ha adalah 300 ribu rupiah per hari dan pendapatan Bu Id adalah 400 ribu rupiah per hari. Keduanya telah berstatus menikah. Bu Ha yang berusia 42 tahun berasal dari Jambi, sedangkan Bu Id yang berusia 39 tahun berasal dari Sekayu. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, Bu Ha adalah seorang lulusan SMA, sedangkan Bu Id adalah lulusan SMP. Menurut beberapa informan yang diwawancarai, salah satu peran mereka dalam meningkatkan pendapatan keluarga adalah membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan tiga informan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, modal dagang, biaya pendidikan anak, biaya kontrakan, dan sebagainya.

Penghasilan yang mereka dapatkan dari bekerja di sektor informal digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk meringankan beban suami mereka dalam menafkahi keluarga. Sebagaimana diketahui, penghasilan suami mereka masih rendah dan belum mencukupi kebutuhan keluarga. Penghasilan suami Bu Nu hanya sebesar 500 ribu rupiah per bulan sebagai tukang ojek, sedangkan penghasilannya sendiri sebesar satu juta rupiah per bulan. Kemudian penghasilan Bu Id sebesar 400 ribu rupiah per hari dan penghasilan suaminya sebagai juru parkir adalah satu juta rupiah per bulan.

*Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran
di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang*

Sementara itu, pendapatan Bu Ha adalah 300 ribu rupiah per hari, tetapi penghasilan suaminya tidak menentu karena bekerja sebagai buruh bangunan. Jika sedang ada pekerjaan, suaminya mendapat upah sebesar satu jutaan rupiah. Oleh sebab itu, para istri bekerja untuk membantu suami dan penghasilan yang mereka dapatkan digunakan untuk segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga mereka. Selain berasal dari pendapatan suami, pendapatan dari pekerja perempuan migran dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tambahan Penghasilan

Potensi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian keluarga cukup besar (Aswiyati, 2016), khususnya bagi keluarga migran dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keluarga migran harus bekerja, baik suami sebagai kepala keluarga maupun istri sebagai *secondary worker*, terutama perempuan migran yang berperan sebagai istri. Mereka bekerja karena beberapa alasan, misalnya pendapatan suami yang rendah dan tidak bekerja. Oleh sebab itu, untuk membantu suami memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, perempuan migran ikut bekerja di pasar kerja dengan bekerja di sektor informal sebagai pedagang dan jasa. Susilo (dalam Hakim, 2011) menyatakan sektor jasa lebih fleksibel bagi perempuan karena selain untuk menambah pendapatan keluarga, fungsi sebagai ibu rumah tangga juga masih dapat dilakukan. Disamping itu, alasan latar belakang pendidikan perempuan pekerja yang rata-rata berpendidikan rendah menyebabkan jenis pekerjaan sektor informal merupakan alternatif yang memungkinkan untuk dilakukan (Armansyah dan Kiki, 2018). Tujuan perempuan migran ini bekerja adalah

untuk menambah penghasilan agar dapat membantu suami memenuhi perekonomian keluarga.

Perempuan migran yang bekerja di sektor informal akan mendapatkan upah yang harian maupun bulanan. Untuk upah yang di dapat harian, misalnya, biasanya diperoleh perempuan yang bekerja dengan membuka usaha sendiri sebagai pedagang. Kemudian perempuan yang mendapatkan upah bulanan adalah perempuan migran yang bekerja di bidang jasa sebagai asisten ibu rumah tangga. Berdasarkan penelitian ini, mereka lebih memilih upah atau pendapatan harian karena mudah untuk mengelola dan mengaturnya kembali menjadi modal serta pendapatan tetap ada setiap hari. Sementara itu, jika upah yang diberikan setiap bulan, mereka harus bekerja setiap hari. Oleh sebab itu, dari dua belas informan yang ada, sebagian besar dari mereka bekerja dengan membuka usaha sendiri. Semakin tinggi pendapatan dari perempuan pekerja, maka akan semakin mudah bagi mereka untuk membantu peran suami dalam keluarga.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan tentang peran mereka yang bekerja untuk pendapatan keluarga, khususnya untuk menambah penghasilan. Bu No menjelaskannya sebagai berikut.

“Pendapatan yang diperoleh sebesar 450 ribu rupiah per hari digunakan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup karena penghasilan suami tidak cukup untuk semuanya. Hanya satu juta setengah per bulan. Selain itu untuk menambah penghasilan di rumah” (wawancara, 28 November 2017).

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Bu An yang menyatakan sebagai berikut.

“Pendapatan yang saya peroleh per bulan kurang lebih lima juta rupiah, digunakan untuk menambah pemasukan dalam keluarga, suami saya kerjanya sebagai PNS. Penghasilannya pas-pasan, kita tahu sendiri kalau gaji PNS berapa paling tinggi Golongan IVA kurang lebih tiga setengah juta rupiah. Ditambah lagi kebutuhan sekarang tambah banyak. Misalkan kita berkeinginan mempunyai barang sendiri, seperti perhiasan, bisa juga untuk ditabung dan juga anak-anak sudah mulai kuliah yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi pendapatan saya tadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari” (wawancara, 02 November 2017).

Selanjutnya adalah hasil wawancara yang disampaikan oleh Bu Ha yang juga menyatakan hal yang sama sebagai berikut.

“Ibu bekerja membuka warung makan dengan pendapatan per hari sekitar 300 ribu rupiah sampai 600 ribu rupiah. Pendapatan ini digunakan untuk menambah penghasilan suami saya. Penghasilan suami saya dari bekerja di PT Mayora hanya dua juta rupiah per bulan. Selain itu, juga digunakan untuk uang belanja, menambah uang saku anak sebanyak 20 ribu rupiah per hari dan biaya pendidikan untuk sekolah sebesar 300 ribu rupiah per bulan” (wawancara, 02 November 2017).

Berdasarkan informasi tersebut, peran mereka dalam bekerja adalah untuk menambah penghasilan keluarga mereka demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena pendapatan suami mereka yang masih rendah. Oleh sebab itu, mereka bekerja dan

mendapatkan penghasilan. Perlu diketahui bahwa pendapatan Bu No yang bekerja dengan menjual makanan adalah 450 ribu rupiah per hari. Sementara itu, penghasilan Bu An dari membuka usaha catering adalah lima rupiah juta per bulan. Pendapatan Bu Ha dari membuka warung makanan adalah 300 ribu rupiah sampai 600 ribu rupiah per hari. Pendapatan yang mereka dapatkan ini nantinya digunakan untuk menambah penghasilan keluarga.

Tambahan Modal dan Investasi

Modal adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memulai usaha oleh perempuan migran di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Modal yang digunakan oleh perempuan migran ini adalah untuk membuat usaha sendiri, bergantung pada jenis usaha yang mereka lakukan. Misalkan untuk membuat usaha penjualan makanan pempek, model, atau tekwan, mereka membutuhkan modal sekitar 300 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah per hari. Hal ini akan berbeda apabila mereka membuka usaha warung makan, seperti nasi dan lauk pauknya, maka dibutuhkan modal yang cukup besar dan dapat mencapai satu juta rupiah per hari. Perempuan migran di Kelurahan Bukit Lama bekerja di sektor informal sebagai pedagang atau jasa.

Pekerja perempuan beranggapan bahwa bekerja di sektor informal tidak memerlukan modal yang besar. Asalkan ada niat, modal, dan kemauan, maka usaha yang mereka lakukan akan menghasilkan penghasilan yang mereka harapkan. Nantinya penghasilan yang mereka dapatkan dari modal yang sederhana untuk membuka usaha tersebut akan digunakan lagi untuk modal usahanya. Jika penghasilannya lebih besar dari modal awal,

Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

maka kelebihan pendapatannya disimpan dan ditabung oleh perempuan migran.

Menurut Armansyah (2016), pekerjaan di sektor informal sebagai pedagang ataupun di sektor jasa akan mendapatkan penghasilan yang tidak menentu. Oleh sebab itu, pekerja yang bekerja di sektor informal ini harus benar-benar memilih pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka memiliki. Agar usaha mereka menghasilkan pendapatan yang mereka inginkan karena usaha dan cara yang mereka lakukan sangat menentukan keberhasilannya. Pada sektor perdagangan, pekerja akan dihadapkan pada cara menarik pembeli dan cara untuk menjual barang sampai habis. Misalkan mereka yang membuka usaha penjualan makanan, baik untuk sarapan, makan siang, makan malam atau hanya kudapan, mereka harus berusaha membuat makanan yang enak, bervariasi, dan berbeda agar dagangan tersebut terjual seluruhnya. Selain itu, tampilan dagangan dan tempat mereka berdagang juga menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran usahanya. Mereka dapat membuat angkringan dengan gerobak sederhana dan memberikan harga makanan yang bersahabat dengan pembeli. Mereka juga dapat menjual jenis barang dagangan yang bervariasi atau mencari lokasi yang lebih ramai. Sementara itu, untuk sektor jasa, biasanya penghasilan mereka bergantung pada kemampuan yang mereka miliki dalam bidang jasa, seperti teliti, komunikasi yang baik dan sebagainya.

Semakin banyak jasa yang mampu mereka jual, maka akan semakin banyak penghasilan yang mereka dapatkan. Mereka dapat bekerja sebagai asisten ibu rumah tangga, tukang jahit, atau tukang cukur rambut. Selama mereka rajin bekerja dan terampil, maka mereka akan mudah mendapatkan penghasilan. Selain itu, kepercayaan dari pelanggan adalah hal paling

utama. Jika mereka melakukan pekerjaannya dengan baik dan memuaskan pelanggan, maka secara otomatis biasanya mereka akan tetap dipekerjakan dan akan semakin banyak yang ingin memakai jasa mereka. Kedua belas informan dalam penelitian ini bekerja di sektor informal. Sepuluh informan di antaranya bekerja di sektor perdagangan, seperti membuka usaha katering, membuka warung makan, menjual makanan untuk sarapan, dan berdagang sayur. Sementara itu, dua informan lainnya bekerja dibidang jasa, yaitu sebagai asisten ibu rumah tangga.

Pekerja perempuan migran di Kelurahan Bukit Lama mendapatkan penghasilan dari bekerja di sektor informal. Penghasilan yang didapat ini mereka gunakan untuk keperluan mereka, khususnya untuk modal dan investasi. Informasi ini disampaikan oleh Bu Su sebagai berikut.

“Penghasilan yang saya peroleh sebesar 250 ribu rupiah per hari nantinya digunakan sebagai modal untuk berdagang besok hari dimana modal sebelumnya adalah 150 ribu rupiah per hari” (wawancara, 23 Oktober 2017).

Kemudian pendapat yang sama juga disampaikan oleh dua informan berikut ini.

“Pendapatan yang saya peroleh sebanyak 300 ribu rupiah sampai 600 ribu rupiah per hari. Uang tersebut saya gunakan untuk modal dagang sebesar 200 ribu rupiah, dan sisanya di tabung dan untuk kebutuhan hidup yang lain” (wawancara, Ibu Ha, 02 November 2017).

“Penghasilan yang didapat dari berdagang sebanyak 250 ribu rupiah per hari, nantinya digunakan sebagai modal untuk berdagang

sebanyak 100 ribu rupiah, dimana modal awalnya sebesar 150 ribu rupiah. Selain itu, penghasilan ini terus ditabung sebanyak 50 ribu rupiah dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya dari hasil tabungan digunakan juga untuk membeli tanah kaplingan sebagai tabungan, jika nanti anak saya ingin kuliah, tanah itu bisa dijual sebagai modal” (wawancara, Bu Li, 27 Oktober 2018).

Selanjutnya Ibu An juga menyampaikan informasi yang sama sebagai berikut.

“Dari hasil Ibu bekerja membuka katering, pendapatan yang Ibu hasilkan sebesar lima jutaan per bulan dari modal awal sebanyak 750 ribu rupiah sampai 1,5 juta rupiah. Uangnya bisa digunakan membayar kredit motor sebesar satu juta rupiah per bulan, selanjutnya bisa untuk ambil rumah KPR dengan angsuran 1,2 juta rupiah per bulan, bayarnya dari penghasilan tadi. Sisanya digunakan untuk keperluan hidup yang lainnya” (wawancara, 02 November 2017).

Sementara itu, Bu Su bekerja sebagai penjual sayur di rumahnya dan terkadang berkeliling jika ada pesanan. Ia berjualan hampir delapan tahun sejak 2010. Sementara itu, Bu Li bekerja sebagai pedagang tekwan di rumahnya dan model selama lebih kurang lima belas tahun. Selanjutnya Bu Ha bekerja dengan membuka usaha warung makan di dekat Pasar Padang Selasa selama lima bulan terakhir. Bu An bekerja dengan membuka usaha katering di rumahnya untuk mahasiswa dan pesta perkawinan. Usaha tersebut ia lakukan selama hampir lima tahun lebih.

Pendapatan yang didapat dari bekerja di sektor informal sebagai pedagang digunakan oleh para perempuan migran sebagai modal untuk usaha mereka. Selain itu, ada juga hasil dari pendapatan tadi yang digunakan oleh keluarga migran, khususnya perempuan migran yang bekerja, untuk keperluan pribadinya, seperti untuk membeli peralatan rias, perhiasan, dan tas. Selain itu pendapatan tersebut juga digunakan untuk membeli tanah, membeli rumah KPR, dan membeli kendaraan pribadi. Tujuannya adalah untuk berinvestasi demi keperluan yang mendesak di masa depan misalnya tanah atau rumah yang dapat dijual atau disewakan untuk modal dan keperluan mendesak.

Tabungan

Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap pekerja perempuan di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, peneliti menemukan jawaban dari informan bahwa salah satu peran pekerja perempuan bagi pendapatan keluarga migran adalah untuk tabungan. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan informan, rata-rata mereka bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah. Berdasarkan pendapatan yang tidak terlalu tinggi tersebut, mereka bisa menyisihkan sebagian untuk menabung.

Untuk lebih memahami peran pekerja perempuan terhadap pendapatan keluarga migran di Kecamatan Ilir Barat I, yakni untuk tabungan masa depan, dapat dilihat pada kutipan wawancara dengan beberapa informan berikut ini. Pernyataan pertama adalah hasil wawancara peneliti dengan Bu An yang menyatakan bahwa ia bekerja agar dapat menabung.

Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

"Dari hasil bekerja, saya memperoleh pendapatan sebesar 5 juta rupiah per bulan, dan uangnya dapat ditabung sebanyak 250 ribu rupiah per hari. Uang tabungan ini dikumpulkan dulu. Setelah satu bulan baru ditabung ke bank. Anak-anak juga bisa menabung. *Contohnya* anak ibu yang TK menabungnya di sekolah sebesar sepuluh ribu rupiah sehari" (wawancara, 02 November 2018).

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Bu Fa yang menyatakan bahwa ia juga menyisihkan sedikit pendapatannya untuk ditabung. Setiap hari ia menabung sebanyak 50 ribu rupiah yang digunakan untuk membayar utang. Selain itu, pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Bu Ha sebagai berikut.

"Dari hasil berdagang, saya memperoleh sebesar 300 ribu rupiah sampai 600 ribu rupiah per hari bisa untuk tabungan walaupun sedikit nabungnya per hari 50 ribu rupiah. Walaupun sedikit-sedikit nantinya bisa jadi bukit" (wawancara, 02 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah satu peran pekerja perempuan adalah mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk menabung. Dengan bekerja, pekerja perempuan ini mendapatkan penghasilan yang dapat mereka gunakan sebagai tabungan untuk keperluan di masa yang akan datang.

Biaya Kesehatan

Bagi keluarga perempuan migran, kesehatan adalah hal yang penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Oleh sebab

itu, untuk pemeliharaan kesehatan, keluarga migran membutuhkan biaya perawatan apabila ada anggota keluarga yang sakit dengan pembiayaan yang berasal dari penghasilan suami. Akan tetapi, pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa pembiayaan kesehatan ini bukan hanya didapat dari penghasilan suami, tetapi juga dari penghasilan istri yang bekerja di sektor informal. Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa salah satu peran pekerja perempuan bagi keluarga migran adalah untuk pembiayaan dan perawatan kesehatan.

Berikut ini adalah informasi dari perempuan migran yang bekerja pada sektor informal di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Salah satu peran mereka bekerja bagi keluarga migran adalah sebagai sumber daya untuk biaya dan perawatan kesehatan. Berikut ini adalah jawaban dari Bu Id saat diwawancarai.

"Penghasilan yang Ibu dapatkan digunakan untuk biaya kesehatan karena keluarga kami tidak ikut BPJS. Jadi kalau ada yang sakit, bayarnya ambil dari hasil berdagang. Biasanya jika sakit demam, berobat ke puskesmas biayanya empat ribu untuk pendaftaran dan obatnya gratis, tapi kalau sakitnya sudah parah sering juga ke dokter. Biayanya lebih mahal. Biasa 100 ribu rupiah sampai 200 ribu rupiah sekali berobat" (wawancara, 17 Oktober 2017).

Informasi yang sama juga disampaikan oleh Bu Li. Ia menyatakan peranannya bagi keluarga adalah untuk membayar biaya kesehatan.

"Biaya untuk kesehatan dari hasil jualan, soalnya keluarga kami tidak mendapat

tunjangan dan bantuan dari pemerintah, kemarin sudah mengurus kartu tersebut, tapi belum selesai sampai sekarang. Untuk biaya kesehatannya, jadi menggunakan pendapatan atau penghasilan dari hasil berdagang. Itupun kalau ada yang sakit, seperti demam, pilek berobatnya di puskesmas dengan biaya sendiri sebesar empat sampai sepuluh ribu rupiah untuk pendaftaran. Kalau tembus obatnya bisa mencapai 50 ribu rupiah, tapi keluarga kami ini jarang yang sakit” (wawancara, 27 Oktober 2017).

Selanjutnya adalah informasi dari Bu Su yang menyatakan perannya dalam membayar biaya kesehatan.

”Alhamdulillah, untuk *sakitnyo* hanya sekedar pening – pening saja, tapi tidak tahu kedepannya bagaimana. Jadi kalau ada yang sakit berobatnya hanya sebatas berobat ke puskesmas dan ke bidan-bidan saja dan itu menggunakan biaya sendiri sebesar lima ribu sampai dua puluh lima ribu. Kemarin ngurus kartu KIS/BPJS, tapi tidak terbayar, sudah hampir setahun tidak dibayar, jadi sekarang tidak ada lagi untuk bayarnya. Dulunya iurannya lima puluh ribu per bulan, sedangkan untuk makan saja masih susah. Jadi kalau ada yang sakit dan mau berobat ke puskesmas dan bidan terdekat saja” (wawancara, 23 Oktober 2017).

Berdasarkan pernyataan tersebut, Bu Id memiliki pendapatan dari berdagang sebesar 300 ribu rupiah per hari, sedangkan Bu Li memiliki pendapatan sebesar 200 ribu rupiah per hari dan Bu Su 150 ribu rupiah per hari. Mereka adalah pedagang makanan di Kelurahan Bukit Lama dan, telah berstatus

menikah. Bu Id berasal dari Sekayu, Bu Li dari Jawa, dan Bu Su dari Sekayu. Pendidikan terakhir mereka adalah SMP dan SMA. Menurut mereka, kesehatan sangat penting agar segala kegiatan mereka sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja dapat berjalan lancar. Peran mereka dalam keluarga untuk biaya kesehatan sangat penting. Dari hasil pendapatan mereka, rata-rata 300 ribu rupiah per bulan dapat digunakan untuk biaya kesehatan. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, uang dari penghasilan bekerja selain dari pendapatan suami tersebut dapat digunakan sebagai biaya pengobatan.

Biaya Pendidikan

Menurut Mudyahrdo dalam Armansyah (2014), pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang memengaruhi pertumbuhan individu. Pendidikan memberikan peran penting bagi kehidupan manusia. Seperti yang disampaikan oleh Mudyahardjo (2012:13), pendidikan berlangsung dalam segala lingkungan hidup, baik yang khusus diciptakan untuk kepentingan pendidikan maupun yang ada dengan sendirinya. Pada hakikatnya setiap orang perlu pendidikan untuk membantu mempermudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan informasi bahwa pekerja perempuan yang bekerja di sektor informal rata-rata berpendidikan SMA, SMP, dan SD. Karena pendidikan mereka hanya sebatas SMA, maka pekerja perempuan ini hanya dapat bekerja di sektor informal. Selain hanya lulusan SMA, pekerja perempuan ini juga kurang memiliki keterampilan dan

*Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran
di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang*

kemampuan. Oleh sebab itu, mereka bekerja di sektor informal sebagai pedagang dan pembantu rumah tangga. Pekerja perempuan migran memiliki keinginan bahwa pendidikan anak-anaknya harus lebih tinggi darinya. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita tersebut, mereka akan bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Kemudian pendapatan tersebut akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak mereka dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Informasi di atas didukung oleh pernyataan beberapa informan bahwa peran pekerja perempuan dalam pendapatan keluarga migran adalah untuk membantu biaya pendidikan, khususnya pendidikan anak-anaknya. Bu Nu memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Hasil bekerja uangnya digunakan untuk biaya pendidikan anak, anak saya ada tiga. Yang paling tua kelas 3 SMK, yang kedua kelas 6 SD, dan yang terakhir kelas 1 SD. Biaya pendidikan ini lebih digunakan untuk anak saya yang pertama karena di SMK biaya tidak gratis masih bayar SPP setiap bulan besaran bayarannya adalah 150 ribu rupiah per bulan. Hal ini dikarenakan pihak sekolah ingin membayar intensif guru honor untuk digaji. Karena bantuan dari pemerintah untuk membayar gaji guru honor belum cair. Oleh karena itulah, anak saya yang pertama sekolahnya bayar, sedangkan untuk anak saya yang masih SD untuk bayaran sekolahnya masih gratis karena masih mendapat bantuan dari pemerintah, tetapkan, mereka sekolah juga butuh uang jajan dan uang untuk perlengkapan sekolah. Jadi istilahnya masih bayar tidak gratis.” (wawancara, 08 November 2018).

Berikut ini adalah dua informasi yang hampir berkaitan dengan peran mereka untuk membayar biaya pendidikan. Informasi berikut diperoleh dari Bu Ha dan Bu Li.

“Dari pendapatan Ibu sebanyak empat ratus ribu sehari, digunakan untuk tambahan biaya sekolah sebanyak lima puluh ribu per hari dan kuliah anak sebesar tiga ratus ribu per bulan” (wawancara, Bu Ha, 02 November 2017).

“Dari penghasilan Ibu bekerja pendapatannya dua ratus ribu per hari, perannya untuk keluarga adalah untuk biaya pendidikan anak karena biaya pendidikan ini terus mahal, besaranannya 150 ribu per bulan dan sisanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari” (wawancara, Bu Li, 27 Oktober 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa mereka bekerja di sektor informal sebagai pedagang dan perannya dalam keluarga adalah untuk biaya pendidikan. Pendapatan yang mereka dapatkan dari bekerja digunakan untuk membiayai pendidikan anak mereka, baik yang masih SMP, SMA maupun kuliah di perguruan tinggi.

Kesimpulan

Pekerja perempuan berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarga migran, seperti membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menambah penghasilan, menambah modal usaha dan investasi, tabungan, biaya kesehatan, serta biaya pendidikan. Pekerja perempuan migran yang bekerja di sektor informal memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan keluarga migran. Pendapatan

mereka dari bekerja digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk keperluan sehari-hari. Penghasilan tersebut akan digabung dengan pendapatan suami mereka. Perempuan migran yang bekerja di sektor perdagangan berharap dari modal yang sedikit tersebut, mereka dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Keuntungan dari pendapatan tersebut dapat digunakan untuk keperluan pribadi, seperti membeli peralatan rias, perhiasan, dan tas. Selain itu, pendapatannya digunakan untuk membeli tanah, rumah, kendaraan, dan lain-lain sebagai investasi masa depan. Peran lainnya adalah untuk menanggung biaya kesehatan. Keluarga migran bisa mendapatkan BPJS dan membayar angsuran. Pada bidang pendidikan, pendapatan perempuan migran dapat digunakan untuk membiaya pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi.

Saran

Besarnya peran pekerja perempuan dalam membantu meningkatkan pendapatan keluarga seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Palembang untuk dapat memberikan informasi tentang pelatihan-pelatihan keterampilan, seperti cara membuat makanan, anyaman, dan pakaian, yang diadakan oleh lembaga resmi dan lembaga swasta kepada masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pemerintah maupun pihak swasta sebaiknya dapat memberikan pelatihan keterampilan, seperti membuat berbagai jenis kue, makanan, anyaman, dan pakaian bagi pekerja perempuan migran berdasarkan minat konsumen. Pemerintah atau pihak swasta juga

perlu membentuk kelompok-kelompok usaha kecil masyarakat yang terdiri atas pekerja perempuan migran untuk pengumpulan dana simpan-pinjam yang akan digunakan sebagai modal membuat usaha.

Daftar Pustaka

- Alatas, Secha. 1990. Peranan Perempuan dalam Pembangunan: Dengan Tinjauan Khusus Peranan Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi.
- Armansyah. 2014. "Penyebab Perempuan Migran Bekerja Pada Sektor Informal di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang". *Tesis Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang*. (tidak dipublikasikan).
- Armansyah, A., & Kiki, A. 2018. "Analisis Karakteristik Demografi Pekerja Perempuan Sektor Informal pada Era Masyarakat Ekonomi Asean di Kota Palembang". *Populasi*, 25(1), 52-63. /*doi:http://dx.doi.org/10.22146/jp.32415*/ doi:https://doi.org/10.22146/jp.32415.
- Armansyah, A., & Taufik, M. 2018. "Representasi Perempuan Pekerja Migran menurut Laki-laki di Kota Palembang". *Populasi*, 26(1), 26-38. /*doi:http://dx.doi.org/10.22146/jp.38687*/ doi:https://doi.org/10.22146/jp.38687
- Aswiyati, Indah. 2016. "Peran Perempuan dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalamat". *Jurnal Holistik, Tahun IX No.17/Januari-Juni 2016*. Manado.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS Pusat.
- . 2012. *Statistik Daerah Kota Palembang 2011*. Palembang

*Peran Pekerja Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Migran
di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang*

- , 2012. *Indikator Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang tahun 2011 Kerjasama BPS Kota Palembang dengan Bappeda Kota Palembang*. Palembang
- Boeree, George. 2008. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Prismsophie.
- Hakim, Lukmanul. 2011. "Perkembangan tenaga kerja perempuan di sektor informal: Hasil analisa dan proxy data sensus penduduk". *Among makarti*, Vol.4 No.7, Juli.
- Liana, Wendy. 2003. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Pasar Kerja di Sumatera Selatan". *Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang*. (tidak dipublikasikan).
- Mudyahardjo, Redja. 2012. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prema, Mulyawan Putra. 2005. "Analisis Partisipasi Perempuan dalam Pasar Kerja; Studi Kasus Perempuan dengan Status Menikah di Sumsel". *Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang* (tidak dipublikasikan).
- Nur, Dewi Mesra. 2007. "Analisis Pendapatan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendekatan Hedonic (Studi Kasus Pekerja Perempuan) di Provinsi Sumatera Selatan". *Tesis Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang* (tidak dipublikasikan).
- Rahayu Dwi, Kusmaryati. 2008. "Peran Perempuan Pekerja di Sektor Informal Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Optimal*. Volume 5. Nomor 3. Juni. Hlm. 225-236.
- Riyadi. 2012. "Paradigma perlindungan terhadap perempuan pekerja Di dunia kerja dan kesehatan reproduksi dalam Perspektif islam, kebijakan negara dan realitas".
http://www.academia.edu/10358385/PARADIGMA_PERLINDUNGAN_TERHADAP_PEREMPUAN_PKERJA. Diakses, 04 Oktober 2018, Pukul 22:17 WIB.
- Sajogyo, Pudjiwati. 1994. *Peranan Perempuan dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soebyakto, Bambang Bemby & Armansyah. 2016. "Migran Women Working at Informal Sectors: Empirical Study in Kuto Batu Village, Ilir Timur II Palembang City". *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 6, No. 4; April.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- , 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarijati Ari, Dkk. 2000. *Perempuan yang Menuntun: Sebuah Perjalanan Inspirasi dan Kreasi*. Bandung: Ashoka Indonesia.
- Syah, Arrazi dan Hidir, Achmad. 2012. "Peranan Ibu Bekerja dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga (Studi pada Industri di Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru)".
<http://repository.insri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/673/jurnal.pdf?sequence=1>. Diakses, 05 Agustus 2018, Pukul 21.05 WIB.

Maternal Healthcare Services and the Health Workers among the Migrant Slum Dwellers of Bangalore City, Karnataka, India

Suchismita Mishra^{1,2} and T. Rajendra Prasad¹

¹Department of Economics, Bangalore University, Bengaluru, India, ²Department of Biostatistics, National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bengaluru, India

Correspondence: Suchismita Mishra (email: suchismita44@gmail.com)

Abstract

The health workers play a variety of roles which include provision of outreach, information, referral, advocacy and other support to promote health and help people meet their healthcare. The poor migrants usually settle in unauthorized slums or settlements. The migrant health is found in a disadvantageous position due to poor access to healthcare services. The present paper examines the maternal healthcare services provided by the peripheral health workers among the interstate migrants living in slums of Bangalore city. After conducting a pilot survey, five slums (migrant camps/non-notified slums) were identified based on the criteria of 1) interstate migration 2) year of migration <7 years 3) having more than 100 households. Mothers with a child below 2 years (n=100) were interviewed with a pretested questionnaire. Qualitative data were collected from the mothers, key informants and healthcare workers through in-depth interviews. The maternal healthcare services by the health workers are not able to reach the migrant population due to migrants' location of staying and many women went back to their native place for child delivery. The migrants who moved for delivery to their native place (32.4%) accessed the services of the health workers better than the respondents who stayed in the Bangalore city (13.5%). Similar situation was found for the visit of the health workers for post-natal care. Some institutional lacuna like lack of space, toilets, water and also the shortage of staff etc. were pointed out by the health workers, which are required. The study warrants the need to understand the realities and healthcare needs of the migrant population. A better mechanism should be developed to improve the services of peripheral health workers in delivering primary healthcare services like maternal health care.

Keywords: internal migration; maternal healthcare; health workers; primary healthcare

Introduction

India's primary healthcare infrastructure includes a large cadre of healthcare providers, including various categories of frontline health workers (Kapil & Choudhury, 2005). The health

workers play a crucial role in delivering the primary healthcare services as they are the bridge between the health care providers and the community through developing a social support system. In India, health workers, viz, auxiliary nurse midwives, multipurpose

health workers, health assistants, health visitors, and accredited social health activists (ASHA) etc. are the health workers working under the umbrella of the primary healthcare system. The health workers play a variety of roles which includes provision of outreach, information, referral to community resources, advocacy and other client support to promote health and help people meet their health needs.

The population in urban India is about 38 crores (Census of India, 2011). The level of urbanization is increased from 27.8% to 31.6% (2011 census). This clearly shows the burden on urban India which is expanding day by day and one of the major reasons is rural to urban migration. In contrast, the urban healthcare services and infrastructure is not found at a satisfactory level. Even the Eleventh Plan document acknowledges that there has been an increase in the number of urban poor, and that the civic authorities will have a daunting task in responding to their health and infrastructural needs (Planning commission, 2012). UNICEF (2015) also highlights the need of improvement of facilities for marginalized population living in the cities.

Migration is an unavoidable phenomenon particularly found in developing countries like India, as it is one of the important livelihood strategies of the poor. The migrants try to settle themselves in unauthorized or migratory camps due to their low economic condition. Maternal health in slums where migrants live are found in a disadvantageous position compare to the other non-slum urban areas as well as rural areas (Babu et. al. 2010; Kusuma et. al., 2010; Singh et. al., 2012; Swain & Mishra, 2006). The poor access to maternal health is due to several factors, including inadequate health staffing and the

exclusion of migrant pockets from primary healthcare services. This situation, along with the vulnerability and the livelihood insecurity of the migrant population, lead to poor access to healthcare and inequities exist in access, despite the high concentration of healthcare institutions in urban areas (Kusuma et. al., 2013). Few studies have opined that the health workers play a major role in increasing the utilization of maternal healthcare services in rural India mostly because of their door to door visit (Arends-Kuenning, 1997; Navaneetham & Davara lingam, 2002). In this context, the people who have migrated to the urban area and settled in migrant camps or unorganized slums areas are usually less reachable by the health workers working in that particular region. This statement is supported by a study conducted by Kusuma, et. al., where it is stated that the migrant population living in the non-notified slums are still not accessible to the health services (Kusuma et. al., 2010).

Greater availability of health workers has been shown to be associated both with increased service utilization as well as health outcomes such as immunization coverage and child and maternal survival (Anand & Barnighausen, 2004). In this regard, it is very important to understand the accessibility of health workers to this migrant population living in urban areas. This paper reports maternal healthcare services provided by peripheral health workers to the internal migrants living in slums of Bangalore, a South Indian City.

Methodology

Notified and non-notified slums were identified from the offices of municipalities and local bodies or development authorities. Households of eligible migrants were identified from various clusters in the city.

Attempts were made to identify clusters, particularly from newer slums, de-notified slums and camps, where newcomers usually reside. Snow-balling technique was also used during the pilot survey for identifying this type of habitations. A mapping work/ interview with the influential person(s) of the slum area was carried out for collecting information on the number of household and age of the slum in each location (cluster) to meet the criteria of selection of study area. The field work was carried out during 2016-2017 as part of the post-doctoral research. The present study is a community-based study, undertaken in South Bangalore city of Karnataka. A pilot study was carried out across various slums/migrant settlements and identified five slums/migrant camps based on the criteria; i) interstate migration ii) migrated to the city within seven years. Only the slum locations which had more than 100 households considered as a cluster for inclusion in the study. Women who have conceived and delivered recently were included in this study.

After consulting with a statistician from National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore, India and by considering the p -value = 0.4 and d = 0.1, the sample size is 92.2. After adjusting with non-response rate, finally, the sample size is 100.

The strength of the study is using mixed methods approach, with an advantage of using more qualitative data in understanding some of the hidden facts involved. The quantitative data were collected with the help of self-administered questionnaire which consists of questions to find out the level of utilization of healthcare services for delivery and antenatal care (ANC). The qualitative data were also collected by using a check-list on various issues, such as migration history, knowledge about the available health services,

and details pertaining to the antenatal and postnatal care sought (including the number of visits and in which month they visited, health workers visited or not). Quantitative data were collected by interviewing 100 mothers with the criteria of having < 2 years old child. Qualitative data were collected through in-depth interviews with key informants, mothers of different categories and healthcare providers. All these in-depth interviews were conducted by following the guidelines of Peltó and Peltó (1978) and Lengeler et. al. (1991).

Data obtained in quantitative survey were entered into the computer through MS Excel, and the analyses were done using SPSS for Windows V.22.0. For analyzing qualitative data, qualitative data analysis software, ATLAS/ti for windows V.4.1 was used. All in-depth interviews were held in the respondents' local language i.e. Telugu, Tamil and Hindi. They had been transcribed and translated into English.

Result and Discussion

The distribution of the respondents with regard to the availability of maternal healthcare services near to their slums, a majority of the respondents (64%) said only private healthcare that is available. Followed by this, some respondents (12%) said both government and private hospitals. A few respondents gave some mixed responses which includes government, private, Anganbadi (mother and childcare centers) and NGOs (Table 1).

The above data clearly shows that the availability of private healthcare services is better than the government healthcare centers and Anganbadi centers. However, as people are poor, it is very difficult for them to afford the private healthcare services. The

Table 1. Distribution of Women by Availability of Healthcare Facility

Availability of Type of Healthcare Center	
Private	64 (64%)
Government & Private	12 (12%)
Private & Anganbadi Center	15 (15%)
Government, Private & Anganbadi Center	7 (7%)
Government, Private, nongovernmental & Anganbadi Center	2 (2%)
Total	100 (100%)

migrant population are new to the area, so they are less aware about the exact location of the government health centers. In order to reduce the equity gap in maternal health services, marginalized women need more access to health services. Although, private health facilities are proliferating rapidly in urban areas, which are actually unaffordable for the slum poor people, in contrary public facilities are growing very slowly. Thus, it

results in limited access to quality care for the poor (Adams, 2013). Therefore, maternal healthcare issues are not being tackled for a significant proportion of the urban population. Hence, there is an urgent demand to focus on the urban health, with the given pace of urbanization, the increasing number of urban slums with little access to healthcare facilities to cater to the essential living needs of urban population (Rao, 2000).

Table 2. Distribution of Women by the Visits of Health Workers during Pregnancy

Health Workers Visited	Stayed during Last Pregnancy			
	City	Native Place	Both Places	Total
During delivery time				
Yes, the health worker visited	5 (13.5%)	12 (32.4%)	20 (54.1%)	37 (100.0%)
Visited within 1-3 months of pregnancy	1 (9.1%)	6 (54.6%)	4 (36.3%)	11 (29.7%)
Visited within 4-6 months of pregnancy	4 (21.0%)	5 (26.3%)	10 (52.6%)	19 (51.3%)
Visited within 7 to 9 months of pregnancy	0 (0.00%)	1 (14.2%)	06 (85.7%)	07 (19.00%)
1-3 times visited	3 (13.0)	4 (17.3%)	16 (69.5%)	23 (62.2%)
4-6 times visited	2 (18.2%)	6 (54.6%)	3 (27.2%)	11 (29.73%)
Visited more than 6 times	0 (0.00%)	2 (66.7%)	1 (33.3%)	3 (08.11%)

Table 3. Distribution of Women by Visits of the Health Workers after Delivery

Health Worker Visited	Years of Migration		Total
	Less than 3 years	4 to 7 years	
Visited	26 (43.3%)	9 (22.5%)	35 (35%)
Not visited	34 (56.7%)	31 (77.5%)	65 (65%)

Table 2 presents whether the health workers visited them during pregnancy or not and the place they were staying during that time. Out of 100 respondents, only a considerable number of respondents (37%) said that the health workers visited them and among them, a majority of the respondents (54.1%) stayed in both the places (their native place and the current habitational area) during that time. Followed by this, some respondents (21.4%) stayed in their native place. Only a considerable number of respondents (13.5%) said they stayed in the city only. Among the 37 respondents who said the health worker visited them during their pregnancy period, a majority of the respondents (51.3%) revealed

that they visited them during their 4-6 months of pregnancy and followed by this some respondents who said (29.7%) they visited them during their 1-3 months of pregnancy. Some respondents (19.0%) also stated that they visited during their 7-9 months of pregnancy.

It is clearly visible from Table 3 that only some of the respondents (35%) said that the health workers visited them after the delivery for the post-natal care. Interestingly, the more cases are found among the recent migrants (less than 3 years of migration) proving that the recent migrants like to move to their native place more, compared to the earlier migrants (more than four years to - seven years of

Table 4. Distribution of Women by the Details of Visits of Health Worker after Delivery

Health Workers' Visit	Stay during Delivery		
	Native (n=67%)	City (n=33%)	Total (100)
Pregnancy Happened			
Health workers visited	33 (49.2%)	2 (6.0%)	35
Visited within 7 days of delivery	14 (20.9%)	0 (0%)	14 (14%)
Visited after 7-15 days of delivery	15 (22.4%)	0 (0%)	15 (15%)
Visited after 15-30 days of delivery	03 (4.4%)	02 (6.0%)	05 (5%)
Visited more than 30 days of delivery	01 (1.5%)	0 (0%)	01 (1%)
Visited once	00 (0%)	01 (3.0%)	01 (1%)
Visited two to four times	30 (44.8%)	01 (3.0%)	31 (31%)
Visited five to six times	03 (4.4%)	00 (0%)	03 (3%)

migration) for delivery. The distribution of the respondents in terms of whether the health worker visited after delivery or not is presented in Table 4. Out of 67 respondents who stayed in their native place, a majority of the respondents (49.2%) were visited by health workers. Out of 33 respondents, only a few respondents (6.0%) who stayed in the city during their delivery said that the health workers visited them after their delivery. Out of 100 respondents, only some of the respondents (15%) agreed that the health workers visited them within 7-15 days of their delivery. A considerable number of respondents (31%) revealed that the health workers visited two to four times during their postnatal period. Most maternal deaths can be prevented if women have access to basic medical care during pregnancy, childbirth and postpartum period (WHO, 1994). In India, these services are provided through a network of healthcare centers in outpatient clinics, as well as through home visits by health workers (Government of India, 1992). However, utilization of these services by the target population continues to be poor (Kumar, 1995). This could happen due to the lack of awareness, availability or accessibility to these services.

However, it is evident from Table 2, 3 and 4 that the respondents who migrated to their native place during delivery are found in a better position compared to the respondents who stayed in the city in both prenatal and postnatal periods. This means that the prenatal, as well as the postnatal visits of health workers, occurred more in native place (rural area) compared to the urban slums. Even, the qualitative data revealed that the health workers are more helpful in their native (rural) place. Home visiting by female CHWs during the antenatal and postnatal periods is likely to be an important way to improve the

demand for and use of maternal and child health services in fragile and conflict-affected countries such as Afghanistan (Burki, 2016; Pfaffmann et. al., 2017; Black et. al., 2017; Gopalan, 2017). Lack of proper visiting of the health workers to the study area population helps to lower the utilization of healthcare services which is proved from other studies. A clear dose response of increasing antenatal and prenatal care service use with increasing intensity of health workers home visiting (Lassi, 2018; Friberg, 2010; Karim, 2013).

The above incidence of both prenatal and postnatal delivery services are found better among the respondents who moved to their native place for the delivery compared to the respondents who stayed in the city. This finding is supported by the study conducted by USAID (2016), where it is noted that the healthcare services are found better in rural areas due to National Rural Health Mission and unlike to the urban area, where no attempts are made to provide the health care services to the areas that are having geographically delineated population.

However, the qualitative data from the ASHA workers, Anganbadi and other health workers working in the areas revealed that they provide various services to the slum population which includes giving supplementary food, vaccination, check the blood pressure, height and weight measurements of the pregnant women, provide medicines for minor illnesses to the mother as well as their new born. In case of requirement, they call the ambulance and sometimes accompany the patients in case of emergency. Few mothers said that they availed the services of the health workers and they are satisfied with the services. Even, few mothers got food supplements which include rice, jaggery, wheat, etc. which is available free of cost. However, many migrants have not

availed the services and the reasons are that they do not know the location, they cannot go alone and they feel difficulty to communicate properly with the health workers. Hence, the accessibility of the health services provide by the health workers are found low. Similar findings were obtained by Mishra et. al. (2015) where they mentioned that unawareness about the physical location of the government health centers is one of the major barriers to access government health centers by the migrants.

However, the qualitative data collected from the health workers reveals that the health workers uses various types of IEC/health education activities to the slum dwellers for improvement in antenatal, pregnancy and postnatal health services such as distribute pamphlets and images in local language; do make an announcement with the help of local mosque; visit door to door on certain days and inform people or else whenever the people visit the healthcare centers they inform. When enquired about the existence of any specific program for the migrant population, they accepted that there is no migrant specific program available right now. Hence, the study population needs migration specific health education program. In this regard, Gardner and Blackburn (1996) pointed out that there is an increasing concern about migrant women having less access to reproductive health information and services than non-migrants. It was reported that there is an increasing concern about migrant women having less access to reproductive health information and services than non-migrants.

A health worker in the Anganbadi healthcare center aged 49 years with work experience of 24 years said, *“Not much, sometimes pamphlets are distributed for how to take care during pregnancy, after delivery*

and before delivery in local languages with pictures. When they visit, here I give them, otherwise when I visit their houses I inform them. I give information about contraceptives like IUD, OD, etc.

The healthcare providers said that they faced many difficulties while delivering the services especially to the slum dwellers and migrants. Even though communicating with the migrants is not at all an issue for them as the *anganwadis* are mostly in the schools. Therefore, in case of language problem, the school teachers help. The main problem is that, as the migrants move to their native place during the pregnancy time, it is difficult for them to trace and maintain their health records. Thus, the migrants miss many antenatal care visits. The other problems pointed out by the health workers are lack of space, basic infrastructure services like provision of drinking water, toilet facility, and shortage of staff members in the health centers.

One of the junior health assistants in a health facility said *“I can speak in Hindi to some extent but they are not ready to listen----- what to do. They are not available also. They go to their native in between and coming here after a long gap or shifting to some other place. We cannot keep a record of them also.”*

Lack of sufficient manpower and basic infrastructure are one of the drawbacks of less utilization of healthcare services. In this regard, it was found that redesigning and reorganizing existing space in the health facility helped to make better use of the existing infrastructure and alleviate patient's bottlenecks, presenting a possible approach in some circumstances (Namazzi et. al., 2015). Due to the lack number of staff, the work pressure on them is more and this definitely effects on delivering the services effectively. Similar findings are found in the USAID report where it was

mentioned that depleted workforces lead to a higher demand on existing workers, with the subsequent high workloads impacting the quality of care (USAID, 2016).

Conclusion

The present study concludes that the availability of private healthcare centers is more for the poor migrant communities they cannot afford. The health workers visiting to the study area is found to be very dissatisfactory. The utilization of prenatal and postnatal healthcare services among the study population is also not up to the level of satisfaction. The respondents who moved to their native place for delivery are found at a better position, compared to the respondents who stayed in the city. The recent migrants availed more maternal healthcare services than the earlier migrants. The health workers face some difficulties while providing their services due to mobility of the migrant population to their native place, lack of basic infrastructure services and lack of staff, etc. Hence, this study emphasizes the need to improve the existing government health workers services in the study area with a migration sensitive approach to make the migrants comfortable in the urban area. Therefore, the accessibility, affordability and utilization of maternal healthcare services can be achieved. The door to door visits for prenatal and post-natal maternal healthcare services performed by the health workers should be strengthened to bridge the gap between the study population and the health workers. Along with this, the healthcare centers' infrastructure should be improved for the target population as well as the healthcare provider to increase the utilization level of the healthcare services.

Acknowledgement

The present study is a part of postdoctoral research conducted out by the first author, which is funded by the Indian Council of Social Science Research, New Delhi.

References

- Anand, S. and Bärnighausen, T. 2004. Human Resources and Health Outcomes: Cross-country Econometric Study. *Lancet*, 364, 1603–09.
- Arends-Kuenning, M. 1997. The equity and efficiency of door step delivery of contraceptives in Bangladesh. Research division working paper no. 101. New York: Population Council.
- Babu, B.V., Swain, B.K., Mishra, S. and Kar, S.K. 2010. Primary Healthcare Services among a Migrant Indigenous Population Living in an Eastern Indian City. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 12, 53–59.
- Black, R.E., Taylor, C.E., Arole, S., Bang, A., Bhutta, Z.A. et al. 2017. Comprehensive review of the evidence regarding the effectiveness of community-based primary health care in improving maternal, neonatal and child health: 8. Summary and recommendations of the expert panel. *J Glob Health*, 7(1), 010908.
- Burki, T. 2016. Conflict in Afghanistan takes an increasing toll on civilians. *Lancet*, 388 (10040), 117–8
- Friberg, I.K., Bhutta, Z.A., Darmstadt, G.L., et al. 2010. Comparing modelled predictions of neonatal mortality impacts using List with observed results of community-based intervention trials in South Asia. *Int J Epidemiol*, 39(Suppl 1), i11–20.

- Gardner, R. and Blackburn, R. 1996. People Who Move: New Reproductive Health Focus. *Population Reports*, XXIV (3).
- Gopalan, S.S., Das, A. and Howard, N. 2017. Maternal and neonatal service usage and determinants in fragile and conflict-affected situations: a systematic review of Asia and the middle-east. *BMC Women's Health*, 17(1), 20.
- Government of India, 1992. National Child Survival and Safe Motherhood Programme: Plan to implement MCH Services. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India: New Delhi.
- Kapil, U. and Choudhury, P. 2005. National Rural Health Mission (NRHM): Will It Make a Difference? *Indian Pediatrics*, 42, 783.
- Karim, A.M., Admassu, K. and Schellenberg, J. 2013. Effect of Ethiopia's health extension program on maternal and newborn health care practices in 101 rural districts: A dose-response study. *PLoS One*, 8(6), e65160.
- Kumar, R, Singh, M.M., Kaur, A., Kaur, M. 1995. Reproductive health behaviour of rural women. *J Indian Med Assoc*, 93, 129-31.
- Kusuma, Y.S., Kumari, R. and Kaushal, S. 2013. Migration and Access to Maternal Healthcare: Determinants of Adequate Antenatal Care and Institutional Delivery among Socio-Economically Disadvantaged Migrants in Delhi, India. *Tropical Medicine and International Health*, 18(10), 1202-1210.
- Kusuma, Y.S., Kumari, R., Chandrakant, S.P. and Gupta, SK. 2010. Migration and Immunization: Determinants of Childhood Immunization Uptake among Socioeconomically Disadvantaged Migrants in Delhi, India. *Tropical Medicine and International Health*. 15(11), 1326-1332.
- Kusuma, Y.S., Kumari, R, Pandav. C.S. and Gupta, S.K. 2010. Migration and immunization: determinants of childhood immunization uptake among socioeconomically disadvantaged migrants in Delhi, India. *Tropical Medicine & International Health*, 1:15 (11), 1326 -32.
- Lassi, Z.S. and Bhutta, Z.A. 2015. Community-based intervention packages for reducing maternal and neonatal morbidity and mortality and improving neonatal outcomes. *Cochrane Database Syst Rev*, 3:CD007754.
- Mishra, S. Yadlapalli, K. and Babu, B.V. 2015. Migration and health-care access: Barriers to access government health services by migrant tribal community living in an eastern Indian city. *International journal of medical science and public health*, 4(1), 181-188.
- Namazzi, G., Waiswa, P., Nakakeeto, M., Nakibuuka, V. K., Namutamba, S., Najjemba, M., and Peterson, S. 2015. Strengthening Health Facilities for Maternal and Newborn Care: Experiences from Rural Eastern Uganda. *Global health action*, 8.
- Navaneetham, K. and Dramalingam, A. 2002. Utilization of maternal healthcare services in Southern India. *Social Science & Medicine*, 55(10):1849-1869.
- Pandve, H.T. and Pandve, T.K. 2013. Primary Healthcare System in India: Evolution and Challenges. *Int J Health Syst Disaster Manage*, 1(3), 125-128.
- Pfaffmann, Z. J., Rasanathan, K. and Hipgrave D. 2017. Community health systems: allowing community health workers to emerge from the shadows. *Lancet Glob Health*, 5(9), e866-e7.
- Planning Commission, Government of India, 2008. Eleventh Five Year Plan: 2007-

*Maternal Healthcare Services and the Health Workers among the Migrant
Slum Dwellers of Bangalore City, Karnataka, India*

- 12: Social Sector (Volume II). Oxford University Press, New Delhi.
- Rao, S., Joshi, S.B., Kelkar, R.S. 2000. Changes in nutritional status and morbidity over time among pre-school children from slums in Pune, India. *Indian J Pediatr*, 37(10),1060-71.
- Singh, P.K., Rai, R.K. and Singh, L. 2012. Examining the Effect of Household Wealth and Migration Status on Safe Delivery Care in Urban India, 1992-2006. *PLoS One*, 7: e44901.
- Swain BK, Mishra S. 2006. Immunization Coverage among Migrant Tribal Children in Slums of Orissa. *Indian Pediatr*. 43(11), 1011-1013.
- UNICEF, Women UN, 2015. Addressing Inequalities: Synthesis Report of Global Public Consultation. Global Thematic Consultation on the Post - 2015 Development Agenda, TheWorldWeWant2015. 2013 Jun.
- USAID, 2016. The Health Communication Capacity Collaborative (HC3). (2016) *Factors Impacting the Effectiveness of Health Care Worker Behavior Change: A Literature Review*. Baltimore: Johns Hopkins Center for Communication Programs.
- Usmani, G. and Ahmad, N. 2018. Health Status in India: A Study of Urban Slum and Non-slum Population. *Nurs Res Pract*, 2(1), 9-14.
- World Health Organization, 1994. Mother-baby package: Implementing safe motherhood in countries. Geneva.

Kajian Delinkuensi Anak di Indonesia Tahun 2011-2015

Nisa'ul Khusna¹ dan Winih Budiarti²

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, ²Politeknik Statistika STIS Jakarta

Korespondensi: Winih Budiarti (*e-mail*: winih@stis.ac.id)

Abstrak

Istilah *juvenile delinquency* digunakan untuk menyatakan kenakalan anak. Istilah ini tidak hanya digunakan untuk kenakalan anak biasa, tetapi juga termasuk kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tergolong dalam tindakan kriminal. Delinkuensi anak di Indonesia saat ini menjadi masalah yang serius. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum meningkat tajam pada kurun waktu enam tahun terakhir. Anak yang pernah menjadi pelaku delinkuensi akan berpotensi kembali melakukan tindakan kriminal saat dewasa, sehingga nantinya dapat memengaruhi proses pembangunan nasional. Penelitian ini melakukan analisis regresi data panel dari tahun 2011-2015 pada 27 provinsi untuk mengetahui variabel-variabel yang memengaruhi tingkat delinkuensi anak secara makro berdasarkan *social factor delinquency theory*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat delinkuensi, sedangkan rata-rata lama sekolah, dan persentase pengguna internet berpengaruh positif terhadap tingkat delinkuensi anak di Indonesia.

Kata kunci: kenakalan anak; kriminal; regresi data panel

Study of Child Delinquency in Indonesia 2011-2015

Abstract

The term juvenile delinquency is not only used for ordinary child delinquency, but also includes juvenile delinquency which is classified as a crime if this is performed by an adult. The child delinquency in Indonesia is a serious problem and classified as serious crimes as seen from the types of crimes committed by children. Moreover, the number of children in conflict with the law has risen sharply in the last six years. Children who have been perpetrators of delinquency will potentially return to committing criminal acts as adults, so they can later influence the national development process. This study conducted a panel data regression analysis from 2011-2015 in 27 provinces to find out the variables that affect the level of child delinquency based on social factor delinquency theory. The results of this study indicate that the variable income per capita has a negative effect on the level of delinquency, while the average length of schooling and the percentage of internet users have a positive effect on the level of child delinquency in Indonesia.

Keywords: juvenile delinquency; crime; panel data regression

Pendahuluan

Hasil Sensus Penduduk 2010 menyebutkan bahwa pada tahun 2010-2019 diproyeksikan akan terjadi kenaikan jumlah anak usia 0-17 tahun, dimana jumlahnya akan meningkat pada usia tertentu. Pada 2014, jumlah anak di Indonesia mencapai 82,8 juta atau 32,9 persen dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan struktur penduduk tersebut, kepentingan dan kebutuhan anak harus menjadi fokus utama dalam pembangunan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan terkait anak harus diperhatikan, termasuk perlindungan terhadap semua hak anak dari segala aspek. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebijakan terkait perlindungan anak sebagai pelaku kejahatan. Jumlah kebijakan untuk anak sebagai pelaku kejahatan masih minim. Padahal, kenakalan anak yang sudah menjurus pada kriminalitas atau disebut delinkuensi anak saat ini marak terjadi di lingkungan sekitar.

Data KPAI (2017) menyebutkan jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada kurun waktu enam tahun terakhir merupakan jumlah tertinggi yang pernah terjadi di Indonesia. Pada 2011 hingga 2017 jumlahnya mencapai 9266 anak. Jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun dengan jumlah kasus ABH terbesar terjadi pada 2012, 2013, dan 2014. Pada 2012, anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 1413 anak, pada 2013 terdapat 1428 anak, dan tertinggi terjadi pada 2014, yaitu 2208 anak. Selain dilihat dari sisi kuantitatif, secara kualitatif kasus yang dihadapi ABH mayoritas adalah kekerasan seksual. Hal tersebut menjadi sorotan karena kekerasan seksual merupakan kasus yang tergolong berat dan berpotensi menyebabkan anak trauma.

Secara faktual, hal ini dapat dilihat dari berbagai media massa bahwa delinkuensi

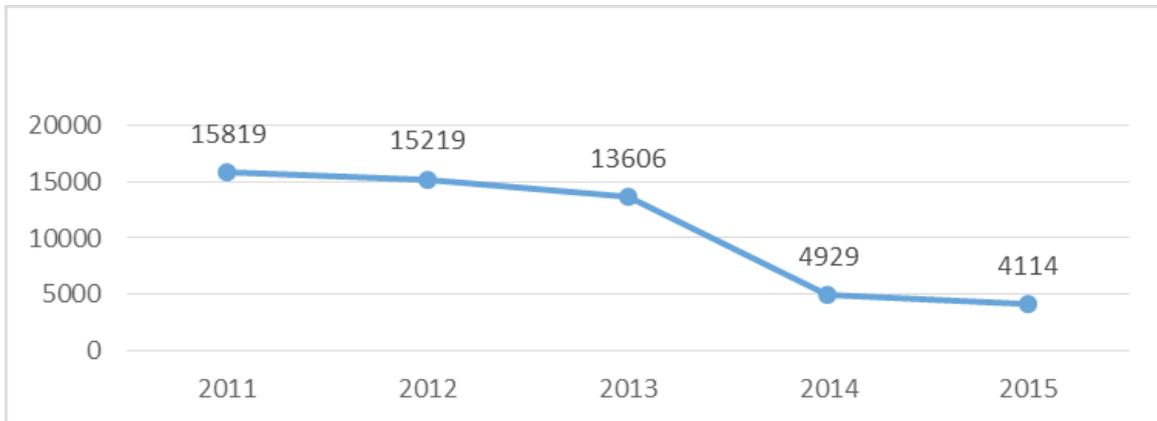
anak telah menjadi permasalahan di Indonesia. Seperti beberapa artikel yang dikutip dari media massa sebagai berikut:

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis di bawah umur oleh 14 pemuda di Bengkulu pada 2 April 2016 lalu, tujuh dari empat belas pelaku masih berumur di bawah 17 tahun. ("Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu", *Liputan6.com*)

GS ini diperkosa secara beramai-ramai oleh tujuh orang anak berinisial SF (12), FR (7), EG (5), BK (5), IK (6), RD(7), HR (10) yang merupakan anak-anak yang juga tinggal di sekitar rumah korban. ("Bocah 5 Tahun Digilir oleh Teman-Temannya di Rumah Kosong", *Merdeka.com*)

Sunarwiyati (Unayah dan Muslim, 2015) membagi kenakalan anak ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah kenakalan anak biasa, seperti membolos dan membantah kedua orang tua. Kategori kedua adalah kenakalan yang menjurus pada pelanggaran, misalnya mengendarai sepeda motor tanpa SIM. Kategori ketiga adalah kenakalan anak yang jika dilakukan orang dewasa tergolong dalam tindakan kriminal, seperti pembunuhan, penyalagunaan narkoba, dan pencurian. Penelitian ini akan lebih berfokus pada kenakalan anak kategori ketiga, atau menurut Hadisuprpto (2008) disebut delinkuensi anak.

Data jumlah narapidana dan tahanan anak dapat dijadikan acuan untuk mengetahui jumlah anak yang melakukan tindak kenakalan kategori ketiga. Mc. Cord dkk. (2001) menyebutkan jika suatu negara tidak memiliki data jumlah pelaku delinkuensi anak, maka dapat jumlah tersebut diketahui dengan tiga data yaitu data jumlah tahanan, data jumlah



Gambar 1. Delinkuensi Anak di Indonesia tahun 2011-2015

korban, dan data registrasi. Di Indonesia, data yang tersedia untuk mengestimasi jumlah delinkuensi anak adalah jumlah tahanan anak, yaitu membagi antara jumlah tahanan anak dengan tahanan dewasa, kemudian dikalikan dengan total kejahatan yang terjadi di suatu wilayah. Hasil perhitungan estimasi jumlah delinkuensi anak di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.

Pada Gambar 1, delinkuensi anak yang terjadi dari tahun 2011 hingga 2013 tercatat dalam angka yang sangat tinggi, yaitu 15.829 kasus dan 15.219 kasus. Pada tahun 2013 turun menjadi 13.606 kasus. Penurunan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2014, yaitu menjadi 4929 kasus. Hal tersebut bukan berarti terjadi penurunan jumlah delinkuensi anak, tetapi pada tahun 2014 dilakukan penerapan peraturan baru mengenai tahanan anak dimana anak yang ditahan dan diproses secara hukum hanya anak yang melakukan delinkuensi dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun.

Gambaran semakin mengkhawatirkannya delinkuensi anak di Indonesia dapat dilihat dari data jumlah desa yang mengalami konflik massal oleh pelajar. Berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa oleh Badan

Pusat Statistik, jumlah desa yang mengalami konflik massal oleh pelajar meningkat setiap periode. Peningkatan yang terjadi hampir dua kali lipat dari tahun 2008 hingga 2011, yaitu dari 108 desa menjadi 210 desa. Peningkatan juga terjadi dari periode 2011 hingga 2014, dari 210 desa menjadi 327 desa. Konflik ini tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Konflik massal oleh pelajar biasanya melibatkan beberapa kelompok besar dan dilakukan lebih dari sekali. Tentu saja hal tersebut menunjukkan dekatnya pelajar di Indonesia dengan konflik massal.

Menurut Levitt dan Lochner (2001), anak yang pernah melakukan tindakan delinkuensi memiliki potensi untuk melakukan tindakan kriminal lagi di usia dewasa. Hal tersebut mengkhawatirkan, mengingat jumlah penduduk di bawah 17 tahun pada periode 2010-2016 yang sangat besar, yaitu hampir di atas 25 persen dari total penduduk. Kelompok usia tersebut akan berpotensi melakukan tindakan kriminal dan meningkatkan tingkat kriminalitas pada periode tahun saat mereka dewasa. Periode tersebut bertepatan dengan momen bonus demografi Indonesia yang akan terjadi pada tahun 2010-2035. Maka dikhawatirkan tingkat kriminalitas pada

periode tersebut akan tinggi dan kemudian menghambat pembangunan di Indonesia yang seharusnya dapat dimaksimalkan dengan adanya bonus demografi tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi delinkuensi anak di Indonesia, sehingga kebijakan yang diambil menjadi tepat.

Perlindungan dan kesejahteraan bagi anak sebenarnya telah tertuang dalam UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang tersebut mengatur tentang kesejahteraan anak, hak-hak anak, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Selain itu, Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1990 telah diratifikasi. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirilis sebagai dukungan atas penerapan Konvensi Hak Anak tersebut yang kemudian direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014. Pada tahun 2016, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah disetujui. Namun, menurut LBH (Lembaga Bantuan Hukum) penegakan hukum dengan pelaku usia anak masih sering tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut pernyataan pers resmi dari LBH Indonesia Jakarta yang dikutip dari laman resmi LBH Indonesia Jakarta:

Dari kasus-kasus yang ditangani LBH Jakarta kecenderungan anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditawarkan bantuan hukum bahkan sejak proses awal penangkapan, termasuk juga dalam proses penahanan apalagi pemeriksaan. Di lain kesempatan, seorang anak tidak ditawarkan hak atas bantuan

hukum, namun dipaksa menandatangani surat yang menyatakan dirinya tidak ingin didampingi. Si anak dan keluarga tidak berdaya untuk menolak, sehingga mau tidak mau ikut saja. Tidak hanya itu, seringkali anak diperiksa tanpa penasihat hukum juga tanpa orang tua. Orang tua diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik setelah proses BAP selesai. ("Bantuan Hukum Untuk Anak Masih Sering Terabaikan", bantuanhukum.or.id)

Kebijakan untuk anak sebagai pelaku kejahatan masih jarang diterapkan sebagaimana mestinya. Anak tidak didampingi pendamping hukum dan tidak diadili menggunakan perundang-undangan yang berlaku. Padahal, anak yang menjadi korban maupun pelaku sebenarnya sama-sama menjadi korban dari lingkungan dan tatanan sosial yang salah. Sehingga pelaku usia anak harus dibina dan diberikan pengajaran, bukan ditindak secara hukum seperti orang dewasa. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang memengaruhi delinkuensi anak di Indonesia pada periode tahun 2010-2015 perlu diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat memilih kebijakan yang tepat untuk mengatasi tingginya delinkuensi anak di Indonesia, baik secara preventif maupun responsif.

Menurut World Youth Report (2003), terdapat beberapa kondisi yang memengaruhi delinkuensi anak, seperti kondisi sosial ekonomi, kondisi budaya, kondisi pergaulan, dan kondisi dari individu itu sendiri. UN dalam World Youth Report (2003) juga menyebutkan mengenai adanya aspek regional (kewilayahan) yang memengaruhi delinkuensi anak. Menurut Mc Cord *et. al.* (2001), delinkuensi anak juga dapat dilihat

dari banyak faktor, seperti faktor sosial, lingkungan, dan ekonomi. Menurut Siegel dan Welsh (2011), penyebab delinkuensi anak dibagi menjadi dua faktor besar, yaitu *individual factor* dan *social factor*.

Levitt dan Lochner (2001) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kriminalitas remaja. Dalam penelitian tersebut, Levitt dan Lochner melakukan tiga jenis penelitian berbeda. Penelitian pertama meneliti tentang analisis pembunuhan oleh anak di Chicago menggunakan data sensus. Data tersebut diperoleh dari kompilasi yang dilakukan FBI dan laporan dari departemen kepolisian di Chicago. Data dari FBI dan departemen kepolisian tersebut kemudian dihubungkan dengan data populasi dan sensus kependudukan dari tahun 1980 hingga 1990. Dari data sensus diperoleh data mengenai keadaan sosial dan ekonomi di Chicago. Variabel ekonomi yang digunakan adalah rata-rata pengeluaran per kapita, persentase anak-anak yang berada di dalam rumah tangga miskin, dan ketimpangan. Sedangkan variabel sosial yang digunakan meliputi persentase kepemilikan rumah, komposisi ras di daerah tersebut, dan jumlah populasi dari penduduk yang berusia 16 hingga 19 tahun yang bekerja. Hasil dari penelitian tersebut terbukti bahwa faktor ekonomi dan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di wilayah Chicago.

Penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor yang menggambarkan delinkuensi anak secara makro menurut teori *social factor delinquency* dari Siegel dan Welsh (2011). Provinsi-provinsi di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, sehingga tingkat delinkuensi anak di setiap provinsi juga berbeda. Dengan demikian, data

cross section yang akan digunakan adalah tingkat delinkuensi anak di setiap provinsi di Indonesia. Selain itu, perkembangan delinkuensi anak yang begitu fluktuatif dari tahun ke tahun menggugah peneliti untuk melihat penyebab fenomena tersebut dari periode tahun 2011-2015. Seperti diketahui, penelitian delinkuensi anak di Indonesia jarang dilakukan menggunakan data makro, biasanya berupa data primer dari suatu lokasi rumah tahanan tertentu. Penelitian dengan menggunakan data makro diperlukan untuk mengambil kebijakan dengan lingkup yang lebih luas.

Metodologi

Data jumlah delinkuensi anak tidak tersedia di Indonesia, baik laporan dari kepolisian maupun dari dinas terkait serta tidak terdapat data yang mengklasifikasikan tindak kejahatan berdasarkan umur pelaku. Dalam penelitian ini, jumlah delinkuensi anak dihitung dengan cara sebagai berikut:

Jumlah delinkuensi anak =

$$\frac{\text{Tahanan anak (st)}}{\text{Jumlah tahanan total (st)}} \times \text{jumlah kejahatan (st)}$$

... (1)

dengan *s* adalah daerah atau wilayah dan *t* adalah waktu. Estimasi jumlah delinkuensi tersebut mengacu dari Levit dan Lochner (2001). Data tahanan anak didapatkan dari kantor wilayah Lembaga Pemasyarakatan di setiap provinsi di Indonesia. Demikian pula dengan data jumlah tahanan dewasa. Jumlah tindak kejahatan yang terjadi di setiap provinsi di Indonesia bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik dari publikasi

Kriminalitas dalam Angka. Variabel yang digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat delinkuensi anak, yaitu estimasi jumlah delinkuensi anak yang telah dihitung dengan menggunakan formula (1) untuk tiap provinsi dibagi dengan jumlah penduduk muda 0-18 tiap provinsi, kemudian dikalikan 100.000.

Menurut teori *social factor delinquency* dari Siegel dan Welsh (2011), terdapat lima faktor yang memengaruhi tingkat delinkuensi anak, yaitu kualitas pendidikan yang diwakili dengan variabel rata-rata lama sekolah, ketimpangan yang diwakili dengan *gini ratio*, keadaan ekonomi suatu wilayah yang diwakili dengan variabel pengeluaran per kapita, perubahan struktur yang terjadi di dalam keluarga yang diwakili dengan variabel persentase penduduk dengan status cerai, dan perubahan lingkungan anak diwakili dengan persentase penduduk usia 13-15 tahun yang menggunakan internet. Dengan demikian, lima variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah, *gini ratio*, pengeluaran per kapita, presentase jumlah penduduk dengan status cerai hidup, dan persentase penduduk usia 13-15 yang menggunakan internet seminggu yang lalu pada setiap provinsi di Indonesia. Kelima variabel tersebut menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensia. Analisis deskriptif memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan disajikan berupa grafik, yaitu peta untuk menggambarkan jumlah delinkuensi anak per provinsi di Indonesia dan diagram lainnya. Untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel independen terhadap tingkat delinkuensi anak, maka dilakukan analisis regresi data panel. Penelitian ini

menggunakan analisis regresi data panel karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi delinkuensi anak di Indonesia dengan data yang tersedia berupa data gabungan *time series* dan *cross section*. Penelitian ini menggunakan data jumlah tahanan anak dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan dari 2011 hingga 2015 yang dihimpun dari seluruh Kantor Wilayah (kanwil) di Indonesia. Indonesia memiliki 33 kanwil, yaitu kanwil di setiap provinsi, tetapi karena data laporan jumlah kejahatan dari BPS hanya tersedia sebanyak 31 provinsi dan ada empat provinsi yaitu Gorontalo, DI Yogyakarta, Maluku dan Maluku Utara yang data jumlah tahanan anak adalah 0 atau belum terhimpun datanya, sehingga penelitian ini hanya menggunakan 27 provinsi sebagai objek analisis. Dengan demikian, terdapat 135 observasi dalam penelitian ini.

Adapun model regresi data panel yang diajukan adalah sebagai berikut:

$$\ln(\text{tktdelin})_{it} = \alpha + \beta_1 \text{mys}_{it} + \beta_2 \text{gini}_{it} + \beta_3 \ln(\text{kap})_{it} + \beta_4 \text{cerai}_{it} + \beta_5 \text{int}_{it} + u_{it}$$

Keterangan:

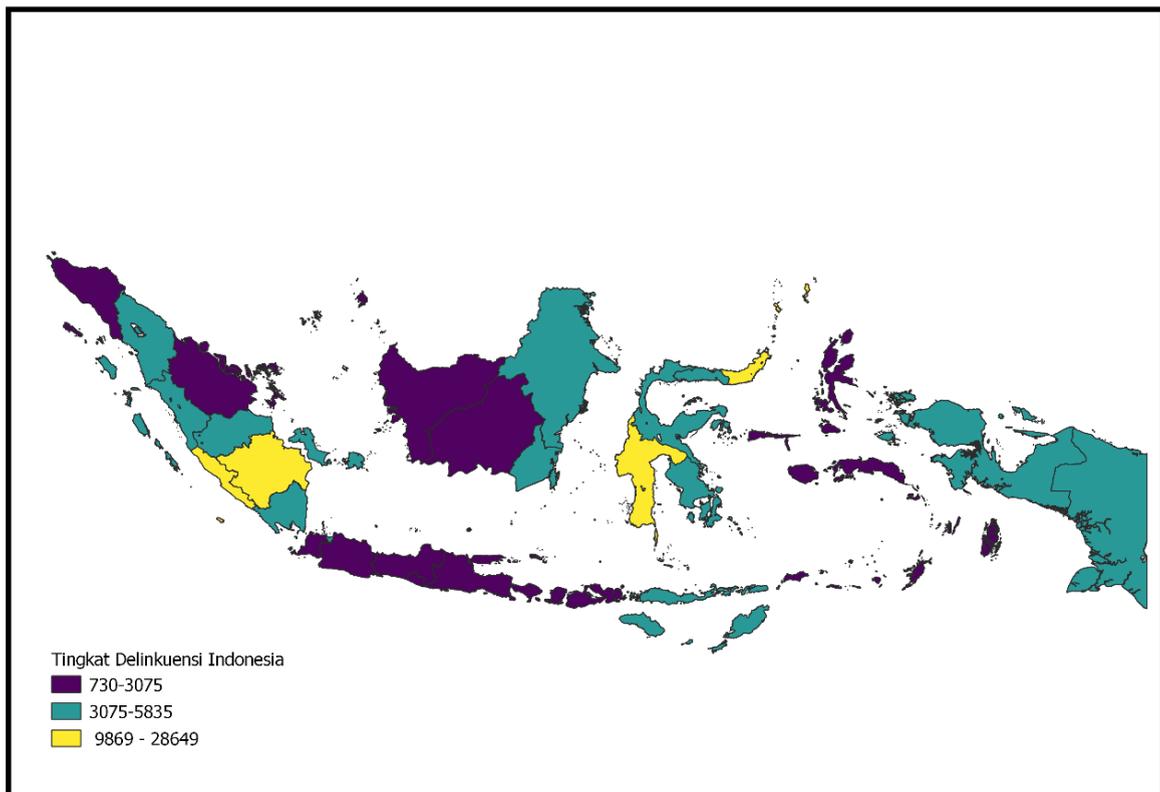
- $\ln(\text{tktdelin})_{it}$: Logaritma natural tingkat delinkuensi anak provinsi *i* tahun *t*
- mys_{it} : Rata-rata lama sekolah provinsi *i* tahun *t*
- gini_{it} : Koefisien gini di provinsi *i* pada tahun *t*
- $\ln(\text{kap})_{it}$: Logaritma natural dari pengeluaran per kapita provinsi *i* tahun *t*
- cerai_{it} : Persentase penduduk dengan status cerai hidup provinsi *i* tahun *t*

- int_{it} : Presentase anak berusia 13-15 tahun yang menggunakan internet di provinsi i pada tahun t
- α : Intercept
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5$: koefisien regresi masing-masing variabel bebas
- u_{it} : error term untuk setiap provinsi i pada tahun t
- $i = 1, 2, \dots, 27$: provinsi di Indonesia yang digunakan sebagai unit observasi
- $t = 1, 2, \dots, 5$: periode observasi yaitu dari 2011-2015

Pembahasan

Persebaran dan Kondisi Delinkuensi Anak di Indonesia

Delinkuensi anak di Indonesia secara jumlah memang masih sebesar 1-2 persen dari total kejahatan yang terjadi. Namun, delinkuensi anak ini merupakan hasil estimasi dari jumlah tahanan anak, sehingga jumlah delinkuensi anak tidak merepresentasikan total dari seluruh delinkuensi anak yang ada. Jumlah delinkuensi anak yang dihitung dengan estimasi ini dapat membantu melihat keadaan anak-anak di Indonesia yang secara moral dan psikologis memprihatinkan. Anak pelaku delinkuensi sebenarnya bukan hanya menjadi pelaku kenakalan, namun sebenarnya adalah



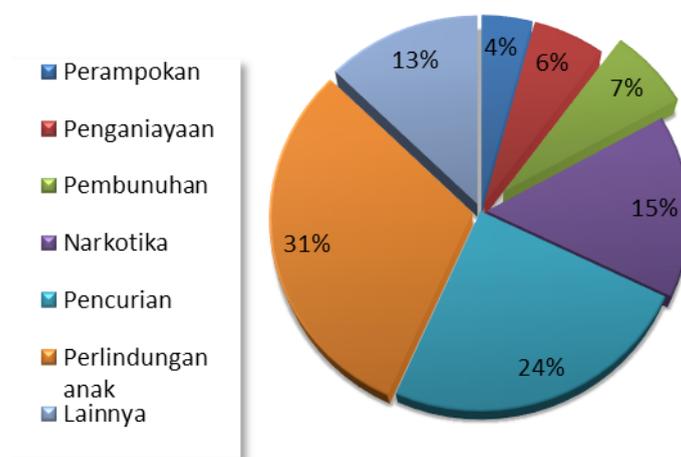
Gambar 2. Tingkat delinkuensi anak di Indonesia tahun 2015

korban dari keadaan lingkungan sekitar yang tidak mendukung perkembangan yang baik untuk anak-anak.

Berdasarkan Gambar 2 tersebut, delinkuensi sudah terjadi di semua provinsi di Indonesia dengan tingkat yang berbeda. Tingkat delinkuensi tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat delinkuensi anak di tiga provinsi tersebut berada pada rentang 9.869 - 28.649 kejadian di setiap 100.000 penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat delinkuensi anak terjadi pada setiap provinsi di Indonesia dengan persebaran yang merata. Tingkat delinkuensi anak di setiap provinsi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh kewilayahan, oleh sebab itu peneliti melakukan studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pertumbuhan delinkuensi anak di setiap provinsi di Indonesia dengan menggunakan studi inferensia.

Data Dirjen Lapas pada Februari 2017 mencatat delinkuensi anak didominasi oleh kejahatan dengan klasifikasi kejahatan berat, seperti kasus perlindungan anak (delinkuensi oleh anak dengan korban anak-anak juga), pencurian, narkoba, dan perampokan. Hal ini mengkhawatirkan mengingat tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh anak-anak.

Penamaan dan pengelompokan pada Gambar 3 diperoleh dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengelompokan dibagi menjadi tujuh kelompok besar, yaitu perampokan, penganiayaan, pembunuhan, narkoba, pencurian, perlindungan anak, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Maksud dari penamaan kelompok 'perlindungan anak' tersebut adalah perlindungan anak dalam konteks delinkuensi yang dilakukan oleh anak dan dengan korban anak-anak juga, karena baik pelaku dan korban sama-sama membutuhkan perlindungan, mengingat keduanya masih dalam usia anak. Dalam



Gambar 3. Persentase tahanan anak di Indonesia berdasarkan Tindak Pidana di Lapas/Rutan di Indonesia pada Februari, 2017

penanganan kasus tersebut, perundang-undangan yang digunakan masuk dalam pasal perlindungan anak.

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa 31 persen anak yang ditahan masuk dalam kategori korban dan pelaku dari anak-anak itu sendiri, kemudian disusul dengan pencurian sebesar 24 persen, dan narkoba sebesar 15 persen. Menjadi mengawatirkan karena persentase tahanan terbesar berasal dari kelompok kasus perlindungan anak. Yaitu kasus di mana baik korban maupun pelakunya merupakan anak-anak. Menurut penelitian Veenstra et.al dalam Sugiartyanti (2010), delinkuensi oleh anak seingkali korbannya merupakan anak-anak juga. Delinkuensi dalam kelompok kasus tersebut biasanya diawali dengan perundungan (*bullying*) yang dilakukan sesama anak sebaya. Perilaku merundung ini mengarahkan pelaku pada perilaku delinkuensi anak, delinkuensi dewasa, dan meminum minuman keras. Perilaku saling menindas di antara teman sebaya ini sebagian besar terjadi pada masa remaja. Hal ini terjadi karena masa remaja merupakan masa pencarian identitas dan rasa membutuhkan terhadap penerimaan teman membuat para korban perundungan ini sering pasrah menerima perilaku-perilaku merundung yang mereka alami. Perundungan yang sudah mengarah pada tindakan delinkuensi anak, menurut penelitian-penelitian di Indonesia, biasanya terjadi di sekolah, baik di kelas, kantin, kamar mandi, lapangan sekolah maupun tempat-tempat lainnya. Waktu terjadinya perundungan juga berhubungan dengan jam sekolah, misalnya pada jam istirahat atau saat perjalanan pulang. Perilaku merundung ini akan mengarah pada tindakan-tindakan delinkuensi anak. Pada masa anak-anak awal, misalnya pada usia 6 hingga 12 tahun, perundungan biasanya

dilakukan dalam tindakan fisik, sedangkan pada masa remaja, perundungan mengarah pada tindakan yang bersifat verbal. Penelitian yang dilakukan UN menyebutkan bahwa anak-anak perempuan di negara berkembang lebih cenderung terlibat dalam perkelahian dibandingkan dengan mereka yang tinggal di negara-negara maju. Sebuah penelitian di USA menemukan bahwa 3 hingga 10 persen siswa membawa senjata tajam ke sekolah, dan 12 persen hingga 25 persen siswa membawa senjata tajam di luar sekolah. Sementara itu, penelitian mendalam terkait perundungan di Indonesia belum banyak didalami oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Padahal, kasus kekerasan dengan pelaku dan korban sesama anak adalah kasus terbesar yang dialami tahanan anak di Indonesia.

Posisi kedua dan keempat dalam kasus delinkuensi anak adalah kasus pencurian dan perampokan. Anak-anak yang terlahir dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu atau dapat dikatakan miskin, memiliki peluang untuk terlibat dalam kasus pencurian lebih besar. Anak-anak ini, menurut Siegel dan Welsh (2011), tidak dapat meraih cita-cita atau mimpi mereka dengan cara-cara yang legal seperti pendidikan. Dengan demikian, mereka menggunakan cara-cara tidak legal untuk memenuhi cita-cita mereka, misalnya agar dinilai kaya, mereka akan cenderung melakukan perbuatan mencuri. Faktor lain yang sering terjadi adalah keinginan untuk diterima di lingkungan pergaulan. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri dan membutuhkan sebuah penerimaan dari lingkungan, terutama lingkungan pergaulan. Oleh sebab itu, hal ini dapat dimengerti bahwa lingkungan pergaulan akan memengaruhi tumbuh kembang remaja. Remaja yang tidak memiliki modal untuk diterima di lingkungannya akan cenderung mencuri, atau lebih parah lagi,

merampok untuk mendapatkan uang. Selain itu, kesenjangan ekonomi di suatu daerah juga akan memunculkan perilaku mencuri tersebut. Hal ini disebabkan keinginan remaja untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat ia miliki karena keterbatasan finansial. Perilaku mencuri ini akan lebih berbahaya lagi jika diikuti dengan penggunaan narkoba dan minuman keras. Biasanya para remaja pemakai narkoba dan minuman keras yang memang belum dalam usia kerja, tentu saja tidak memiliki biaya untuk membeli narkoba dan minuman keras, sehingga mencuri menjadi suatu alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mendapatkan narkoba dan minuman keras. Kasus khusus, seperti mencuri karena ingin mendapatkan minuman keras dan narkoba akan terjadi terus-menerus sampai mereka terbebas dari kecanduan narkoba dan minuman keras tersebut.

Posisi ketiga dalam kasus delinkuensi anak adalah kasus narkoba. Penggunaan narkoba merupakan masalah yang sangat membahayakan karena penggunaan narkoba memicu munculnya kejahatan-kejahatan lain. Dalam pengaruh obat-obatan terlarang, seseorang akan menjadi hilang kendali dan terpicu untuk melakukan tindak kejahatan lain. Penggunaan narkoba pada anak juga sering diikuti perilaku mencuri dan merampok. Hal ini terjadi karena kecanduan narkoba yang menimbulkan keinginan pemakai untuk mengonsumsinya secara terus-menerus. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa harga narkoba tidak murah. Menurut penelitian Boys et.al. (2001), alasan pertama seorang anak mengonsumsi narkoba adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Biasanya obat-obatan yang dikonsumsi adalah jenis simultan, seperti kokain, ekstasi, dan amphetamin. Masa kanak-kanak menuju

remaja atau remaja menuju dewasa memang merupakan masa pencarian jati diri. Kadang dibutuhkan rasa percaya diri yang lebih untuk menghadapi tekanan-tekanan ataupun perundungan dari lingkungan sekitar. Rasa percaya diri yang seharusnya didapatkan dari orang tua, teman-teman atau guru namun tidak didapatkan, membuat remaja berpikir pendek dan menggunakan narkoba sebagai sumber rasa percaya diri. Menurut Whitesel (2013), penggunaan narkoba pada remaja memiliki banyak faktor. Whitesel membagi menjadi tiga faktor, yaitu keluarga, sosial, dan individu. Faktor sosial hampir sama dengan faktor yang menyebabkan delinkuensi anak, seperti perceraian orang tua, pengabaian orang tua dan faktor-faktor lain yang menimbulkan anak mengalami trauma secara fisik dan psikologis. Sementara itu, faktor sosial paling menonjol, yaitu lingkungan pergaulan. Seorang anak akan mengonsumsi narkoba jika lingkungan pergaulannya juga mengonsumsi narkoba. Penerimaan dan popularitas dari teman pergaulan adalah segalanya bagi seorang anak. Hal ini akan mengkhawatirkan jika pemakaian narkoba dan alkohol merupakan suatu ukuran popularitas bagi suatu kelompok. Hubungan antara popularitas dan penerimaan, selain berpengaruh agar diterimanya seseorang dalam suatu grup, narkoba dan alkohol juga menjadi pelampiasan seorang anak yang tidak diterima dalam suatu kelompok. Anak yang tidak populer dan mendapatkan perundungan di lingkungan pergaulannya juga memiliki kecenderungan untuk mengonsumis alkohol dan obat-obatan terlarang. Kemudian berdasarkan faktor individu, beberapa individu yang mengidap ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) disebabkan oleh kurangnya perhatian, mudah lupa, dan hiperaktif. Pengidap sindrom ini lebih

cenderung memakai narkoba. Selain pengidap sindrom ADHD, anak yang mudah depresi juga akan cenderung mengonsumsi narkoba.

Kejadian kejahatan yang disebabkan penggunaan narkoba di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Maka tidak heran jika anak-anak di Indonesia mulai terkena dampak dari kejahatan narkoba. Pada 2011, jumlah kejadiannya sebesar 18.047 yang kemudian menurun menjadi 16.589. Penurunan dimulai karena pada 2011 adanya peresmian instruksi presiden tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi presiden ini berfokus pada pencapaian Indonesia bebas narkoba, kebijakan ini memfokuskan pada pencegahan, pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan antinarkoba, bidang rehabilitasi, dan upaya pemberantasan. Namun, sepertinya usaha ini masih belum dilakukan secara maksimal karena pada 2013 jumlah kejadian kembali meningkat menjadi 19.953, dan hanya turun relatif kecil di tahun berikutnya, yaitu 19.280. Secara mengejutkan, kejadian narkoba meningkat hampir dua kali lipat, yaitu sebesar 36.874 pada 2015. Bahkan menurut Badan Narkotika Nasional pada November 2015, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta. Tentunya upaya-upaya pencegahan narkoba, terutama bagi anak-anak, harus ditingkatkan. Narkoba banyak menyerang kalangan remaja karena remaja adalah masa-masa pencarian jati diri.

Posisi kelima dalam kasus delinkuensi anak adalah pembunuhan. Menurut Hemenway dan Solnick (2015), pembunuhan oleh anak dapat dikategorikan menjadi lima. Kategori pertama adalah pembunuhan bayi. Kategori

ini sering muncul karena anak-anak dijadikan satu dengan bayi atau mengasuh bayi. Kategori kedua adalah pembunuhan anggota keluarga yang sudah dewasa seperti kedua orang tua atau kakek-nenek. Pada kategori pertama dan kedua ini, biasanya pembunuh lebih cenderung menggunakan senjata, baik senjata tajam maupun senjata api. Kategori ketiga adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja pada saat kegiatan bermain, misalnya mendorong teman terlalu keras saat bermain atau memang sengaja memberikan kekerasan pada saat permainan berlangsung. Korban dari kategori ketiga ini lebih mengarah pada teman-teman dekat atau saudara. Pembunuhan karena kategori pertama hingga ketiga ini dapat dicegah jika dilakukan pengawasan dan tidak adanya akses anak terhadap senjata api dan senjata tajam. Kategori ke empat dan kelima adalah pencurian dan serangan fisik yang menimbulkan pembunuhan. Pelaku cenderung bekerja sendiri, namun berkorelasi dan berkoordinasi dengan kelompok geng atau kelompok sepermainan. Sebenarnya banyak cara pencegahan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak, misalnya pada kategori pertama, yaitu tidak membuat anak-anak menjadi satu tempat dengan bayi pada penitipan anak. Pencegahan untuk kategori kedua adalah mengurangi akses senjata api untuk anak berusia 10 hingga 14 tahun.

Variabel-variabel yang Memengaruhi Pertumbuhan Tingkat Delinkuensi Anak di Indonesia

Berdasarkan uji pemilihan model yang telah dilakukan, maka model yang terpilih adalah *random effect model*, yaitu model yang mengasumsikan adanya korelasi antara *error* dan variabel independen dan pengaruh

setiap individu (provinsi) yang ada di dalam *error* atau bersifat random, sehingga model tidak dapat melihat perbedaan pengaruh provinsi terhadap delinkuensi anak. Selain itu, metode *stepwise regression* digunakan untuk memperoleh model terbaik dengan mengeluarkan variabel-variabel yang tidak signifikan. Dari lima variabel, menurut *social factor delinquency* yang memengaruhi tingkat delinkuensi anak, variabel yang tidak signifikan adalah variabel *gini ratio* dan persentase penduduk dengan status cerai di suatu wilayah. Dengan demikian, persamaan model terbaik yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\ln(\text{tktdelin})_{it} = 24.4545 + 0,7372\text{mys}_{it} + 2,1428\ln(\text{kap})_{it} + 0.0591\text{int}_{it}$$

Keterangan:

- $\ln(\text{tktdelin})_{it}$: Logaritma natural tingkat delinkuensi anak provinsi i tahun t
- mys_{it} : Rata-rata lama sekolah provinsi i tahun t
- $\ln(\text{kap})_{it}$: Logaritma natural dari pengeluaran per kapita provinsi i tahun t
- int_{it} : Presentase anak berusia 13-15 tahun yang menggunakan internet di provinsi i pada tahun t
- $i = 1,2, \dots, 27$: provinsi di Indonesia yang digunakan sebagai unit observasi
- $t = 1,2, \dots, 5$: periode observasi, yaitu dari tahun 2011-2015

Variabel *mys* (*mean years school*) atau rata-rata lama sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat delinkuensi anak.

Namun, arah hubungan variabel ini signifikan secara positif, yang berarti saat rata-rata lama sekolah bertambah satu tahun, maka pertumbuhan delinkuensi anak juga akan bertambah sebesar **0,7372**. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa angka *drop out* atau putus sekolah memengaruhi kenaikan delinkuensi anak. Namun, ternyata terdapat penelitian yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan tidak akan mengurangi jumlah kejahatan, namun justru akan mempengaruhi kualitas dari kejahatan tersebut (Lochner, 2007). Semakin tinggi pendidikan seorang anak, maka akan semakin tinggi tingkat kejahatan anak tersebut secara kualitas.

Solusi dari hasil penelitian yang dapat diterapkan di Indonesia adalah menambahkan pendidikan moral dalam kurikulum di sekolah-sekolah maupun pendidikan nonformal oleh keluarga. Menurut Rukiyati (2017), pendidikan moral mencakup tiga pilar utama. Pilar pertama adalah pendidikan moral terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Pendidikan moral terhadap diri sendiri meliputi kebersihan diri, disiplin diri, keuletan, dan sebagainya. Sementara pendidikan moral terhadap sesama manusia mencakup nilai-nilai moral sosial, seperti toleransi, rasa saling menghargai, kerja sama, adil, dan peduli. Contoh pendidikan moral hubungan manusia dengan semesta adalah menjaga kelestarian alam. Selain itu, menurut Rukiyati (2017), pendidikan moral yang utama adalah pendidikan melalui agama yang didasari rasa toleransi. Oleh sebab itu, semakin tinggi pendidikan seorang anak, maka akan semakin meningkat pertumbuhan delinkuensi anak jika tidak diiringi dengan pendidikan moral yang baik dalam pendidikan formal maupun non formal.

Variabel yang signifikan lainnya adalah logaritma natural dari pengeluaran per kapita riil. Pengeluaran per kapita adalah salah satu indikator untuk melihat keadaan ekonomi suatu wilayah. Variabel pengeluaran per kapita signifikan dan sesuai dengan teori Farrington (dalam Heilburn, 2005) yang menyebutkan bahwa keadaan ekonomi memengaruhi perilaku delinkuensi anak. Pertumbuhan tingkat delinkuensi anak akan turun sebesar 2.1347 ketika pengeluaran per kapita meningkat sebesar satu persen dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa lingkungan dengan ekonomi yang buruk akan memengaruhi psikologis anak. Anak akan cenderung memperoleh pendidikan yang buruk, pengasuhan anak yang buruk serta hubungan antara orang tua dan anak yang tidak dekat. Hal ini disebabkan karena orang tua akan fokus pada pencarian nafkah, sehingga masalah ini akan semakin memburuk ketika anak hanya diasuh oleh ibu tunggal.

Variabel terakhir yang berpengaruh secara signifikan adalah persentase remaja berusia 13-15 tahun yang mengakses internet. Arah hubungan variabel ini positif atau sesuai dengan teori, yaitu semakin tinggi persentase anak yang mengakses internet, maka akan semakin tinggi juga pertumbuhan tingkat delinkuensi anak. Saat anak yang mengakses internet naik satu persen, maka pertumbuhan tingkat delinkuensi anak akan meningkat sebesar 0,0591 dengan asumsi bahwa variabel lain adalah tetap atau konstan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa media menjadi pemberi pengaruh pada anak-anak di era digital. Seperti saat ini, anak-anak dengan mudah mengakses video tentang kekerasan dan tayangan-tayangan yang tidak pantas untuk ditonton. Menurut Baron (2011), terdapat dua pengaruh media terhadap

perilaku agresif seseorang. Pengaruh pertama adalah hilangnya rasa simpati terhadap perilaku agresif yang dilakukan orang lain dan menganggap perilaku tersebut adalah perilaku yang biasa karena seringnya melihat tayangan di media. Pengaruh kedua adalah dapat terjadi *copy crime*, yaitu meniru kejahatan karena tayangan di media. Selain itu, Siegel dan Welsh (2011) menyebutkan bahwa perekrutan geng-geng kriminal dan jual beli narkoba kebanyakan dilakukan melalui akses internet. Solusi dari hasil penelitian ini adalah kontrol baik oleh pemerintah, orang tua, maupun peningkatan kesadaran dari anak untuk menggunakan internet secara bijak. Pembatasan situs-situs yang mengandung tindak kekerasan dan pornografi oleh pemerintah juga harus dilakukan. Namun yang tidak kalah penting adalah penanaman nilai kesadaran dari dalam diri anak sendiri, karena diri sendiri merupakan kontrol terbaik dari hal-hal negatif.

Koefisien gini yang menggambarkan ketimpangan di suatu wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah delinkuensi anak. Penyebab dari ketidaksignifikanan variabel koefisien gini, menurut Robert Merton dalam Strain Theory, adalah meskipun dalam suatu masyarakat terdapat tujuan dan kepentingan bersama, namun stratifikasi kelas ekonomi juga tetap ada. Anak-anak dari keluarga dengan tingkat ekonomi atas memperoleh akses yang baik terhadap pendidikan, sehingga mereka dapat mencapai kesuksesan dengan cara-cara yang disetujui oleh masyarakat. Masyarakat yang berada dalam tingkat ekonomi bawah tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, sehingga mereka melakukan dua hal, seperti memilih cara yang menyimpang untuk mencapai kesuksesan dan menolak tujuan yang telah diterima secara umum oleh

masyarakat dan membuat tujuan sendiri. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan koefisien gini, yaitu indikator ketimpangan yang dilihat dari sisi ekonomi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan teori Strain adalah pemerataan di bidang ekonomi tidak menjadi hal yang terpenting, tetapi pemerataan di bidang pendidikan, karena pendidikan akan memperbaiki kualitas ekonomi, sedangkan pemerataan ekonomi yang tidak diiringi pemerataan pendidikan tidak akan berhasil dan bertahan lama.

Selain koefisien gini, persentase penduduk dengan status cerai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah delinkuensi anak. Hal ini bertentangan dengan beberapa teori yang menyatakan bahwa perceraian orang tua secara signifikan memengaruhi pertumbuhan tingkat delinkuensi anak. Namun dalam Siegel dan Welsh (2011), signifikansi perceraian terhadap delinkuensi akhir-akhir ini memang menjadi perdebatan bagi para peneliti karena dalam struktur keluarga modern seperti saat ini, perubahan struktur keluarga sudah lazim terjadi di masyarakat. Permasalahan yang sebenarnya adalah peran dari setiap fungsi dalam keluarga. Penelitian menyebutkan bahwa anak yang diasuh dalam keluarga yang bercerai, namun tetap mendapatkan kasih sayang kedua orang tua dan pendidikan dari orang tua yang baik, akan cenderung tidak terlibat dalam tindakan delinkuensi. Selain perceraian, konflik yang terjadi dalam keluarga juga berpengaruh terhadap perilaku anak. Tidak semua konflik di dalam rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perspektif anak terhadap konflik yang terjadi di dalam keluarga berpengaruh terhadap perilaku delinkuensi anak. Kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang didapatkan oleh ibu atau bahkan anak yang menjadi korban, akan menimbulkan perilaku

delinkuensi anak karena anak mencontoh perilaku orang tuanya dan adanya rasa tidak terima atas perlakuan tersebut, sehingga anak melampiaskannya pada hal negatif. Kemudian apakah perceraian lebih baik terjadi? Menurut Kierkus dan Baer (2002), perceraian yang tetap diikuti dengan interaksi yang baik dari orang tua dan anak akan menimbulkan efek yang lebih positif dibandingkan dengan anak yang terpisah dan anak yang mengalami konflik di dalam keluarganya.

Kesimpulan

Delinkuensi anak di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahun. Terdapat perbedaan delinkuensi anak antarprovinsi di Indonesia. Delinkuensi anak yang terjadi di Indonesia didominasi oleh kejahatan dengan klasifikasi kejahatan berat, seperti kasus perlindungan anak (kejahatan dengan korban dan pelaku anak-anak), pencurian, narkoba, dan perampokan.

Variabel yang memengaruhi tingkat delinkuensi anak di Indonesia adalah rata-rata lama sekolah, pendapatan per kapita, dan penggunaan internet. Hal ini berarti bahwa faktor sosial ekonomi wilayah yang memengaruhi tingkat delinkuensi anak adalah kualitas pendidikan atau ketimpangan pendidikan antarwilayah, keadaan ekonomi suatu wilayah, dan perubahan lingkungan sosial yang direpresentasikan dengan penggunaan internet atau media.

Meskipun temuan dari penelitian menyatakan pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat delinkuensi anak, bukan berarti kita harus mengurangi tingkat pendidikan karena sudah seharusnya setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan. Satu hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan, terutama

pendidikan moral dan ahlak yang harus ditanamkan sejak pendidikan dasar.

Media, terutama internet, sudah dianggap sebagai tren dan harus diikuti, sehingga peran dari masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan pengawasan penggunaan internet di kalangan anak-anak sangat diperlukan, misalnya menutup situs-situs yang mengandung unsur kekerasan dan membatasi situs-situs dewasa agar tidak mudah diakses oleh anak di bawah umur.

Mengingat terbatasnya data terkait delinkuensi anak, survei khusus diperlukan, terutama survei terkait perilaku delinkuensi secara menyeluruh dengan sampel yang diambil dari setiap provinsi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik RI. 2015. *Profil Anak 2015*. Jakarta: BPS RI Subdit Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Badan Pusat Statistik RI. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia 2011*. Jakarta: BPS RI Subdit Analisis Statistik.
- Badan Pusat Statistik RI. 2016. *Statistik Kriminalitas Indonesia*. Jakarta: BPS RI Subdit Politik dan Kriminalitas.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/BAPPENAS. 2010. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2025*. Jakarta: BPS RI Subdit Statistik Sosial.
- Baron, R. A. & Byrne, D. 2005. *Psikologi Sosial. Jilid 2*. Jakarta : Erlangga.
- Boys, A., Marsden, J. and Strang, J. 2001. "Understanding reasons for drug use amongst young people: a functional perspective". *Health Education Research* 16: 457-469.
- Hadisuprpto, Paulus. 2008. *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangan*. Jakarta: Bayumedia Pub.
- Heilburn, Kirk. 2005. *Juvenile Delinquency: Prevention, Assessment, and Intervention*. Oxford University Press
- Hemenway, David dan Sara J. Solnick. 2015. "The epidemiology of self-defense gun use: Evidence from the National Crime Victimization Surveys 2007–2011". *Preventive Medicine*: 79, 22-27.
- Kierkus, C. A., & Baer, D. 2002. "A Social Control Explanation Of The Relationship Between Family Structure And Delinquent Behaviour". *Canadian Journal of Criminology*: 44(4), 425-458.
- KPAI. 2017. "Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus". <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>. Diakses pada 25 November 2019.
- Levitt D., Steven dan Lochner, Lance. 2001. *The Determinant of Juvenile Crime*. Chicago: University of Chicago.
- Lochner, Lance. 2007. *Education and Crime*. Ontario: University of Western Ontario Press.
- Lochner, Lance dan Enrico, Morreti. 2003. *The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrest, and Self Reports*. British Columbia: UCLA.
- Mc. Cord, Joan et.al. 2001. *Juvenile Crime Juvenile justice*. Washington DC: National Academy Press.
- Putro, Y. Hardjo. 2016. "Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu". <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720>, diakses 14 Mei 2017.
- Ronald. 2016. "Bocah 5 Tahun Digilir oleh Teman-Temannya di Rumah Kosong", <https://www.merdeka.com/peristiwa/>, diakses 15 Mei 2017.

- Rukiyati. 2017. "Pendidikan Moral di Sekolah".
Jurnal Humanika Th XVII 2017 :70-80
- Siegel, J Larry and Brandon C. Welsh. 2011.
Juvenile Delinquency: The Core. 4th Edition.
Belmont USA: Wadsworth CENGAGE
Leraning.
- Sugiartyanti. 2010. *Perilaku Bullying pada
Anak dan remaja.* Semarang: Intuisi Press.
- Unayah, Nunung dan Muslim, Sebariasman.
2015. *Fenomena kenakalan remaja
dan Kriminalitas.* Jakarta: Puslitbang
Kemensos RI.
- United Nation. 2004. *World Youth Report 2003.*
Chapter Seven: Juvenile Delinquency.
New York: United Nation Publication.
- UNODOC (United Nations Office on Drugs
and Crime) dan EUNI (European Institute
for Crime and Prevention Control). 2010.
*International Statistics on Crimes and
Justice.* Helsinki: HEUNI Publication.
- Whitesel et.al. 2013. "Familial, Social, and
Individual Factors Contributing to Risk for
Adolescent Substance Use". *Journal of
Addiction* 2013, 9-19.

Determinan Perempuan Keluar dari Praktik *Kawin Anum* Suku Banjar

Norma Yuni Kartika¹, Muhajir Darwin², dan Sukamdi³

¹Program Doktor Studi Kependudukan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ³Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Norma Yuni Kartika (e-mail: norma.yuni.k@mail.ugm.ac.id)

Abstrak

“Kawin anum” dalam bahasa Banjar berarti perkawinan di bawah 16 tahun. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan praktik *kawin anum* yang dipraktikkan oleh 90,26 persen penduduk perempuannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui determinan perempuan keluar dari praktik *kawin anum* Suku Banjar. Penelitian ini menggunakan desain *sequential explanatory method*. Tahap pertama adalah melakukan survei terhadap 127 responden yang terdiri atas 37 perempuan yang menikah di bawah 16 tahun (pelaku *kawin anum*) dan 90 perempuan yang menikah pada usia 16-30 tahun, dan kemudian hasil analisis tahap pertama dieksplorasi lebih lanjut pada tahap kedua dengan metode kualitatif. Pada tahap kedua, informan dipilih berdasarkan hasil analisis tahap pertama dan 14 perempuan yang menolak desakan untuk segera menikah, 14 orang tua dan 9 *stakeholders*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang menjadi determinan perempuan keluar dari praktik *kawin anum*, yaitu variabel individual (berpendidikan tinggi dan bekerja), interpersonal (tingkat ekonomi keluarga asal perempuan tinggi), institusional (syarat menikah sudah memiliki kartu tanda penduduk) dan sosial (memenuhi syarat usia minimal resmi yang diijinkan untuk menikah menurut undang-undang perkawinan).

Kata kunci: determinan; perempuan; keluar; *kawin anum*

Determinants Women Out of Kawin Anum Practices in Banjar Tribe

Abstract

Kawin anum in local language of Banjar means that a marriage conducted those who are under 16 years old. The research of *kawin anum* is located in Raya Belanti Village, Binuang District, Tapin District, South Kalimantan Province where *kawin anum* was practiced by 90.26 percent of female residents. The purpose of this study was to find out the determinants of women who got out of *kawin anum* practice in Banjar Tribe. This study uses a sequential explanatory method design. The first stage was conducting a survey to 127 respondents, consisted of 37 women married under 16 (perpetrators of *kawin anum*) and 90 women who were married at the age of 16-30 years. The results of first phase of analysis were further explored in the second stage using a qualitative method. For the second stage, the informants were chosen based on the results of the first phase analysis and 14 women who refused the urge to get married immediately, 14 parents and 9 stakeholders were selected. The results showed that there were four variables which were the determinants of women getting out of *kawin anum* practices, namely individual variables (highly educated and working women), interpersonal (women came from families with high level of economy), institutional (to get married, one must had an identification card) and societal (has fulfilled the minimum legal age requirements in order to be permitted to marry according to marriage law).

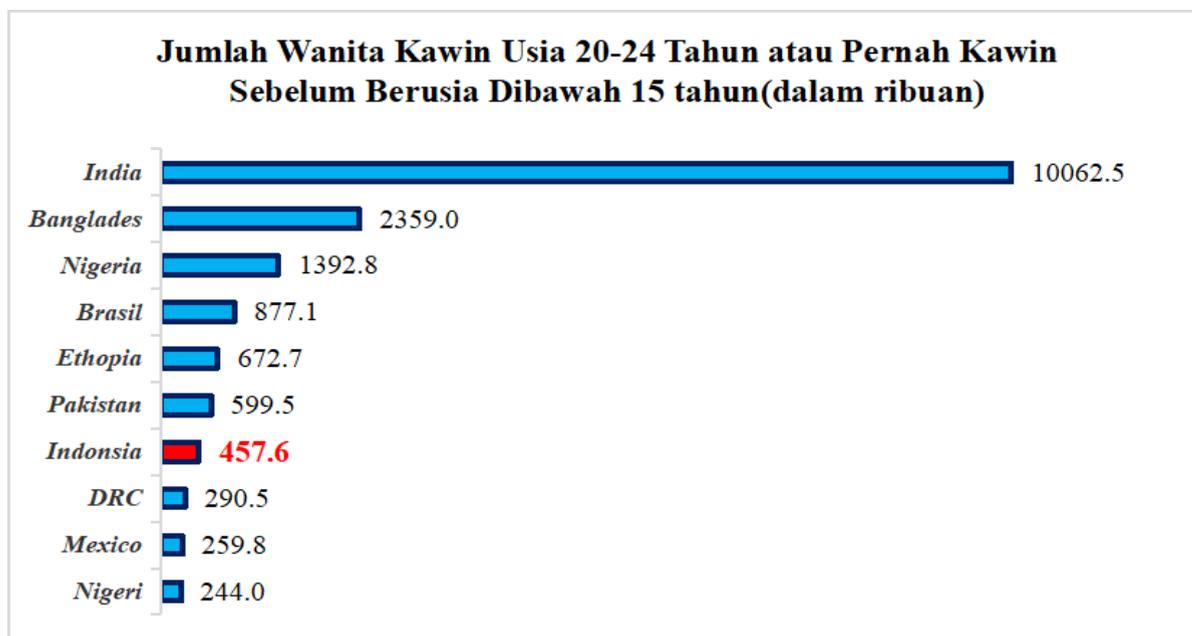
Keywords: determinants; women; getting out of; *kawin anum*

Pendahuluan

Fenomena perkawinan usia dini, perkawinan anak, dan perkawinan paksa di beberapa negara pada skala global atau beberapa provinsi khusus di Indonesia sudah berlangsung lama. Fenomena tersebut ada yang telah mengalami transisi yang tercermin dengan usia kawin pertama yang semakin dewasa dan ada yang masih *langgeng* yang telah membudaya hingga sekarang. Dampak dari perkawinan usia dini, perkawinan anak, dan perkawinan paksa adalah merugikan pihak perempuan, laki-laki, anak yang dilahirkan maupun keluarga, bahkan dampaknya lebih luas dari semua itu hingga merambah ke masyarakat, pemerintah dan negara.

Riset mengenai usia kawin pertama telah dilakukan dari berbagai dimensi, antara lain budaya, perilaku, kependudukan, sosial, psikologis, kesehatan, dan ekonomi. Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa usia kawin pertama menjadi isu yang penting dalam kebijakan kependudukan. Pentingnya usia perkawinan pertama berhubungan dengan pengendalian jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran. Selain itu, usia kawin pertama juga merupakan variabel penting dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Permasalahan yang sangat penting mengenai usia kawin pertama adalah tingginya insiden pernikahan usia dini. Berdasarkan data Profil Anak Indonesia 2018 (KPPPA dan BPS, 2018), yang dimaksud dengan



Sumber: Statistics and Monitoring Section, Division of Policy and Strategy (UNICEF, 2013; dalam KPPPA dan BPS, 2018)

Gambar 1. Jumlah Wanita Kawin Usia 20-24 Tahun atau Pernah Kawin sebelum Berusia di bawah 15 tahun

perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun. Pada kenyataannya, masih banyak dijumpai anak-anak di bawah 15 tahun yang telah melakukan pernikahan, bahkan mengalami perceraian. Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan sebelum usia 15 tahun tertinggi ketujuh di dunia setelah India, Bangladesh, Nigeria, Brasil, Ethiopia, dan Pakistan (Gambar 1).

Sebenarnya secara normatif, telah muncul regulasi yang mengatur tentang batas usia kawin. Usia resmi minimal menikah di Indonesia yang tertuang pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebelum adanya perubahan menjadi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa diizinkan perkawinan oleh orang tua jika sekurang-

kurangnya pihak laki-laki telah berusia 19 dan pihak perempuan berusia 16. Pasal ini sangat kontroversial sebab batasan tersebut secara tidak langsung melegalisasi praktik perkawinan usia anak. Pada sisi yang lain batasan tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak karena anak terlalu muda untuk membuat keputusan tentang pasangan perkawinan mereka atau tentang implikasi dari perkawinan itu sendiri.

Salah satu isu besar terkait dengan tingginya insiden perkawinan anak adalah aspek kultural. Aspek kultural menjadi penyebab langgengnya praktik perkawinan usia anak di Indonesia karena masih ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa semakin cepat menikah semakin baik bagi seorang perempuan. Dari sisi budaya, di beberapa daerah di Indonesia, khususnya

daerah terpencil, menikah di usia muda adalah hal yang umum dilakukan dan bukan hal yang tabu meskipun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan (KPPPA dan BPS, 2018). Hal ini tercermin dari Gambar 1 dimana terdapat 457,6 ribu perempuan Indonesia usia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 15 tahun dan hal tersebut melanggar usia resmi minimal untuk menikah menurut undang-undang perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan konsisten dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) yang di dalamnya menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal itu berarti usia minimal perempuan menikah pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, tidak termasuk usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

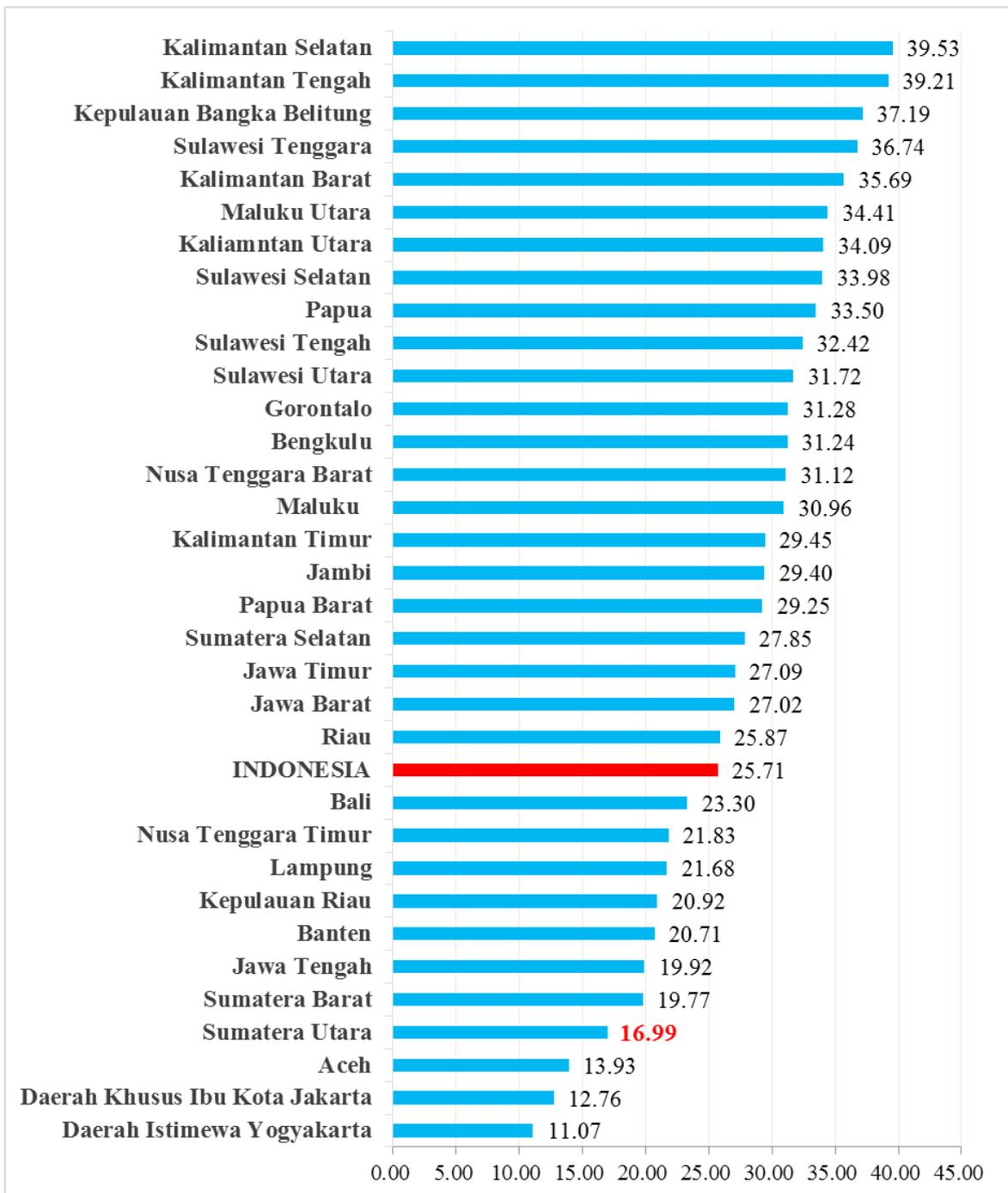
Implikasi perkawinan usia anak pada umumnya dialami lebih banyak oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Beberapa implikasinya adalah pada kesehatan reproduksi, intelektual, kualitas keluarga, psikologis dan psikososial, keharmonisan keluarga, perceraian, kawin ulang, pelanggaran hak anak, serta perempuan (Kasto, 1982; Santhya, 2010; PSKK UGM dan PLAN, 2011; BPS dan UNICEF, 2016; KPPPA dan BPS, 2018). Berdasarkan data BPS (2017) diketahui bahwa persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah

kawin yang umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun menurut Provinsi Tahun 2017 tertinggi adalah provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 39,53 persen (Gambar 2).

Tingginya kasus perkawinan usia anak di Kalimantan Selatan berkaitan dengan praktik *kawin anum* yang masih dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Suku Banjar. Praktik *kawin anum* pada suku Banjar merupakan faktor yang mengganggu perkawinan usia anak. *Kawin anum* adalah perkawinan pertama yang dilakukan seseorang di bawah usia 16 tahun. Tingginya persentase perkawinan usia anak menurut hasil penelitian Nasution (2016) disebabkan oleh praktik *kawin anum* pada suku Banjar, antara lain karena orang tua ingin cepat menikahkan anaknya supaya anak mereka tidak disebut *bujang tua*.

Dari 924 pasangan usia subur di Kelurahan Raya Belanti, terdapat 90,26 persen perempuan yang menikah di bawah 16 tahun atau menjadi pelaku praktik *kawin anum* dan hanya 9,74 persen yang menikah di atas 16 tahun. Tingginya kasus *kawin anum* di Kelurahan Raya Belanti menyebabkan hanya ada 1 dari 10 perempuan yang tidak mempraktikkan *kawin anum*. Hal itu membawa konsekuensi negatif yang harus diemban tidak hanya perempuan tersebut, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Kawin anum yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pelanggaran terhadap praktik perkawinan usia anak yang membuat tujuan ke lima *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dengan target yaitu terhapusnya segala praktik yang membahayakan seperti



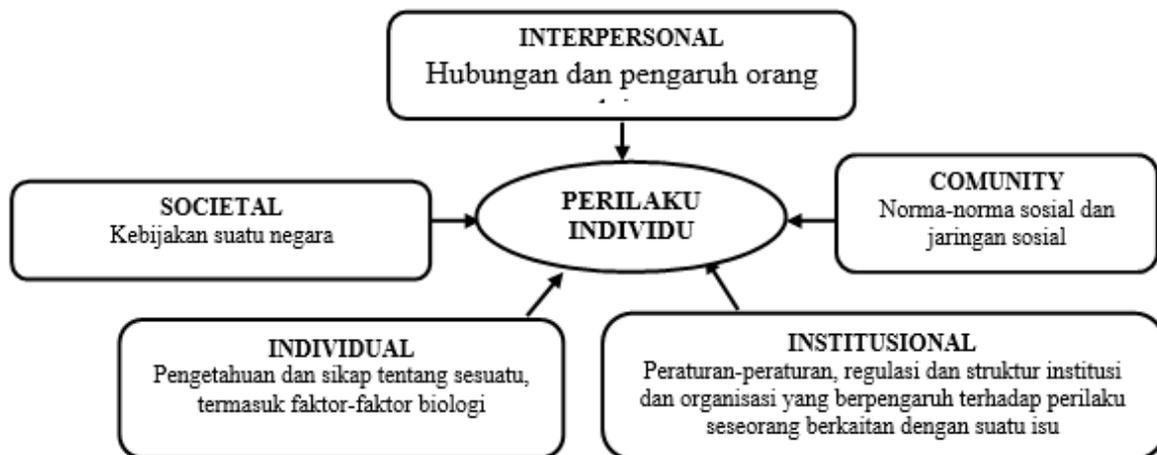
Sumber: BPS (2017)

Gambar 2. Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun yang Pernah Kawin yang Umur Kawin Pertamanya di Bawah 18 Tahun menurut Provinsi Tahun 2017

perkawinan anak sulit terwujud. Di antara mayoritas perempuan yang mempraktikkan *kawin anum* di Kelurahan Raya Belanti, terdapat perempuan-perempuan yang mampu keluar dari praktik *kawin anum*. Insiden perempuan yang mampu keluar dari praktik *kawin anum* ini belum pernah diteliti, sehingga hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam terkait determinan perempuan keluar dari praktik *kawin anum* yang ada di daerahnya.

Penelitian ini menggunakan teori *social ecological framework* untuk menjelaskan determinan perempuan keluar dari praktik *kawin anum* suku Banjar. Teori *Social Ecological Framework* (SEF) adalah pengembangan dari teori ekologi Bronfenbrenner yang dikemukakan oleh Urie Bronfenbrenner. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi *multiple factors* yang memengaruhi penerimaan dan perilaku individu (Mc Leroy, et al., 1988). Kerangka *Social-ecological Framework* memiliki lima tingkatan (level), yaitu (1) *The individual level* (level individu), yaitu pengetahuan

dan sikap tentang sesuatu, termasuk faktor-faktor biologi; (2) *The interpersonal level* (level interpersonal), yaitu hubungan dan pengaruh orang lain; (3) *The community level* (level masyarakat), termasuk norma-norma sosial dan jaringan sosial; (4) *The institutional level* (level institusi), yang menyangkut peraturan-peraturan, regulasi dan struktur institusi dan organisasi yang berpengaruh terhadap seseorang untuk memilih atau berperilaku yang spesifik berkaitan dengan suatu isu atau situasi terkait isu tertentu; (5) *The societal level* (level negara), yang menyangkut kebijakan suatu negara yang memengaruhi perilaku seseorang. *Multiple factors* dalam teori *social ecology framework* pada penelitian ini mampu menjelaskan perilaku perempuan untuk keluar dari praktik *kawin anum* yang terdiri atas lima level. Dua level di antaranya adalah *society* dan *institusional* yang berhubungan dengan kebijakan dan undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia, serta tiga level lainnya merupakan faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi keputusan perempuan,



Sumber: Mc Leroy, et.al., 1988

Gambar 3. Kerangka Teori Sosial Ekologi Framework

sehingga akhirnya keluar dari praktik kawin anum.

Metode

Explanatory sequential mixed methods (Creswell, 2010) adalah metode yang digunakan dalam kajian ini. Penelitian terdiri atas dua tahap, yaitu tahap pertama menggunakan metode survei, dan tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Pada metode survei, seluruh perempuan yang memenuhi kriteria dijadikan responden. Responden dalam penelitian ini berjumlah 127, yang terbagi dalam dua kriteria, yaitu

: (1) perempuan dengan usia perkawinan pertama di bawah 16 tahun sebanyak 90 responden, (2) perempuan dengan usia perkawinan pertama 16-30 tahun sebanyak 37 responden. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner.

Dalam penelitian ini, usia kawin pertama dibagi menjadi dua kategori, yaitu dibawah 16 tahun dan 16-30 tahun. Penentuan rentang usia kawin pertama di bawah 16 tahun disebut juga praktik *kawin anum*. Sedangkan, usia perkawinan pertama 16-30 dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa usia 16 tahun ke atas sudah bukan merupakan *kawin anum* dan batas 30 tahun disesuaikan

Tabel 1. Hasil Uji *Chi-Square* Variabel yang Mempengaruhi Perempuan Keluar dari Praktik *Kawin Anum*

No	Variabel	Tipe Perkawinan				Nilai X ² Hitung	Df	Nilai X ² Tabel	Nilai Sig.
		Keluar dari praktik <i>Kawin Anum</i>		<i>Kawin Anum</i>					
		n	%	n	%				
	Daerah Asal					1,258	1	3,84	0,262
	Penduduk Asli	70	77,78	32	68,49				
	Pendatang	20	22,22	5	13,51				
2.	Pendidikan					16,248*	1	3,84	0,000*
	Tamat SD	43	47,78	32	86,49				
	Tamat SMP	47	52,22	5	13,51				
3.	Kegiatan Utama					4,716*	1	3,84	0,030*
	Bekerja	60	66,67	17	45,95				
	Tidak Bekerja	30	33,33	20	54,05				
4.	Tingkat Ekonomi RT Asal					14,952*	2	5,99	0,001*
	Rendah	20	22,22	20	54,05				
	Sedang	53	58,89	9	24,32				
	Tinggi	17	18,89	8	21,62				
5.	Pekerjaan KRT					4,284	1	3,84	0,038
	Pertanian	65	72,22	33	89,19				
	Non Pertanian	25	27,78	4	10,81				

Sumber: Data Primer, 2017

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Regresi Logistik Linier Variabel yang Mempengaruhi Perempuan Keluar dari Praktik Kawin Anum

Variabel	Odds Ratio (OR)	Koefisien (B)
Pendidikan	7,1	1,961
Kegiatan Utama	3,1	1,128
Tingkat Ekonomi Rumah Tangga Asal	1,4	0,351
R ²	0,261	
Nilai Signifikan (P)	0,000	

Sumber: Data Primer, 2017

dengan saran BKKBN untuk usia reproduksi terbaik perempuan, yaitu maksimal 30 tahun untuk hamil dan bersalin.

Informan pada tahap kualitatif dipilih berdasarkan hasil survei, terdiri atas (1) empat belas perempuan yang menolak desakan untuk segera menikah, (2) empat belas orang tua perempuan yang menolak desakan untuk segera menikah, (3) sembilan stakeholders terkait tema penelitian. Data penelitian kualitatif menggunakan beragam sumber data yaitu *indept interview*, observasi, dan data sekunder. Analisis metode kuantitatif dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan *chi-square* dan uji regresi logistik linier. Analisis metode kualitatif digunakan untuk memperdalam analisis data kuantitatif.

Pembahasan

Dalam penelitian ini dilakukan uji statistik *chi square* untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara variabel bebas, yaitu faktor yang mempengaruhi perempuan keluar dari praktik *kawin anum* (daerah asal, pendidikan, kegiatan utama, tingkat ekonomi rumah

tangga asal perempuan dan pekerjaan kepala rumah tangga) dengan variabel terikat (keluar dari praktik *kawin anum*). Uji *chi-square* (X^2) dalam penelitian ini dengan tingkat kemaknaan X^2 tabel $<0,005$.

Berdasarkan Tabel 1, pendidikan, kegiatan utama, dan tingkat ekonomi rumah tangga asal perempuan mempunyai perbedaan bermakna terhadap perempuan yang keluar dari praktik *kawin anum*. Variabel daerah asal menunjukkan nilai *chi-square* hasil perhitungan lebih besar dari harga kritik, sehingga tidak terdapat perbedaan bermakna dengan perempuan yang keluar dari praktik *kawin anum*. Pekerjaan kepala rumah tangga tidak memenuhi persyaratan uji *chi-square* karena nilai frekuensi harapan kurang dari 5. Selanjutnya, variabel pendidikan, kegiatan utama dan tingkat ekonomi rumah tangga asal perempuan di uji menggunakan analisis regresi logistik linier dengan tingkat kemaknaan $p < 0,005$ (Tabel 2).

Berdasarkan nilai R² pada Tabel 2, diketahui bahwa variabel pendidikan, kegiatan utama dan tingkat ekonomi rumah tangga asal perempuan menyebabkan perempuan keluar dari praktik *kawin anum* Suku Banjar

sebesar 26,1 persen. Hasil uji regresi logistik linier memberikan gambaran nyata dan teruji bahwa perempuan yang lulus SMP, bekerja dan berasal dari rumah tangga dengan ekonomi tinggi menyebabkan perempuan keluar dari praktik *kawin anum*.

Individual

a. Pendidikan

Perempuan dengan pendidikan lulus SMP, 7,1 kali cenderung mampu keluar dari praktik *kawin anum* (Tabel 2). Semakin tinggi capaian pendidikan perempuan akan semakin tinggi usia kawin pertamanya. Semakin lama perempuan berada dalam bangku sekolah, akan semakin mampu mereka untuk keluar dari praktik *kawin anum*. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian-penelitian di Indonesia, seperti oleh Sukamdi, Yuarsi, dan Tamtiari (1997), Choe, *et.al.* (2001), PSKK UGM dan PLAN (2011), Indrayani dan Sjafii (2012), Utina, dkk. bekerja sama dengan BKKBN dengan IPADI (2014), BPS (2017), KPPPA dan BPS (2018) mendukung hipotesis yang dikemukakan oleh Bogue, Yaukey dan Thorsen, dan Smith. Hipotesis tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor yang cukup dominan dalam menentukan usia kawin seorang perempuan. Dalam penelitian ini, pendidikan merupakan faktor utama yang mampu membuat perempuan keluar dari praktik *kawin anum*.

Salah satu solusi agar perempuan keluar dari praktik *kawin anum* adalah dengan pencapaian program wajib belajar dua belas tahun yang bertujuan untuk menekan berbagai perbedaan alami dari kelompok masyarakat yang ada, seperti perbedaan gender, karakteristik wilayah, tingkat ekonomi, etnik, agama, status sosial,

dan budaya. Asumsinya, jika perempuan mampu mencapai wajib belajar dua belas tahun berada di bangku sekolah dari usia 16 hingga 18 tahun, sehingga tidak akan mempraktikkan *kawin anum*. Pendidikan diharapkan dapat menghilangkan semua perbedaan itu. Tujuan wajib belajar yang tercantum pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 adalah memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Apabila program wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun sukses dan dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa memandang gender, perbedaan karakteristik wilayah, strata ekonomi, etnik, agama, sosial, dan budaya, diharapkan usia perkawinan dapat ditunda. Dalam penelitian Sukamdi, Yuarsi dan Tamtiari (1995), jika banyak anak masuk sekolah di tingkat SMA, maka mereka akan mendapat pengetahuan mengenai keluarga dan kesehatan reproduksi sehingga semakin banyak anak yang mengerti tentang kesehatan reproduksi dan hak-haknya. Dengan pengetahuan yang diperoleh di sekolah, mereka diharapkan dapat menunda usia perkawinan pertama hingga mencapai usia dewasa secara fisik, psikologi, dan ekonomi. Berikut adalah ungkapan dari informan perempuan satu-satunya yang keluar dari praktik *kawin anum* dengan pendidikan sebelum menikah sarjana (S1).

“...kada handak lakas kawin kaya kekawanan, makanya bepadah lawan kuitan handak kuliah. Alhamdulillah diizinkan. Imbah lulus MAN lalu ae kuliah di Banjarbaru. Sengaja kuliah maraga takutan mun imbah tuntung MAN kena

dikawinakan. Rancak sudah menolak orang bedatang, kena dikira orang kehaharatan, baik kuliah sama sekali". (...tidak ingin cepat menikah seperti teman-teman, makanya bilang dengan orangtua pengen kuliah. Alhamdulillah diizinkan. Setelah lulus MAN kemudian kuliah di Banjarbaru. Sengaja memilih kuliah karena takut setelah lulus MAN nanti dinikahkan. Sudah sering menolak orang melamar, nanti dikira orang sombong, lebih baik kuliah).

Pendidikan berpengaruh terhadap perilaku manusia sehingga manusia bersedia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tradisional secara bertahap, termasuk kebiasaan praktik *kawin anum*. Informan ini menjadi perempuan satu-satunya yang berpendidikan paling tinggi karena lebih memilih kuliah. Duza dan Baldwin (1977) menyatakan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, perubahan dari kebutaaksaraan secara massal menjadikan penduduk yang dapat membaca dan menulis mengakibatkan perubahan yang lebih mencolok dibandingkan dengan perubahan yang diharapkan, terutama dalam kaitannya dengan umur perkawinan (Indonesia, 1980 dalam Kasto, 1982).

b. Bekerja

Faktor kedua yang memengaruhi perempuan keluar dari praktik *kawin anum* adalah bekerja. Perempuan yang bekerja, 3,1 kali lebih mampu keluar dari praktik *kawin anum* (Tabel 2). Faktor pengalaman bekerja menjadi salah satu faktor penundaan usia kawin pada perempuan. Para perempuan yang pernah bekerja sebelum kawin, rata-rata usia perkawinannya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja. Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja akan dapat menunda usia kawin pertama (Dixon, 1971;

Potts & Selman, 1979; Abdurahman, 1987; Kasto, 1982; Sukamdi, Yuarsi dan Tamtiari 1995; Hanum, 1997; Jones, 2001). Mereka yang bekerja mempunyai rata-rata usia kawin yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Berikut adalah ungkapan dari informan perempuan yang keluar dari praktik *kawin anum* dengan cara bekerja.

"...imbah tuntung sakulah, mun bagana haja dirumah pacangan kada lawas dikawinakan. Mun sudah kawin nih susah mun handak becarian sorang, nyata dah tepatak dirumah meurus laki lawan anak. Baik sorang begawi, becari pengalaman banyak-banyak, puas-puasan dulu tempulu anum, berbakti lawan kuitan hanyar kawin. Bila handak lakas beduit nyata dah pilihannya jadi TKW ke Arab. Bahari mikirnya mun pina nyaman kaina perpanjang kontrak, mun sakit bulik. Nang penting bejauh pada kampung anggaran kada lakas dikawinakan". (...setelah selesai sekolah, kalau berdiam saja dirumah tidak lama kemudian pasti dinikahkan. Kalau sudah menikah susah untuk menghidupi diri sendiri yang jelas dirumah mengabdikan kepada suami dan anak. Lebih baik saya bekerja, banyak-banyak mencari pengalaman, dipuaskan dulu mumpun masih muda, berbakti kepada orang tua baru menikah. Jika ingin cepat memiliki uang pilihannya hanya menjadi TKW ke Arab. Dulu mikirnya kalau kerasan memperpanjang kontrak, jika tidak kerasan pulang. Yang penting meninggalkan kampung halaman supaya tidak cepat dinikahkan).

Perempuan yang bekerja, selain memiliki kemandirian ekonomi dan tidak tergantung secara finansial kepada keluarganya maupun

orang lain, akan lebih memiliki kekuatan untuk mengatur hidupnya sendiri termasuk dalam menentukan kapan akan menikah. Di Kelurahan Raya Belanti, perempuan yang belum menikah di saat teman sebayanya sudah menikah dengan alasan sedang bekerja akan dimaklumi, baik perempuan yang masih bekerja di Indonesia maupun menjadi migran internasional, karena daerah penelitian ini juga merupakan daerah kantong tenaga kerja wanita (TKW). Aktivitas seseorang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan usia kawin (Sukamdi, Yuarsi dan Tamtiari, 1995).

Interpersonal

Status ekonomi rumah tangga asal perempuan dalam penelitian ini termasuk dalam variabel interpersonal. Status ekonomi rumah tangga asal perempuan yang tinggi 1,4 kali mampu mendorong perempuan keluar dari praktik *kawin anum* (Tabel .2). Tingkat ekonomi rumah tangga yang tinggi menghapus kerentanan anak, khususnya anak perempuan untuk dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya usia kawin pertama, atau dalam penelitian ini, mampu keluar dari praktik *kawin anum*.

Societal

Terkikisnya praktik *kawin anum* suku Banjar, salah satunya, dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah, yaitu perempuan yang menikah memenuhi syarat usia resmi minimal menikah sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebelum ada perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun“

Usia minimal legal menikah untuk perempuan menurut undang-undang adalah 16 tahun, sedangkan bagi perempuan yang ingin menikah sah secara undang-undang, harus memenuhi syarat minimal usianya di atas 16 tahun. Undang-undang tersebut pada tahun 2019 mengalami perubahan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan syarat usia minimal legal menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Perempuan yang keluar dari praktik *kawin anum* ketika menikah memenuhi syarat usia minimal yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan.

Ada fenomena lain yang menjadi masalah tersendiri ketika usia calon pengantin tidak memenuhi syarat undang-undang perkawinan, yaitu mendaftarkan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama atau menikah secara agama (nikah siri). Berikut adalah salah satu ungkapan dari perempuan yang keluar dari praktik *kawin anum*.

“... *bahari tu pas ulun bekawinan, berataan sudah tuntung dibahas kaya jujuran, tanggal ijab. Dikira kadada halangan jadi beundangan ai sudah jua, mun dihitung umur ulun 16 jadi dipikir kadada masalah. Sakalinya 16 tahun kurang berapa hari kaitu, buhan KUA kada mau mengawinakan maraga umur balum hampai lagi jar. Paksa ae tatap beacara, ditatai sarabanya, naibnya lain orang KUA. Saminggu imbah tanggal ulang tahun ulun yang 16 hanyar kami nikah beasa di KUA anggaran dapat surat*” (dulu waktu saya menikah, semua sudah selesai dibahas seperti *jujuran*,

tanggal ijab, disangka tidak ada lagi masalah jadi menyebar undangan, kalau dihitung umur saya 16 dikira tidak ada masalah. Ternyata 16 tahun kurang berapa hari, pegawai KUA tidak mau menikahkan karena katanya umurnya belum sampai. Terpaksa tetap resepsi, dipajang juga, naibnya bukan dari KUA. Seminggu setelah tanggal ulang tahun saya ke 16 baru kami nikah ulang di KUA supaya mendapatkan surat nikah)

Ditemukan beberapa kasus perempuan yang tidak memenuhi syarat usia minimal legal menikah menurut undang-undang perkawinan memutuskan menikah siri atau menikah secara agama, bahkan tetap melakukan resepsi. Setelah usianya memenuhi syarat, mereka akan menikah ulang di KUA untuk mendapatkan akta nikah. Semua ini berhubungan dengan rendahnya pengetahuan tentang syarat usia resmi minimal perempuan dan laki-laki untuk diizinkan menikah serta pentingnya menikah resmi sesuai undang-undang negara.

Institusional

Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) di daerah penelitian yang juga merupakan tokoh agama mengimbau masyarakat bahwa jika ingin menikahkan anak perempuan, salah satu syaratnya adalah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau telah berusia 17 tahun. Hal ini ternyata berdampak pada usia kawin pertama perempuan di daerah penelitian, yang terbukti dengan persentase tertinggi usia kawin pertama perempuan yang keluar dari praktik *kawin anum* suku Banjar berada di usia 17 tahun. Berikut adalah salah satu ungkapan dari P3N di Kelurahan Raya Belanti.

“... kami padahkan lawan buhannya, bila handak mengawinakan anaknya harus beisi KTP. Angaran tenyaman beurusan. Mun kada kaitu magin banyak lagi nang kawin anum Jadi buhannya wahini bila handak mengawinakan anaknya mehadang 17 tahun dulu. Wahini KTP kada kawa dinaikkan umurnya, apalagi e-KTP lok” (kami katakan pada mereka, bila ingin menikahkan anaknya harus memiliki KTP supaya lebih mudah mengurusnya. Jika tidak begitu, akan lebih banyak lagi yang menikah muda. Jadi mereka sekarang bila ingin menikahkan anaknya menunggu usia 17 tahun dulu. Sekarang KTP tidak bisa dinaikkan umurnya, apalagi e-KTP kan).

Pendapat dari pemangku kebijakan tentang usia resmi minimal perempuan untuk menikah berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, yaitu batas usia diizinkan menikah sekurang-kurangnya 16 tahun untuk pihak perempuan dan 19 tahun untuk pihak laki-laki. Di Kecamatan Binuang, diberitakan usia resmi minimal perempuan untuk menikah adalah 17 tahun. Hal tersebut berimbas pada pendewasaan usia kawin pertama, terutama perempuan yang ingin menikah resmi menurut undang-undang negara. Salah satu informan yang belum menikah berencana menikah di usia 17 tahun karena ingin menikah secara resmi dan memiliki akta nikah, tidak seperti teman sebayannya yang menikah siri dan tidak memiliki surat nikah.

“... wahini mun handak kawin umur harus hampai 17 tahun dulu lawan beisi KTP, hanyar dibariakan buhan KUA kawin, bilanya balum 17 tahun lawan balum beisi KTP paksa ae mehadang hampai umurnya. Kaina bila sudah hampai umurnya lakas meurus KTP, imbah itu kawa nikah di KUA,

kawa beisi surat nikah. Ulun indah nikah siri kaya kekawanan ulun, bila basarakan kadada dapat apa-apa, akte anak bengaran mamanya wara, kasihan anak ulun kena” (sekarang ini apabila hendak menikah usia harus sudah 17 tahun dan memiliki KTP, baru diijinkan pegawai KUA menikah, jika usianya belum sampai 17 tahun dan belum memiliki KTP terpaksa menunggu hingga cukup usianya. Nanti bila usianya sudah cukup segera membuat KTP, setelah itu bisa menikah di KUA, bisa memiliki surat nikah. Saya tidak mau menikah siri seperti teman-teman saya, bila cerai tidak dapat apa-apa, akta anak hanya ada nama ibunya saja, kasihan anak saya nanti)

Di Kelurahan Raya Belanti terdapat 14 RT dengan 4 RT yang semua perempuannya merupakan pelaku praktik *kawin anum*, yaitu RT 11, 12, 13, dan 14. Disamping itu dari keempat RT tersebut tidak ada satupun penduduknya yang lulus SMP/ sederajat. Salah satu informan perempuan yang diwawancarai mengungkapkan bahwa ia bercita-cita akan segera menikah jika telah ada yang melamar meskipun usianya baru 14 tahun.

Kesimpulan

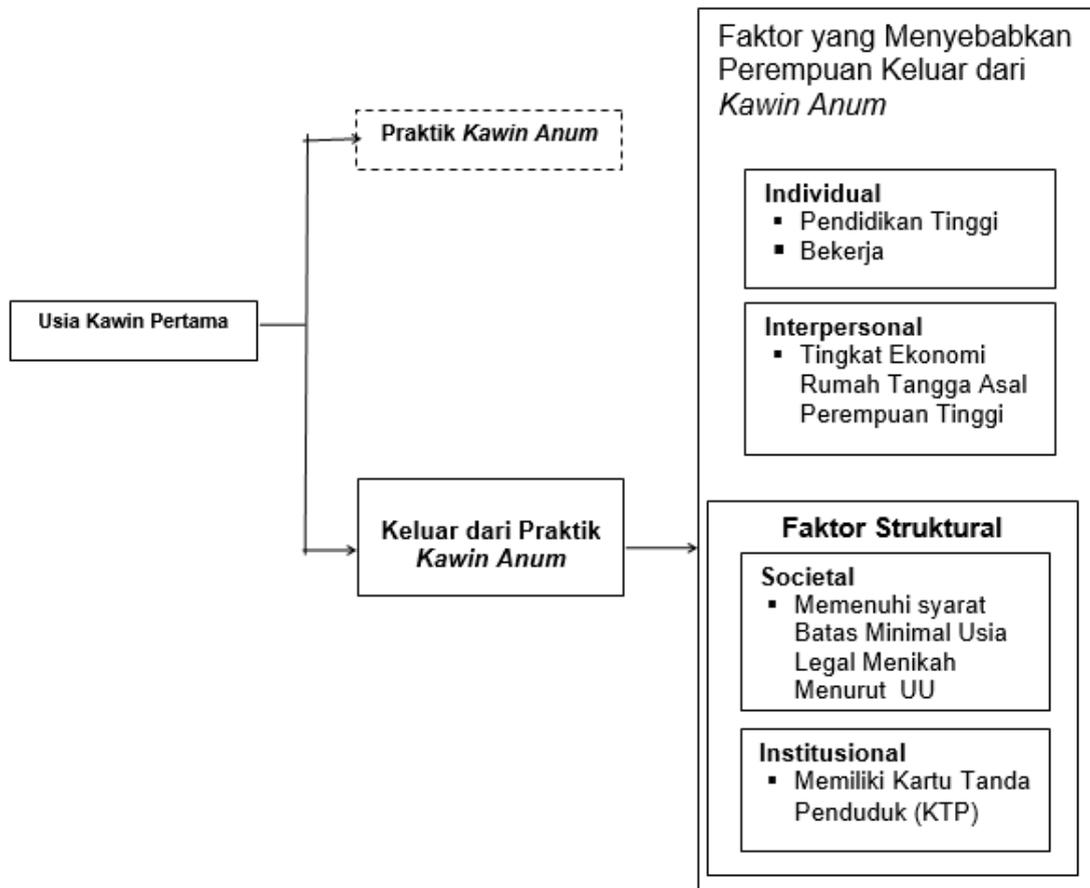
Variabel yang memengaruhi perempuan keluar dari praktik *kawin anum* adalah individual (berpendidikan tinggi dan bekerja), interpersonal (tingkat ekonomi rumah tangga asal perempuan tinggi), institusional (syarat menikah memiliki KTP), dan *societal* (memenuhi syarat usia minimal resmi untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan).

Teori utama yang digunakan untuk menjelaskan alasan perempuan keluar dari praktik *kawin anum* adalah teori

Social Ecological Framework (SEF). Lima variabel yang berpengaruh pada perilaku individu dalam teori SEF adalah individual, interpersonal, community, institusional, dan *societal*. Berdasarkan hasil penelitian dari lima variabel yang ada pada teori SEF, empat variabel yang menjadi faktor yang memengaruhi perempuan keluar dari praktik *kawin anum* adalah variabel individual, interpersonal, *societal*, dan institusional.

Berdasarkan empat variabel yang memengaruhi perempuan keluar dari praktik *kawin anum*, variabel tersebut dibagi lagi menjadi dua aspek, yaitu aspek kultural dan aspek struktural. Aspek kultural yang berpengaruh adalah variabel individual dan interpersonal. Variabel individual yang menyebabkan perempuan keluar dari praktik *kawin anum* Suku Banjar adalah bekerja dan pendidikan. Sedangkan variabel interpersonal yang memengaruhi perempuan keluar dari praktik *kawin anum* Suku Banjar adalah status ekonomi rumah tangga asal perempuan. Aspek kultural yang berpengaruh adalah variabel *societal* dan institusional. Variabel *societal* berkaitan dengan perempuan ketika menikah yang memenuhi syarat usia minimal resmi untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan variabel institusional berkaitan dengan pemberitahuan yang diberikan kepada penduduk bahwa salah satu syarat menikah adalah memiliki KTP.

Teori gender menjelaskan tentang bias yang terjadi pada usia minimal legal perempuan dan laki-laki diizinkan menikah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak sama, dimana laki-laki diizinkan menikah minimal pada usia 19 tahun, sedangkan perempuan pada usia 16 tahun. Bias tersebut tentu



Gambar 4. Hasil Analisis Determinan Perempuan Keluar dari Praktik Kawin Anum Suku Banjar

saja berdampak pada kesehatan reproduksi bagi perempuan yang menikah berdasarkan usia minimal yang diizinkan undang-undang perkawinan. Belum lagi bias usia minimal resmi menikah berdampak pada pemenuhan hak di bidang pendidikan dan peluang dalam dunia kerja. Biar gender tentang batasan usia resmi minimal untuk menikah sudah tidak ditemukan, terhitung sejak 15 November 2019 dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun.

Daftar Pustaka

Abdurahman, Edeng Halim. 1987. “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pada Pola Perkawinan di Jawa Barat”. *Paper* disajikan dalam Pertemuan Ilmiah Faktor-faktor Sosial, Budaya kaitannya dengan Pola Perkawinan. Bandung, Lembaga Penelitian UNPAD, 18 Juli 1987.

Badan Pusat Statistik and UNICEF. 2016. *Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2017. *Perkawinan Usia Anak di Indonesia 2013 dan 2015. Edisi Revisi*. Jakarta: BPS.

- Choe, M.K, Shyam Thapa and Sulistinah Irawati Achmad. 2001. "Early Marriage and Childbearing in Indonesia and Nepal". East-West Center *Working Papers*. Population Series, No.108-15.
- Duza dan Baldwin. 1977. *Nuptiality and Population Study*. New York: The Population Council.
- PSKK UGM dan PLAN. 2011. *Perkawinan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK UGM dan PLAN.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dixon, Rugh B. 1971. Explaining cross culture variation in age at marriage and proportions never marrying. *Population Studies*, 25 (2): 215-233.
- Hanum, Sri Handayani. 1997. *Perkawinan Usia Belia*. Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Indrayani dan Sjafii. 2012. Dampak Pendidikan Bagi Usia Pernikahan Dini dan Kemiskinan Keluarga. *Gemari Edisi 143/Tahun XIII/ Desember 2012*.
- Jones. 2001. "The Demise of Universal Marriage in East and South-East Asia", in the continuing Demographic Transition, ed. Gavin W. Jones, Robert M. Douglas, John C. Caldwell and Rennie d'Souza, Oxford Clarendo Press 1997, pp. 51-79 cited in Jones, G. W., "Which Indonesia Women Marry Younger and Why?", 2001, *Journal of Southeast Asian Studies*, 32 (1), pp. 67-78, February 2001. Printed in the United Kingdom, 2001 The National University of Singapore.
- Kasto. 1982. *Perkawinan dan Perceraian Pada Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) dan BPS. 2018. *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: KPPPA.
- Nasution, Rosramadhana. 2016. "Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom" *Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Potts, Malcolm and Peter Selman. 1979. *Society and Fertility*. London : Mac Donald and Evan.
- Santhya, K. G., Ram, U., Acharya, R., Jejeebhoy, S. J., Ram, F. & Singh, A. 2010. Associations between early marriage and young women's marital and reproductive health outcomes: evidence from India. *International perspectives on sexual and reproductive health*, 132-139.
- Sukamdi, Susi Eja Yuarsi, and Wini Tamtiari. 1995. Tingkat, Pola dan Determinan Usia Kawin Wanita dan Pria. *Journal Populasi Volume 6 Nomor 2*. pp 55-77.
- Utina, Ramli., Baderan, Dewi Wahyuni K., dan Pongoliu, Yuyu Isyana. 2014. *Kajian Faktor Sosial Ekonomi yang Berdampak pada Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Gorontalo*. Kerjasama BKKBN provinsi Gorontalo dengan IPADI provinsi Gorontalo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbaran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Foreign Workers' Roles for Businesses Breakout Process in an Ethnically Themed Market: The Case of Halal Food Markets in Kyoto, Japan

Aris Chandra Pradikta

Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Japan

Correspondence: Aris Chandra Pradikta (email: gr0339he@ed.ritsumei.ac.jp)

Abstract

This article focuses on understanding the connection between the breakout strategies of businesses and the migrant workers' employment opportunities in ethnically themed markets, especially halal food businesses. Accordingly, this research aims to analyze the working sector where migrants are employed. On the one hand, globalized market conditions demand workers with adequate skills and knowledge to work abroad. On the other hand, studies in global cities describe that migrants' working sector tends to serve economic areas that mainly assist similar ethnic customers. In order to address the issue of enclaving occupational activities, this research uses primary data obtained from ethnographic research and analyzes the findings using the existing frame of the breakout process and strategies. The research results show, first, the employment of foreign workers enables Japanese enterprises to reach targeted ethnic clientele by rebranding and remaking the existing products in the market. Moreover, even though these workers have been contributing to the companies' breakout process, their roles cannot assure job security for the long-run. The evidence of this research also implies that in the current globalized market, labor importing practices rely on the dynamics of companies. However, as companies located in a specific location, the opportunity structures -such as local and national law, social discrimination, and market prospects- affect job stability along with migrants' ability to transform their knowledge and skills.

Keywords: breaking-out; entrepreneurs' strategy; ethnically themed market; halal food market; mixed embeddedness

Introduction

The commodification of ethnic symbols has been gaining attention for its contribution to leisure activities and leveraging the city's attraction (Aytar & Rath, 2012). The development of ethnic symbols as a commercial space also often couples with migrant-related phenomena, such as the

enclaving ethnic neighborhood of Chinatown (Zhou, 1992), with its entrepreneurial activities (Light & Gold, 2000). Although, in some Japanese local areas such perspective remains debated, whether benefiting locals or creating social segregation (Maruyama, Woosnam, & Boley, 2017; Maruyama & Woosnam, 2015), the increasing interest in introducing ethnically economic activities

as part of the urban selling points has been taking place widely.

In Kyoto City, more local entrepreneurs are interested in providing goods and services as suppliers in halal food markets. The gaining popularity of the industry goes hand in hand with the tourism sector of the city. In response, local business associations and local governments have been enthusiastically introducing concepts through seminars related to halal, Islamic culture, and business with aims to attract more sellers and tap the market potential¹.

At the same time, the limitation of knowledge among Japanese business owners leads to labor importing practices. As halal food becomes globalized and demands changes in many areas of businesses, the employment of foreign workers is arguably necessary to adjust to current business environments (Akashi, 2014). Foreign workers' employment activities and halal consultation centers established by people with migration background proliferate in the city². It indicates that the opening of business and employment is a possible pathway for economic integration among those categorized as minorities.

Nevertheless, the raised concern is that halal food market phenomena may be similar to other global cities that attract migrants to serve in the industrial area of specific consumer groups (Sassen, 2005). In which, the enclaving of occupations among migrants signal the blocking mobility and indicate many other limitation aspects. The proposed research questions for this research

are to what extent halal food markets can provide employment opportunities? Are the employment activities limited to serve ethnic clientele and compete in economic sectors that have difficulties to grow? What are the roles of migrants in positioning the companies of their working places? In order to locate such discussions, this research pays attention to the breakout concept, which previously elaborated by Rusinovic (2008) and Lasalle and Scott (2018).

Engelen's (2001) notion over the breakout concept pinpoints the migrants' opportunities to enter lucrative areas beyond ethnic niches and middle-men markets. The effort that migrants put for reaching farther than the economy of the niche area is the break out strategy. The application of the breakout concept has been so far concerning migrants' self-employed practices. Breaking-out and self-employment activities are essential to conceive the degree of sustaining livelihood while experiencing discrimination in the labor markets. On the contrary, when exclusion in the mainstream labor markets is lesser, the breakout concept is useful to analyze whether migrants' occupations remain in vulnerable areas or experiencing dynamic mobilities (Edwards et al., 2016).

Informants of this research are people with migration backgrounds employed by Japanese companies. There are five companies and nine foreign workers as the source of information for this research. The five companies' characters are small-medium in size. Meanwhile, among the nine workers, they possess various visa statuses. Two are permanent residents who marry Japanese. Four international students who have been living for more than two years, and the other three are permanent workers who hold short-term employment visa status.

1 Fieldwork attending business seminars: Kyoto city 25 January 2018; Kyoto city 8 February 2018; Osaka city 8 November 2018; Kameoka regency, Kyoto Prefecture, 20 January 2019; Kyoto city 23 January 2019; and Osaka city 14 February 2019 and 22 February 2019.

2 In Kyoto city, there are at least two halal consultation centers that both established by migrants.

Furthermore, the chosen city for conducting this research is through the primary considerations that Kyoto and Osaka are known for their service industries. Even though Tokyo is the center for business and having more dynamics regarding halal food markets; nevertheless, the Kansai area currently follows the development of the Japanese capital city for the halal food industry³.

Hence, this research remains to concentrate in Kyoto city as the unit of analysis. Unlike many other developed cities that use migrants to attract more capital, the number of foreign workers in Kyoto city is relatively moderate⁴. It also implies that foreign workers' employment patterns may follow selective migratory processes. In which, those who move abroad are the one who overcomes barriers, such as capital, language as well as securing settlement in the new place. Therefore, locating the discussion of breaking-out remains focused on the connections between structural opportunities of the market, local companies, and migrants' ability to transform their knowledge and skills.

Data and Methods

The data extraction for this research goes through several phases. Firstly, as there remains a limitation of the exact numbers of foreign workers employed in such kind of market sector, this research proceeds with conducting ethnography research for a year in advance. The fieldwork results are useful to

3 Halal Media Japan categorizes the two cities, Osaka and Kyoto, as adopters. The overall data by Halal Media Japan lists infrastructure, such as place for praying and the availability of halal foods of cities across the country.

4 Data in 2018 shows that the number of foreign workers in Kyoto city is 61,022 people. Meanwhile Tokyo and Osaka have 567,789 and 239,113, respectively.

describe some essential information and find the informants, business locations as well as explaining general conditions.

Furthermore, the selection of informants is through the snowball sampling process. The initial access relies on the observation by attending business seminars and visiting places that marked as Muslim Friendly by the local government⁵. Accordingly, building rapport occurs during dinner and appointment with informants. Semi-structured interviews help to gather information regarding the necessary data, such as the type of consumers, business-related information, migrants' activities, and the prospect of companies. Thirdly, the data obtained from the fieldwork is salient for mapping the typology of markets and explaining the breakout process.

Findings and Discussions

A Brief Description of The Research Field

Halal food refers to what is permissible for consumption among Muslims according to Islamic rules. Previously, business players for this market were mainly ethnic entrepreneurs. There is only a handful of Japanese who are also Muslims. Nevertheless, for the past five years, not only in Kyoto but also in the rest of Japan (Samori et al., 2016; Yusof & Shutto, 2014), there is an increasing consciousness of the demand for consumer goods' productions according to religious ethics.

The flowing information about economic opportunities in that market attracts local governments' attention. At the same time, data compiled by the global financial organization has been monitoring and ranking cities across the globe according to the estimated

5 <https://kyoto.travel/en/muslim/prayer> (accessed in 23 January 2019)

economic transaction of halal food⁶. Those two factors affect the private and public discussion for economic activities, which are previously deemed as less-attractive in many local areas.

Nevertheless, in order to adapt to the current demand in the industry, it requires adjustments that mainly related to employment practices as well as business transformation. As Japan Muslim members are deemed as minority groups, and most are people with migration backgrounds (Sakurai, 2008), this phenomenon alone is a negotiation between market and culture. On the one hand, Japan's unwillingness to use human migration to support the country's economy faces challenges, since the halal food industry is an activity that contains cultural performances, on the other (Bergaud-Blackler, 2004; Fischer, 2016).

Nowadays, the need for supporting capital attractions is essential for the city's management. In Kyoto Prefecture, especially Kyoto City, the local government puts efforts to rebrand local businesses for attracting religious consumers. Among those, there are vegetarian foods, serving halal meat for all of the menus, pork-free, and alcohol-free restaurants, as well as labeling own restaurants with specific halal standards. Local government also engages in marketing of business in this sector and promoting it as Muslim friendly places. It indicates that local authority does not want to miss the economic opportunities.

In this regard, for conceiving the spatial formation of halal food markets, this research follows the definition of a themed market by Rath et al. (2017). Similar characteristics of halal food markets and the development of

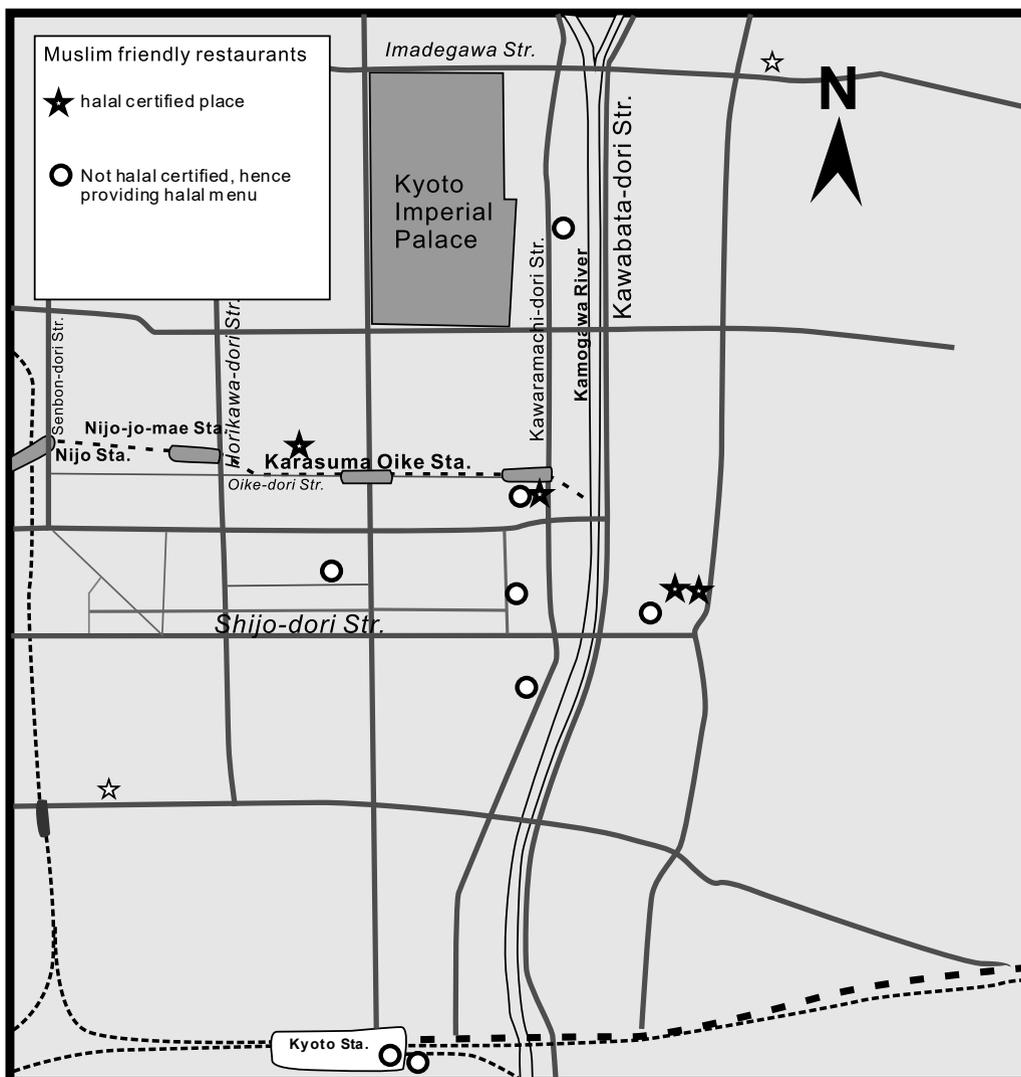
Amsterdam's Chinatown lies on the few points. Firstly, it is rarely an enclaving ethnic economy phenomenon, where people with migration backgrounds are forming economic activities to help their fellow migrants who share similar languages or other social characteristics to survive in a hostile place. Secondly, halal food markets entail the competition of various businesses to get benefit from religious consumers by rebranding their goods and services that complies with their ethical standard of consumption. In other words, the statement of halal food or Muslim friendly places both is the way to describe the commercial value of products and to market local businesses according to the current trends.

However, there is a difference in halal food markets from other ethnic district studies. In which, the available businesses marketed as religious-compliant services are widely distributed in Kyoto city. The presented map above points out that the characteristics of locations are occupying major shopping areas, such as Kawaramachi-Dori street and Oike-Dori street of Kyoto City. Those areas are the basis of the central city commuters, located near Yasaka Shrine, Kyoto Station, as well as close to local universities.

Intersectionality of Migration, Identity, and Market Dynamics

The above discussion elucidates the emergence of business in Kyoto city that aims to attract Muslim consumers by marking the spatial information with the related religious symbol. Meanwhile, from the entrepreneur side, entering such market also requires overcoming structural and social barriers in order to win the competition. This section attempts to gain a deeper understanding on

⁶ Data obtained from State of the Global Islamic Economy Report.



(Map designed by the author, Source: Fieldwork)

Figure 1. The availability of Muslim friendly places and halal-certified restaurants

the roles of foreign workers' employment practices by local companies. In which, such labor importing pattern receives limited attention as an integral part of local markets.

The more receptive of the host society and country policy upon the particular group makes cultural differences as part of local livelihood (Portes, 2010), rather than minority-majority relational discourse (Johnson et al., 2017). At the same time, the acceptance of

local businesses toward foreign workers can result in a mixed economy (Nee et al., 1994). Cross-group employment is not only enabling to embed differences within organizations (Fuhse, 2012) but also, it helps to diversify the ethnically concentrated working sector (Nee and Holbrow, 2013; Maruyama and Woosnam, 2017).

This research employs the term of migrants and foreign workers interchangeably. Firstly,

as Roberts (2018) argues that migration in Japan is often a shadow phenomenon, and those categorized as students, trainees, and spouses of Japanese citizens are temporary migrants or potential migrants in the future. Accordingly, such arguments are also similar to Glick Schiller and Salazar's (2013) category of people who move across borders as people with migration backgrounds or migrants. Nation-state acknowledgments may hinder a complete understanding of migrants, where people who come as undocumented or temporarily stayers are not included. At the same time, they have been contributing by shaping the local economy practices (Goto, 1998; Hennings & Mintz, 2018). This research also uses a similar notion that foreign workers who work for Japanese companies and equates them with the category of migrants regardless of their status, whether as a student, a permanent worker, or a short-term employee.

Those who are categorized as migrants have overcome the barriers to enter Japan through company-sponsored visas as well as due to marital status by following Japanese spouses to stay in the country. The employment practice occurs through increasing demand for providing ethno-religious goods and services for local markets. Moreover, most of the informants have experienced to live in Japan beforehand. Therefore, they acquired related skills for filling the labor market gap through long processes, such as attending Japanese universities, exchange students, as well as taking Japanese language courses.

This process is different from the other national programs that require selection based on government to government (G to G) treaty. Meanwhile, business to business (B to B) does not necessarily involve a third party. Individuals can also apply for vacancies in a company. Most of the informants have

obtained a working visa in Japan for at least two years. Likewise, they also shared experiences that the renewal process of their stay is related to the market conditions.

This finding shows that workers in the occupational niche sectors are vulnerable in their job security. On the one hand, the global market conditions provide opportunities for them to work abroad in the area that accommodates their identity. On the other hand, there remains a yawning gap regarding job security from their type of occupations they work. One of the informants explained:

"I don't know until when I am working in this area. The company director gives me the flexibilities to manage the restaurant, but I have to make this restaurant works... They only know that selling is going on, and they will renew my visa every three years. It used to one year, as the immigration office has no record in this kind of business... I mean, back then in 2015, when the company just opened for few months, and they (the director boards) wanted to grant me a foreign-worker visa to operate their business. Now, the immigration office gives me three years after this business survived for the first two years" (1, Interview on 9 January 2019).

Another possibility for migrants to be able to work in Japan is also through the marriage channel. Moreover, when both spouses are practicing the same religion, they are more likely to exploit current market opportunities. During the field research, the findings noted that there are three restaurants established by couples. Those three restaurants have a similarity that one of the owners is a person with a migration background who married a Japanese.

*Foreign Workers' Roles for Businesses Breakout Process in an Ethnically Themed Market:
The Case of Halal Food Markets in Kyoto, Japan*

In a case of a niche industrial activities, the previous study suggests perceiving migrants as actors in shaping business practice through their ability to deal with the identity of targeted ethnic clientele (Edwards et al., 2016). The religious and ethnic identity of those who are employed by locals, in this sense, helps in developing products, and positioning companies in the market. As halal food is a specific dietary consumption among Muslims, hiring workers with Islamic background aims at understanding the targeted clientele better.

Most of the companies rely on migrants for production because of their proximal identity that often problematized by consumers. Even though the Japanese owners obtained training from local halal certification bodies, the interviews have found that their clients often question Japanese stores for providing halal food. As one of the informants explained:

“...Once it was a customer that I think he came from one of the Middle Eastern countries. When he saw there were no visible Muslim staffs, he went away... (1, Interview on 9 January 2019)”

The market demand has created a channel for importing labor force, especially within an industry that requires cultural performance. Among the Japanese, there are a limited number of Muslims and willing to work in similar job positions. However, although company and market conditions seem important factors for migration, there is also a personal motive in such the migration process. Based on the interviews, all informants expressed their concern for working in Japan based on their religious identity.

“...I chose to work in Japan because I want to practice my religion and be part of spreading messages of Islam... Even working in Indonesia for Japanese company has less pressure and be able to support my life... but my dream here is related to my religion as well as make a living... for those who work in Japan only for money without any goals, that is the most awkward decision I have ever known, with this amount of pressure, why would anyone works in Japan without any dreams (other than money)...? (with laughing) (1, Interview on 9 January 2019)”

“...I received two job offers, and I chose this company with a specific job category as I want to practice my religion while working abroad... (2, Interview January 14, 2018)”

Previous studies have analyzed the importance of supporting factors outside the workplace to attract foreign talents. Morita (2015) argues that relationships with host society are another salient aspect. Similarly, D’Costa (2013) also explains that perception over the career prospects in the country is part of considerations among highly-skilled migrants. However, those studies have not yet elaborated on the individual identity and migration perspective. By revealing their religious motives and preferred working sector, this finding also contributes to the previous discussion of ethnicity and identity for migration (Tsuda, 2002). This information shows how the problematized identity based on race and culture in migration is negotiated through religious and civic engagement (Levitt, 2008), primarily through market activities. In this sense, foreign workers perceive that contributing to the local market also goes hand in hand with their religious activities.

At the same time, from Japanese entrepreneur counterparts, they also learn to accept different ideas for conducting business, especially by foreign workers that often forced to do in Japanese ways (Morita, 2017). The negotiation of Japanese ways of doing business is by giving some workers a degree of flexibilities to perform their preferences to manage businesses. However, as one of the informants challenged:

“The director gives me flexibilities to manage the restaurant, I mean everything, from workers’ shifts, recruitments, budgeting, and daily operations. But, I feel like they don’t care about personal relations. There is no question to ask regarding how everything is going with my personal life. Even when my father passed away and I had to go back to Indonesia, she just said: please come back to work as soon as possible.” (2, Interview January 14, 2018).

Market Typology of Businesses in Halal Foods in Kyoto City

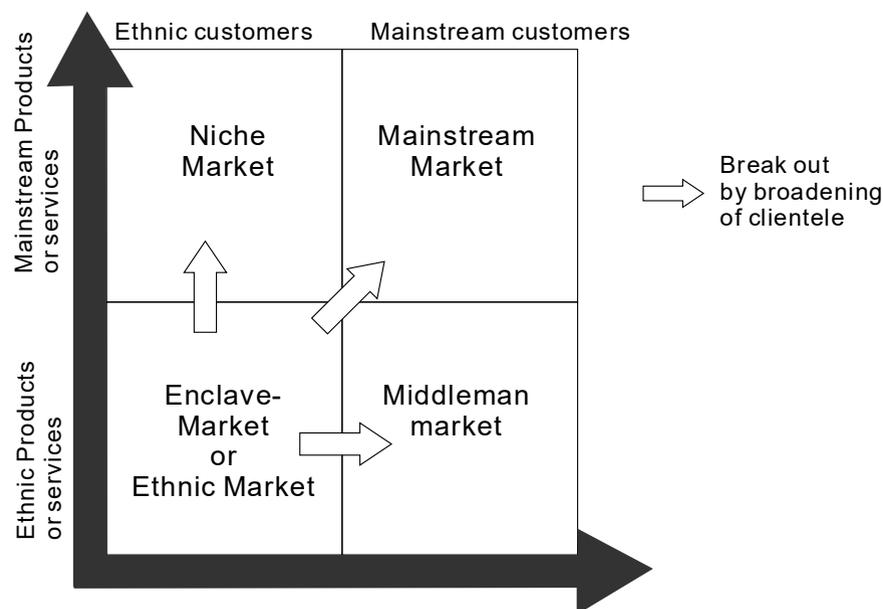
There is a typical pattern of people with migration backgrounds who work in a sector related to their ethnic identity. Despite their better educational attainment and better employment opportunity by the mainstream job market, however, they remain working in a sector that requiring their ethnic knowledge to attract similar ethnic clientele (Edwards et al., 2016). In this sense, scholars argue that the limitation of careers among migrants is the ethnic market itself. When they often work serving low-level economic activities or within an industry that has difficulties to grow, such as the restaurant business (Kloosterman, 2010), the opportunities of their economic mobilities are limited.

In order to comprehend migrants’ contribution in the business development process as well as the market category of their working places, this research employs a conceptual framework of the typologies of a market by Rusinovic (2008) and elaborated further by Lassalle & Scott (2018). Accordingly, the breakout concept is salient to clarify the relationship of ethnic workers, their contribution to the business development process, as well as market category.

There are four market categories where businesses are operating based on ethnic characters of products and consumers. Firstly, the domination of ethnic products to supply ethnic clientele is called the ethnic market. Business in this type of market also often relies on an ethnic network to sustain. The domination of business in this type of market is mainly informal, which opens their food order for supplying internal groups. This type of business is not included as part of the analysis of this research since they are merely an ad-hoc with no permanent store. Likewise, business in this category is also rarely having cross-group employment.

The second type is the middlemen market. There are many ethnic restaurants as a seller in halal food markets in Kyoto city. The most familiar restaurants are Turkish and Indian restaurants that market their products as exotic for the broader type of customers. Aiming solely at a similar ethnic group would be a disadvantage for these businesses as there are too few residents from a similar group. In addition to that, this type of business also rarely employs workers outside their ethnic group.

The third and fourth category is the niche market and the mainstream market. Businesses of most informants in this research fit under these two categories. Japanese-



Source: Adapted from Rusinovic (2008); and Lasalle and Scott (2017)

Figure 2. Typology of market

owned companies offer mainstream products to mainstream consumers. Subsequently, those companies diversify goods and services to include ethnoreligious clientele. Furthermore, cross-group employment activity also occurs within these two categories. However, as the two categories are challenging to understand in a separate way (Engelen, 2001), consequently, blurring the boundaries between the niche market and the mainstream market occurs as a result of product diversifications (Lasalle and Scott, 2018).

The previously overlooked ethnic customers are now becoming a targeted clientele. Unlike previous studies on the breakout focusing on immigrant entrepreneurs and their market categories, breaking-out in this research is providing information of local entrepreneurs that employing ethnic workers for reaching ethnic clientele (Pecoud, 2004; and Lasalle and Scott, 2017). Accordingly, the breakout process also indicates that

almost all entrepreneurs are cosmopolitan (Pecoud, 2004). Regardless of their migration backgrounds, it is essential to study and include the category in the discussion.

Selling halal food for most entrepreneurs is a diversification strategy to escape from the highly competitive restaurant business. Indeed, there are correlations between the availability of halal mark and the increasing religious consumers⁷. The gathered big data from public internet facilities, such as bus stops, train stations, as well as internet providers, indicates such correlation of ethnic customers and available ethnic products⁸. However, this does not mean that local businesses are fully transforming into ethnic-oriented products and clientele.

⁷ Fieldwork attending local business seminar in Kyoto City 25 January 2018.

⁸ Fieldwork attending local business seminar in Kyoto City 25 January 2018, panel discussion by an internet company which manages most of the internet connection in public facilities in Japan.

There are several shops in Kyoto City that previously served customers without paying attention to the concept of a religious dietary. Subsequently, over the past three years, more companies have been trying to encompass ethnoreligious clientele for their businesses. An example is a Japanese cuisine restaurant located in the western part of Kyoto, which has been operating for over sixty years, subsequently began to serve halal foods in the past two years. Accordingly, in the past three years, the management has a permanent foreign employee and continuously recruiting part-time students with related religious identity. This shifting strategy is due to enter the halal food business. As the vice president of the company stated:

"...I met my Muslim friend who visited Japan. She always says no to every Japanese food that I offered. I asked her, what kind of foods do you eat? From that point, I started to learn about halal food from my friend and visited the Kyoto Muslim Community for asking about halal food. Now, our restaurant which has been selling traditional Japanese dishes for over 50 years, is also providing service for Muslims... and to maintain the quality of our products, she helps us (pointing at the migrant worker) to control the daily operations..." (Interview, 18 January 2018)

Similarly, a Japanese-owned cooking school company, which is located near the major shopping district of Kawaramachi street, has decided to invest in the halal certificate. The owner pays about five hundred thousand Yen for the accreditation process from one of the Islamic institutions in Osaka. Although being acknowledged for understanding the halal process and "eligible" for supplying

the market, the owner remains caught in the limitations for distributing the services. Eventually, the school decided to hire an advisor who also a person who experience international migration from Indonesia. As a result, the cooking school has been starting activities addressing Muslim students from local universities. In this sense, the social network of the hired migrant enables the business to reach out to the targeted ethnic clientele.

In general, migrant workers' contribution affects the restaurant business by providing network channels with ethnic clientele as well as having the ability to recreate mainstream products for ethnic customers. Almost in every attended local business conferences, migrants are contributing to the mentioned economic activities. However, even though their working status is usually as skilled workers, such as local advisors in developing restaurant businesses or managers of the halal section in more prominent companies, their significant roles remain in the area of exploiting ethnic market and the restaurant business.

The presented table above concludes that the engagement of the migrants is part of the business transformation and diversification of products. Current opportunity structures have been attracting Japanese companies, especially businesses that operate in the food sector. The employment of people with religious-related identities who also mostly immigrants bridge the gap between demanded products and services and the necessary knowledge. Furthermore, the overall area of business which has been successfully explored is the service industry, especially restaurants and food-related products.

The diversified products help to attract targeted customers who have been neglected

Table 1. Type of food businesses employing foreign workers in the breakout process

Type of restaurant	Owner	Contribution of cross-group employment practices	Typology of the market (based on products and clientele)
Cooking school	Japanese	Product diversification by including the halal type of cooking and connecting to broader social networks.	The mainstream market
Ramen noodle restaurant	Japanese	Remaking and rebranding ramen for ethnoreligious and mainstream clientele.	The mainstream market and the ethnic market
Japanese cuisine restaurant	Japanese	Product diversification by providing two menus and other related religious consumer goods and services.	The mainstream market, niche market that also including ethnic market
Gift shop	Japanese	Product diversification by providing a specific section for ethnoreligious clientele.	The mainstream market and the ethnic market
Okonomiyaki or Japanese style fast food	Japanese	Product diversification by providing two menus for a broader clientele and ethnoreligious clientele.	The mainstream market and the middle-men market

Source: Fieldwork by the author

in the past years. However, one of the characters from the products that remain an issue is that it is consumed mostly by ethnic-related customers. In other words, even though foreign workers' employment activities facilitate broadening the clientele process, their offered products rely heavily upon customers with similar group category. Those circumstances, in turn, affect the job security from their occupations.

Conclusion

This research concludes that firstly, halal food markets provide an employment opportunity for migrants. The opportunity

comes from the gap between the increasing demands and the need for skills and knowledge. The local companies demand workers with related religious identity to facilitate the broadening targeted clientele of businesses.

The migration process of those workers occurs through long experience and mobilities between countries of origin and Japan. Early experiences of migrants working at local companies while studying at Japanese universities help them to know the situation in advance. The exploration process enables the informants of this research to know better the country's system regarding foreign workers' recruitment and validate their dream to work

abroad. This sort of migration process does not occur directly through the influence of the government-sponsored movement. Market dynamics play vital roles in the demand for foreign workers, and companies are at the heart of the migratory process.

Secondly, the evidence of this report shows that the occupational niche, which is resulted from the dynamics of halal food markets, does not necessarily fall into categories of the niche or the ethnic market when conceiving through the overall company position within the market. This finding implies that the mixture between broader and ethnoreligious products developed by companies where migrants work can provide jobs for a shorter period, on the one hand. On the other hand, the limitation of demands outside the targeted religious group for religious-standard products cannot assure that the occupations sustain for a more extended period.

Lastly, by studying the foreign workers' employment activities in the occupational niche and through the breakout concept, this research also shows that the critical aspects of migration based on market dynamics rely on both efforts of structure and agency in facilitating the process. Structure, such as local and national governments' policies, local companies' willingness to recruit foreign workers, enables to facilitate the flourishing of the market. At the same time, the prominent roles of agency or migrants are to transform the current opportunities using their abilities to capitalize on their possessed skills and knowledge that are not delimited to a particular group.

Acknowledgement

The earlier draft of this paper has been presented at the International Conference and

Summer Course 6-17th August 2018 (ICSC 2018) at Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. The author would also like to express gratitude for Fuminori Minamikawa, Ivanova Polina, and the reviewer of Jurnal Populasi for their comments and suggestions of this paper. The author finds no conflict of interest within the process of writing for this publication.

References

- Akashi, J. 2014. New aspects of Japan's immigration policies: is population decline opening the doors? *Contemporary Japan*, 26(2), 175–196. <https://doi.org/10.1515/cj-2014-0009>.
- Aytar, V., & Rath, J. 2012. Ethnic Neighbourhoods as Places of Leisure and Consumption. In V. Aytar & J. Rath (Eds.), *Selling Ethnic Neighborhoods: The rise of neighborhoods as places of leisure and consumption* (pp. 1–15). New York, NY: Routledge.
- Bergaud-Blackler, F. 2004. Social definitions of halal quality: the case of Maghrebi Muslims in France. In M. Harvey, A. McMeekin, & A. Warde (Eds.), *Qualities of food* (pp. 94–107). Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/j.ctt155j52v.11>.
- D'Costa, A. P. 2013. Positioning Indian emigration to Japan: the case of the IT industry. *Migration and Development*, 2(1), 16–36. <https://doi.org/10.1080/21632324.2013.773153>.
- Edwards, P., Ram, M., Jones, T., & Doldor, S. 2016. New migrant businesses and their workers: developing, but not transforming, the ethnic economy. *Ethnic and Racial Studies*, 39(9), 1587–1617. <https://doi.org/10.1080/01419870.2015.1116702>.

*Foreign Workers' Roles for Businesses Breakout Process in an Ethnically Themed Market:
The Case of Halal Food Markets in Kyoto, Japan*

- Engelen, E. 2001. 'Breaking in' and 'breaking out': a Weberian approach to entrepreneurial opportunities. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 27(2), 203–223. <https://doi.org/10.1080/13691830020041570>.
- Fischer, J. 2016. *Islam, Standards, and Technoscience: in global halal zones* (1st ed.). New York: Routledge.
- Fuhse, J. A. 2012. Embedding the Stranger: Ethnic Categories and Cultural Differences in Social Networks. *Journal of Intercultural Studies*, 33(6), 639–655. <https://doi.org/10.1080/07256868.2012.735109>.
- Glick Schiller, N., & Salazar, N. B. 2013. Regimes of Mobility Across the Globe. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 39(2), 183–200. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2013.723253>.
- Goto, J. 1998. The impact of migrant workers on the Japanese economy: Trickle vs. Flood. *Japan and the World Economy*, 10(1), 63–83. [https://doi.org/10.1016/S0922-1425\(96\)00251-4](https://doi.org/10.1016/S0922-1425(96)00251-4).
- Hennings, M., & Mintz, S. 2018. Toward a comprehensive estimate of the number of foreign workers in Japan. *Social Science Japan Journal*, 21(1), 103–115. <https://doi.org/10.1093/ssjj/jyx045>.
- Johnson, G. D., Thomas, K. D., & Grier, S. A. 2017. When the burger becomes halal: a critical discourse analysis of privilege and marketplace inclusion. *Consumption Markets and Culture*, 20(6), 497–522. <https://doi.org/10.1080/10253866.2017.1323741>.
- Kloosterman, R. C. 2010. Matching opportunities with resources: A framework for analysing (migrant) entrepreneurship from a mixed embeddedness perspective. *Entrepreneurship and Regional Development*, 22(1), 25–45. <https://doi.org/10.1080/08985620903220488>.
- Lassalle, P., & Scott, J. M. 2018. Breaking-out? A reconceptualisation of the business development process through diversification: the case of Polish new migrant entrepreneurs in Glasgow. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 44(15), 2524–2543. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1391077>.
- Levitt, P. 2008. Religion as a path to civic engagement. *Ethnic and Racial Studies*, 31(4), 766–791. <https://doi.org/10.1080/01419870701784489>.
- Light, I., & Gold, S. J. 2000. *Ethnic economies*. San Diego, California: Academic Press.
- Maruyama, N. U., Woosnam, K. M., & Boley, B. B. 2017. Residents' attitudes toward ethnic neighborhood tourism (ENT): perspectives of ethnicity and empowerment. *Tourism Geographies*, 19(2), 265–286. <https://doi.org/10.1080/14616688.2016.1258432>.
- Maruyama, N., & Woosnam, K. M. 2015. Residents' ethnic attitudes and support for ethnic neighborhood tourism: The case of a Brazilian town in Japan. *Tourism Management*, 50, 225–237. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.01.030>.
- Morita, L. 2015. Some Manifestations of Japanese Exclusionism. *SAGE Open*, 5(3). <https://doi.org/10.1177/2158244015600036>.
- Morita, L. 2017. Why Japan isn't more attractive to highly-skilled migrants. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1306952>.
- Nee, V., Sanders, J. M., & Sernau, S. 1994. Job Transition in an Immigrant Metropolis: Ethnic Boundaries and the Mixed Economy. *American Sociological Review*, 59(6), 849–872. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2096372>.
- Portes, A. 2010. Migration and social change: Some conceptual reflections. *Journal of*

- Ethnic and Migration Studies*, 36(10), 1537–1563. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2010.489370>.
- Rath, J., Bodaar, A., Wagemakers, T., & Wu, P. Y. 2017. Chinatown 2.0: the difficult flowering of an ethnically themed shopping area. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 0–18. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1332521>.
- Roberts, G. S. 2018. An immigration policy by any other name: Semantics of immigration to Japan. *Social Science Japan Journal*, 21(1), 89–102. <https://doi.org/10.1093/ssjj/jyx033>.
- Rusinovic, K. 2008. Moving between markets? Immigrant entrepreneurs in different markets. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 14(6), 440–454. <https://doi.org/10.1108/13552550810910997>.
- Sakurai, K. 2008. Muslims in Contemporary Japan. *Asia Policy*, 5(1), 69–87. <https://doi.org/10.1353/asp.2008.0002>.
- Samori, Z., Md Salleh, N. Z., & Khalid, M. M. 2016. Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131–136. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011>.
- Sassen, S. 2005. The Global City : Introducing a Concept. *Brown Journal of World Affairs*, XI(2), 557–573. Retrieved from <http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/the-global-city-brown.pdf>.
- Yusof, S. M., & Shutto, N. 2014. The Development of Halal Food Market in Japan: An Exploratory Study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 253–261. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2014.01.1126>.
- Zhou, M. 1992. *Chinatown: The socioeconomic potential of an urban enclave*. <https://doi.org/10.2307/2580398>.

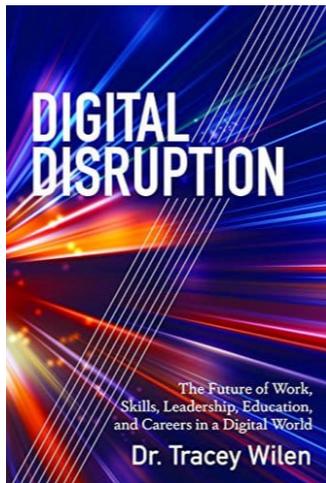
Resensi Buku

Tak Ada Tempat untuk Mengelak

Muhadjir Darwin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Muhadjir Darwin (e-mail: d_muhadjir@yahoo.com)



Judul : Digital Disruption: The Future of Work, Skills, Leadership, Education, and Careers in a Digital World
Penulis : Dr. Tracey Wilen
Penerbit : Peter Lang, New York
Cetakan : Pertama, 2018
Tebal : 204 halaman

Disrupsi tengah muncul seperti tsunami, suatu gelombang raksasa yang akan menghempas siapapun yang berada dalam jangkauannya. Sumber tsunami itu adalah teknologi digital; teknologi yang mengubah kehidupan manusia secara sangat mendasar, seperti dalam berkomunikasi, dalam bekerja, dalam belajar di sekolah, dan nyaris dalam seluruh kehidupan manusia. Dunia tengah terdisrupsi.

Buku ini menjelaskan tentang perubahan dahsyat tersebut dan dampaknya terhadap seluruh sektor kehidupan, seperti masa depan pekerjaan, industri, gaya kepemimpinan, ketrampilan, dan pendidikan. Buku ini mengurai dampak perubahan yang banyak tersebut secara rinci. Diawali di bab 1 dengan

mengurai secara garis besar bagaimana dampak teknologi digital terhadap masyarakat dalam membentuk gaya hidup baru dalam berkomunikasi, dalam membentuk dunia kerja yang baru, atau dalam meraih efisiensi. Di bab-bab berikutnya diuraikan tentang perubahan di setiap sektor kehidupan. Bab 2, misalnya, menjelaskan tentang masa depan pekerjaan, dan di Bab 3 diuraikan tentang masa depan Industri.

Pembaca yang tertarik pada studi kepemimpinan, dapat membaca tiga bab di tengah, yaitu bab 4, 5 dan 6 yang secara khusus membahas tentang implikasi dari disrupsi teknologi ini terhadap masa depan kepemimpinan. Di Bab 4 dikemukakan tentang munculnya model kepemimpinan

baru, yang disebut sebagai kepemimpinan disruptif, yaitu kepemimpinan dengan cara berfikir yang berbeda untuk mampu membawa organisasi ke dalam dunia baru yang penuh tantangan untuk berinovasi. Di Bab 5 dikemukakan menonjolnya perempuan di era disrupsi ini. Perempuan dikatakan sebagai “*natural born disrupters*,” atau makhluk yang secara alami terlahir untuk menjadi disruptor. Dapat dikatakan, era disrupsi adalah eranya perempuan; perempuan akan menjadi pemimpin kunci di semua jenis organisasi.

Lima bab terakhir, bab 6 sampai bab 10 menjelaskan tentang bagaimana orang harus menyesuaikan diri di tengah tsunami teknologi yang tengah mengubah dunia ini secara mendasar. Bagaimana inovasi harus dikembangkan di tengah masyarakat multi-identitas yang terus berkembang? Bagaimana agar perubahan teknologi ini tidak membuat kita justru kehilangan pekerjaan? Ketrampilan baru apa yang harus kita miliki agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital? Bagaimana pendidikan manusia harus juga menyesuaikan diri agar relevan di tengah revolusi industri ini, dan bagaimana kita bisa melakukan semacam “selfie”, memotret diri sendiri untuk mengetahui di mana kita sekarang dalam dunia karier, dan kita akan menuju ke mana besok? Suatu upaya untuk membuat kita tidak hanyut, tetapi justru meneng, di tengah arus perubahan.

Tsunami disrupsi ini telah disadari oleh banyak pihak, dan tuntutan bagi kesiapan Indonesia untuk menghadapinya telah pula digemakan. Presiden Jokowi, dalam pidato kenegaraan di hadapan DPR, DPD, dan MPR tanggal 16 Agustus 2019 telah menyatakan bahwa kemapanan bisa runtuh, dan ketidakmungkinan bisa terjadi. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat; banyak jenis pekerjaan lama yang hilang, tetapi juga

makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan. Ada profesi yang hilang, tetapi juga ada profesi baru yang bermunculan.

Guru Besar UGM, Prof. Erwan Agus Purwanto, dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar pada 23 Desember 2019 menyatakan bahwa di dunia yang terdisrupsi ini, pemerintah harus mengelola masyarakat secara berbeda. Harus terwujud birokrasi dan kebijakan publik yang *agile* dan inovatif untuk menghadapi VUCA (*volatile, uncertain, complex, dan ambiguous*). Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pemimpin publik harus pula memiliki karakter *agile* atau tangkas, yaitu memiliki visi yang jelas yang berfokus pada tren baru dan tujuan organisasi yang strategis. Selain itu, pemimpin perlu menyusun kebijakan yang fleksibel terhadap penggunaan sumberdaya di mana dan kapan sumberdaya tersebut dialokasikan.

Pedoman untuk Penulis

Populasi adalah jurnal penelitian dan analisis kritis masalah-masalah terkait tema besar kependudukan dan kebijakan. Redaksi menerima naskah artikel hasil penelitian, baik kepubstakaan maupun lapangan, dan resensi buku dalam lingkup tema tersebut. Naskah yang diajukan harus orisinal, belum pernah dipublikasikan atau sedang dipertimbangkan untuk diterbitkan oleh media lain, dan tidak mengandung unsur plagiarisme (dinyatakan dengan pernyataan tertulis).

Pengiriman Naskah

- *Populasi* menggunakan *Open Journal System* (OJS) dan menganjurkan para penulis melakukan register terlebih dahulu kemudian mengunggah naskah secara *online* di <http://jurnal.ugm.ac.id/populasi>. OJS mempermudah dewan redaksi, editor, *peer review*, dan penulis dapat memantau proses naskah, secara *online*.
- Naskah dalam bentuk MS-Word dikirim via *e-mail* ke jurnalpopulasi@ugm.ac.id atau jurnalpopulasi@gmail.com.
- Soft file boleh juga diserahkan langsung ke sekretariat Pengelola Populasi, di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. Gedung Masri Singarimbun, Lt. 2. Jl. Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Tlp. 0274-6491153, 547867.

Ketentuan Naskah

- Mohon perhatikan instruksi di bawah ini dengan cermat. Penyunting berhak mengembalikan atau menolak naskah yang tidak sesuai dengan butir-butir instruksi di bawah ini.
- Naskah ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, berformat MS-Word, huruf Times New Roman, 1 spasi, tidak melebihi 10.000 kata.
- Judul dan subjudul: Judul harus spesifik dan efektif sehingga sekali baca dapat ditangkap maksudnya. Judul terdiri sebanyak-banyaknya 14 kata pada naskah berbahasa Indonesia atau 10 kata pada naskah berbahasa Inggris. Subjudul di dalam teks harus singkat dan jelas. Hindari terlalu banyak subjudul dan hindari penggunaan nomor. Naskah berbahasa Indonesia harus mempunyai judul dalam bahasa Inggris.
- Penulis: nama (-nama) penulis ditulis di bawah judul tanpa mencantumkan gelar akademik atau jabatan apa pun. Deskripsi singkat tentang penulis, meliputi institusi asal penulis dan *e-mail* korespondensi ditulis di bawah nama penulis.
- Catatan kaki: Gunakan catatan kaki dari pada catatan akhir.
- Abstrak (*abstract*) dan kata kunci (*keywords*): disusun dalam satu paragraf 100-200 kata, yang menjelaskan secara gamblang, utuh, dan lengkap keseluruhan isi tulisan. Intisari berisi ide-ide pokok tentang latar belakang, masalah dan tujuan, kerangka berpikir, metode, pembahasan, dan kesimpulan, serta ditulis dengan

bahasa yang tidak sama dengan bahasa naskah. Abstrak disertai dengan kata kunci yang mencerminkan konsep-konsep paling penting yang dikandung naskah. Kata kunci terdiri sekurang-kurangnya 2 kata dan sebanyak-banyaknya 4 kata. Naskah berbahasa Indonesia harus mempunyai abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.

- Tabel, grafik, gambar, ditulis dalam ukuran huruf yang sama, atau relatif sama, dengan ukuran huruf pada naskah. Judul tabel atau gambar ditulis dengan lay-out sebagai berikut:

- **Tabel 1 Kepemilikan Aset Berdasarkan Status Ekonomi Gambar 1 Skema Penyaluran Bansos**

- Setiap tabel atau gambar harus menyertakan sumber atau catatan di bawahnya.
- Pendahuluan: menguraikan secara ringkas tentang latar belakang dan formulasi masalah penelitian, tujuan penelitian, serta kajian teoretis yang relevan dan jika memungkinkan, menyebutkan hipotesis.
- Metode: menguraikan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk di dalamnya pemaparan tentang desain penelitian, sasaran penelitian, instrumen dan teknik/prosedur pengumpulan data, serta analisis data.
- Pembahasan: menyajikan secara naratif pokok-pokok hasil penelitian dengan didukung sajian tabel, grafik atau diagram, serta menjawab permasalahan penelitian dengan cara menafsirkan temuan dan mengaitkannya dengan struktur pengetahuan yang telah mapan.
- Kesimpulan: menyajikan ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran yang tidak melampaui

kapasitas temuan penelitian dan dapat dilaksanakan.

- Daftar Pustaka: memuat semua kepustakaan yang dirujuk dalam naskah dan tidak memuat kepustakaan yang tidak dirujuk. Yang menjadi pertimbangan kepustakaan adalah sebagai berikut. Derajat kemutakhiran kepustakaan yang diacu dengan melihat proporsi terbitan 10 tahun terakhir. Semakin banyak kepustakaan primer diacu, semakin naskah bermutu.
- Kesimpulan: menyajikan ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran yang tidak melampaui kapasitas temuan penelitian dan dapat dilaksanakan.
- Resensi buku. Naskah resensi buku harus menyertakan informasi mengenai judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman buku yang dirensi. Isi resensi buku memuat informasi dan pemahaman mengenai apa yang diungkapkan di dalam buku tersebut, serta penilaian dan pertimbangan kepada pembaca akan pentingnya buku tersebut. Naskah resensi buku berkisar antara 1.500-2.000 kata.

Penulisan Referensi

Dalam Naskah

- Karya yang dikutip dalam teks menggunakan format: (Gray, 2008: 501).
- Pengutipan dalam kelompok ditulis secara alfabetis menggunakan titik koma sebagai pemisah: (Brown, 2008; Gray & Gani, 1998; Stuart, 2002).
- Gunakan 'et.al.' atau 'dkk' ketika mengutip satu karya yang ditulis oleh lebih dari dua penulis, tetapi tulis semua pengarang di dalam Daftar Pustaka.

- Untuk membedakan karya yang berbeda oleh penulis yang sama dalam tahun yang sama, gunakan huruf a, b, c, dst., seperti Arifin (2002a, 2002b).
- Tidak ada penulisan menggunakan garis bawah atau *underline* baik di dalam naskah, catatan kaki maupun daftar pustaka.

Dalam Daftar Pustaka

- Penulisan karya dalam daftar pustaka ditulis dalam urutan alfabetis dan kronologis.
- Buku dengan satu penulis: Singarimbun, Masri. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku dengan lebih dari satu penulis: Baumert, Kevin; Ruchi Bhandari and Nancy Kete. 1999. *What Might a Developing Country Climate Commitment Look Like?* Washington, D.C.: World Resources Institute.
- Penulis berbentuk korporasi atau lembaga: Universitas Gadjah Mada. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. 2006. "Penelitian Peningkatan Efektivitas Program Raskin Melalui Pendampingan Lembaga Perguruan Tinggi". (Laporan akhir). Yogyakarta: Bekerja sama dengan Perum Bulog.
- Artikel majalah atau jurnal: Listyaningsih, Umi dan Eddy Kiswanto. 2008. "Bantuan Langsung Tunai: mengatasi Masalah dengan Masalah". *Populasi*, 19 (1), 13-26.
- Artikel dari surat kabar: Darwin, Muhadjir. 2008. "Strategi dan Pencapaian MDGs". *Kedaulatan Rakyat*, 15 Oktober, hlm. 9.
- Karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain): Asmi, Handria. 2010. "Manajemen Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Agam: Studi Penyaluran Bantuan Korban Gempa Bumi Tanggal 30 September

2008". (Tesis). Yogyakarta: Magister Studi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

- Makalah seminar: Milla, Mirra Noor. 2008. "Profil Psikologis Teroris di Indonesia: Dasar Bagi Penerapan Metode Counter-Terrorism". *Makalah Seminar Bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 10 September*.
- Artikel dari internet: Abimanyu, Anggito. 2006. "Kebijakan Publik Dalam Praktek". <http://www/paue.ugm.ac.id/seminar/update2007/anggito-1.ppt>, diakses 2 Juni 2008, pukul 10.00 WIB.
- Buku terjemahan: Jellinek, Lea. 1994. *The Wheel of Fortune: the History of a Poor in Jakarta*. Diterjemahkan oleh Eddy Zainuri dengan judul *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*. Jakarta: LP3ES.
- Pustaka tidak diketahui penulisnya: Anonim. 2007. *Kiat Sukses Modal Kepercayaan*. Yogyakarta: Sokolimo Press.

Kepastian naskah yang dimuat akan diberitahukan melalui *e-mail* korespondensi atau pos. Selagi penulis belum memperoleh kepastian tersebut, tidak boleh mengirimkan naskah untuk diterbitkan di tempat lain.

FORMULIR BERLANGGANAN

Nama (Instansi/Perorangan) :
Alamat :
.....
.....
.....
.

Harap dicatat sebagai pelanggan Jurnal POPULASI, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bersama ini saya kirimkan pembayaran melalui rekening Bank Mandiri No. 137-00-0624454-1, atas nama YP3K-UGM sebesar Rp

untuk edisi, mulai nomor/bulan

dengan harga per eksemplar Rp60.000.

....., 201....
Pelanggan,

.....

